

345 081  
BUD  
2 21

KEBIJAKAN SANKSI PIDANA ANAK  
DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA



TESIS

Diajukan dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh :

SHINTA RUKMI BUDIASTUTI, SH.

NIM : B4A 000064

PEMBIMBING :

PROF. DR. BARDA NAWAWI ARIEF, SH  
EKO SOPONYONO, SH, MH

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG

2003

KEBIJAKAN SANKSI PIDANA ANAK  
DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Oleh :

SHINTA RUKMI BUDIASTUTI, SH.

NIM : B4A 000064

Tesis ini Telah Diterima  
Sebagai Persyaratan untuk Menempuh Ujian Tesis  
Program Magister Ilmu Hukum

Pembimbing I



Prof. DR. Barda Nawawi Arief, SH

NIP : 130.350.519

Pembimbing II



EKO SOPONYONO, SH, MH

NIP : 130.675.155

Mengetahui

Ketua Program

Magister Ilmu Hukum



Prof. DR. Barda Nawawi Arief, SH

NIP : 130.350.519

UPT-PUSTAK-UNIP

No. Daft.: 2305/1.T/M.H./4  
Tgl. : 12 Feb 04

## ABSTRAK

Anak sebagai sumber daya manusia dan bagian dari generasi muda, sudah selayaknya mendapat perhatian khusus, pembinaan yang intensif untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh dan berkualitas. Disisi lain, terdapat anak yang terpaksa berhadapan dengan hukum karena perilaku menyimpangnya. Dalam tesis ini penulis akan mengupas tentang kebijakan sanksi pidana anak dalam perundang-undangan di Indonesia.

Dalam melakukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia, bertolak pada tiga masalah pokok dari hukum pidana yaitu perbuatan apa yang sepatutnya dipidana, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan tindak pidana dan sanksi (pidana) apa yang seharusnya dikenakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Dalam Tesis ini diuraikan tentang kebijakan sanksi pidana anak dalam UU No 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak serta kebijakan sanksi pidana anak pada masa yang akan datang.

Terhadap pelaku diberikan batasan usia yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang. Adapun mengenai sanksi yang dikenakan didalamnya yang terdiri dari pidana pokok yang didalamnya memuat pidana penjara, pidanakurungan, pidana denda dan pidana pengawasan, sedangkan pidana tambahan berisi perampasan barang-barang tertentu; pembayaran ganti rugi dan tindakan yang berupa pengembalian kepada orang tua, wali atau orang tua asuh; menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja; menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak setengah dari pidana yang dijatuhkan kepada orang dewasa.

Berkaitan dengan sistim hukum yang dipakai dalam rangka penyusunan kebijakan legislatif pada masa yang akan datang berdasarkan perbandingan yang dilakukan terhadap beberapa KUHP asing maka perwujudan sanksi pidana yang ada didalamnya disusun mulai dari sanksi yang paling ringan menuju yang paling berat. Didalam formulasi hukum di Indonesia masih menjatuhkan pidana penjara sebagai pidana pokok. Didalam KUHP asing dikenal adanya sanksi alternatif (*alternative sanction*) sebagai pengganti pidana pokok. Hal ini menunjukkan bahwa pidana penjara dan kurungan mulai dihindarkan, dikarenakan efek negatif yang ditimbulkan akan lebih berat. Pidana yang non custodial lebih dikedepankan untuk menggantikan pidana penjara ini. Hal yang seperti ini yang sangat diharapkan karena sejauh mungkin menghindari stigma tentang penjara.

Hendaknya pengaturan mengenai jenis - jenis sanksi pidana yang telah ada dilengkapi dengan tujuan, pedoman maupun syarat-syarat khusus untuk memudahkan dalam penerapannya.

## ABSTRACT

Children as the human resource and the part of the young generation, have to get the special attention, the intensive guidance to realize the strong and qualified human resource. In the other side, there are some children that have to against the law due to their bad attitudes. In this thesis, the writer will explain the policy of criminal punishment on children in the law of Indonesia.

In the implementation of the renewal of criminal law in Indonesia, based on the three main issues of the criminal law, that is, the behavior that punished properly, the requirements that has to be provided to responsible the illegal action and the punishment that is imposed on children who conduct the illegal action.

This thesis explains the policy of the criminal punishment on the children in the law No. 3, 1997 about the children judicature and the policy of the criminal punishment on children in the future.

The subject is given the limit of age that is established by the legislative. The punishment that is imposed consist of the primary punishments involving the jail punishment; confinement punishment; fine punishment and the supervision punishment, while the secondary punishments consist of the expropriation of certain things; the payment of compensation and the action of the restitution to the parent or the guardian; back them to the state to follow the education, guidance and the work training; back them to the social department or the social organizations that move in the field of education, guidance and the work training. These punishments is half of the punishment of adults.

Related to the law system that used to arrange the legislative policies in the future based on the comparison that carried out against some foreign Criminal Law Books, then the realization of criminal punishment that involved in it began from the lightest punishment to the heaviest ones. In the formation of Indonesian law, there is a jail punishment as the main punishment. In the foreign law, there are alternative sanctions as the substitution of the main punishment. It is showed that the jail punishment and confinement punishment begin to be avoided, due to the bigger negative effect. Until now, there is a trend to do again their illegal action after get into jail. Nowadays, there is a developing thinking to find the alternatives that propose to put in front the non custodial punishment. It is expected can avoid the stigma of the jail.

There should be the arrangement of various of punishments that completed with the purposes, the guidance and the special requirements to apply these easily.

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan kepada:

- Agama, Negara dan Bangsa
- Eyangku tercinta yang selalu memberikan doa dan semangat
- Bapak, Mama dan adikku tercinta yang selalu memberikan spirit dan doa.
- Seseorang yang aku sayang terimakasih untuk perhatian, semangat dan cinta yang diberikan
- Sahabat serta teman-teman yang telah banyak mendorongku
- Almamater tercinta

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Tesis yang berjudul **“KEBIJAKAN SANKSI PIDANA ANAK DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”** dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Tesis ini dimaksudkan untuk melengkapi syarat guna menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang.

Penyusunan Tesis ini tentunya tidak akan berhasil dengan baik tanpa bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu tidak lupa penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Prof. DR . Barda Nawawi Arief selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Sekaligus selaku dosen pembimbing, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu untuk memberi petunjuk serta saran-saran bagi penyusunan Tesis ini.
2. Eko Soponyono, SH,MH selaku dosen pembimbing yang dengan kesabaran dan ketelitiannya telah memberikan petunjuk serta saran-saran dalam penyusunan Tesis ini.
3. Budiharto, SH,MS selaku sekretaris Bidang Akademis yang dengan penuh perhatian dan kesabaran bersedia mendengarkan keluhan dan menjawab pertanyaan seputar proses belajar mengajar di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

4. Segenap Dosen dan Asisten Dosen Program Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan bimbingan dan pencerahan selama penulis susuk dibangku kuliah.
5. Pulus Hadi Suprpto, SH, Mh selaku reviwer sekaligus dosen penguji yang penuh keasapan memberi petunjuk serta saran-saran yang berguna dalam penyusunan Tesis ini.
6. Segenap Staf dan Karyawan Administrasi di Lingkungan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang dengan segenap hati membantu penulis serta rekan-rekan sekelas dalam masalah administrasi perkuliahan
7. Karyawan dan Karyawati Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Perpustakaan Nasional Jakarta yang dengan baik hati melayani peminjaman buku
8. Para Staf dan Karyawan di lingkungan DPR-RI Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional serta Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman RI yang dengan penuh kesabaran membantu penukis mencari dan memberikan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan Tesis ini.
9. Eyang, Bapak, Mama dan adikku tercinta dina yang selalu mendoakan serta memberi semangat dan dukungan pada penulis untuk selalu bekarya.
10. Calon suamiku tercinta yang telah memberikan perhatian, cinta dan dukungan.
11. Sahabat-sahabatku Heru, Bambang, Iik yang telah memberikan bantuan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan Tesis ini
12. Saudara-saudaraku mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Kajian Sistim Peradilan Pidana (pagi) angkatan 2000, Marcella, Heni, Etty, Reni , Lena, Trisno, Agus ,Anis, Lili, Lubis, Novi, Adnan, Budi, Ira, Dewi, Yunita, Altje, Vonny dan

Rohmat yang telah bersama-sama berjuang, belajar dan berdiskusi dan dengan tulus memberikan dukungan selama penulis menempuh studi.

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang tanpa disadari telah turut membantu penyelesaian tesis ini

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan balasan atas segala budi baik dan bantuan yang diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh sekali dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran untuk menyempurnakan tesis ini sangat penulis harapkan.

Ahir kata semoga tesis ini dapat membawa manfaat bagi para pembaca pada umumnya dan dunia pendidikan pada khususnya.

Semarang, Februari 2003

Penulis

Shinta Rukmi Budiastuti, SH



# DAFTAR ISI

Halaman

|  |       |
|--|-------|
| HALAMAN JUDUL.....                     | i     |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                | ii    |
| ABSTRAK.....                           | iii   |
| PERSEMBAHAN.....                       | iv    |
| KATA PENGANTAR.....                    | v     |
| DAFTAR ISI.....                        | vii   |
| <br>BAB 1. PENDAHULUAN.....            | <br>1 |
| A. LATAR BELAKANG.....                 | 1     |
| B. PERUMUSAN MASALAH.....              | 10    |
| C. TUJUAN PENELITIAN.....              | 11    |
| D. MANFAAT HASIL PENELITIAN.....       | 11    |
| E. METODE PENELITIAN.....              | 12    |
| 1. Metode Pendekatan Permasalahan..... | 12    |
| 2. Jenis Sumber Data.....              | 13    |
| 3. Metode Pengumpulan Data.....        | 14    |
| 4. Analisis dan Penyajian Data.....    | 14    |
| F. SISTIMATIKA PENULISAN.....          | 15    |

|         |  |     |
|---------|--|-----|
| BAB II  | TINJAUAN PUSTAKA .....   | 17  |
| A.      | GAMBARAN UMUM MENGENAI ANAK.....   | 17  |
| 1.      | Pengertian Anak dan Anak Nakal (Kenakalan Anak)....                          | 17  |
| 2.      | Batas Usia Anak Dalam Ketentuan Perundang-undangan                           | 21  |
| 3.      | Hak-hak dan Perlindungan Anak Dalam Perundang-undangan                       | 23  |
| B.      | TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DAN<br>LATAR BELAKANGNYA .....        | 35  |
| 1.      | Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak dan Upaya<br>Penanggulangannya.....   | 35  |
| 2.      | Latar Belakang Pidana yang Dilakukan oleh Anak .....                         | 47  |
| C.      | TEORI PEMIDANAAN (DASAR PEMBENARAN DAN TUJUAN<br>PIDANA).....                | 65  |
| 1.      | Teori Pidana (Dasar Pembetulan dan Tujuan Pidana).....                       | 65  |
| 2.      | Tujuan Pidana Bagi Anak .....  | 76  |
| BAB III | PEMBAHASAN.....  | 80  |
| A.      | SANKSI PIDANA ANAK DALAM UU. NO 3 TAHUN 1997<br>TENTANG PENGADILAN ANAK..... | 80  |
| 1.      | Pidana Pokok.....  | 85  |
| 2.      | Pidana Tambahan.....   | 103 |
| 3.      | Tindakan.....  | 105 |

|   |     |
|---|-----|
| B. KEBIJAKAN SANKSI PIDANA PADA MASA YANG AKAN DATANG.....  | 112 |
| 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....                    | 112 |
| 2. Konsep RUU KUHP tahun 1999/2000.....                     | 112 |
| 3. KUHP Belanda.....  | 120 |
| 4. KUHP Yugoslavia.....                                     | 129 |
| 5. UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....      | 135 |
| 6. Kecenderungan Internasional.....                         | 138 |
| 7. Kebijakan Sanksi Pidana Pada Masa Yang akan Datang ..... | 149 |
| BAB IV PENUTUP  |     |
| A. KESIMPULAN.....  | 163 |
| B. SARAN.....   | 167 |
| DAFTAR PUSTAKA.....   | 169 |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Anak sebagai sumber daya manusia dan bagian dari generasi muda, sudah selayaknya mendapat perhatian khusus dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh dan berkualitas.

Masalah kenakalan anak dewasa ini tetap merupakan persoalan yang hangat dan hampir dialami semua negara yang ada di dunia. Perhatian dan pembinaan yang sebaik-baiknya dari pemerintah dan masyarakat terhadap anak nakal sangat menentukan sekali bagi kesejahteraan anak sebagai generasi penerus dikemudian hari. Timbulnya kenakalan anak ini akan mengancam baik bagi negara, masyarakat maupun keluarga.

Anak adalah suatu pribadi yang unik dan ada hampir disetiap anak terdapat kecenderungan untuk memberontak. Oleh karena itu wajar apabila seorang anak mempunyai sifat nakal dan karena itu juga merupakan tahap-tahap dari perkembangan seorang anak. Namun apabila kenakalan anak telah mencapai taraf yang sedemikian menyimpang dari kewajaran, patut selekasnya di tangani. Sebelumnya harus dipahami terlebih dahulu, bahwa kenakalan anak-anak yang

tersebut di atas tidak dapat dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa. Untuk lebih jelasnya dikemukakan pendapat dari Marcus P Gunarto sebagai berikut :

Mengenai kenakan anak tidak dapat disamakan begitu saja dengan arti kejahatan yang dilakukan orang dewasa. Perbuatan orang dewasa sudah disadari oleh sikap kesengajaan dalam arti penuh, telah dipikirkan dan pertimbangkan secara masak, artinya perbuatan orang dewasa sudah harus menunjuk kepada suatu tanggungjawab pribadi dan sosial<sup>1</sup>

Kejahatan adalah salah satu bentuk dari pelanggaran kaedah sosial.<sup>2</sup> Karena itu, muncul dan berkembangnya kejahatan akan menjadi problem sosial.<sup>3</sup> Pada kesempatan lain, Arif Gosita berpendapat bahwa, "..... Kejahatan merupakan suatu hasil interaksi karena adanya interaksi antara fenomena yang ada dan saling berhubungan"<sup>4</sup> Hal ini sedikit banyak disebabkan oleh pengaruh pendidikan dalam keluarga dan pergaulan di luar rumah. Sehingga kecenderungan meningkatnya kuantitas maupun kualitas pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang dilakukan oleh pelaku-pelaku muda usia.

Dengan perkataan lain meningkatnya kenakalan remaja yang mengarah pada tindakan kriminal, mendorong orang tua untuk lebih banyak memberikan perhatian akan penanggulangan serta penanganannya.

<sup>1</sup> Marcus Priyono Gunarto, Laporan Penelitian Faktor-faktor Penyebab Perbuatan Pidana Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Pada LPAN Jateng-DIY) 1989, Hal 6

<sup>2</sup> Soejono, Kriminologi, Bandung :Transito, 1974, Hal 34

<sup>3</sup> Reinhard mengemukakan 3 ciri problem sosial, yaitu :

- a. terjadi dalam masyarakat
- b. membawa akibat terhadap masyarakat
- c. merupakan tanggung jawab masyarakat

Reinhard dalam ,B. Simanjuntak, Latar Belakang Kenakalan Remaja, Bandung: Alumni, 1984, Hal 2

<sup>4</sup> Arif Gosita Masalah Korban Kejahatan ,Jakarta : Akademika Presindo, 1985, Hal 170

Demikian urgennya persoalan anak, telah mendorong masyarakat bangsa-bangsa di dunia selalu berupaya memberikan perhatian akan pentingnya perlindungan terhadap anak. Perhatian masyarakat internasional tentang perlindungan anak diawali dengan adanya Deklarasi Jenewa tahun 1924, tentang Hak-Hak Anak yang di akui dalam Deklarasi PBB tentang *Universal Declaration Of Human Right* tahun 1948. Deklarasi tersebut mendasari di sahkannya Deklarasi Hak-Hak Anak ( *Declaration of the Right of the Child*) oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1958<sup>5</sup>

Dalam deklarasi ini dinyatakan bahwa ;

*Where are the child by reason of his physical and mental, needs special safeguard and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth* ( Mengingat alasan fisik dan mental yang belum matang membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus termasuk perlindungan hukum sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan). <sup>6</sup> . Pernyataan yang sama tercantum pula dalam Konvensi Hak-Hak Anak <sup>7</sup>.

Menurut UUD 1945 masalah anak tersirat di dalam pasal 34 UUD 1945 yang menyebutkan " Fakir miskin dan anak-anak terlanta" di pelihara oleh negara". Dalam hal ini anak merupakan subjek hukum dalam sistem hukum nasional, yang harus dilindungi, dipelihara dan

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, (dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief) **Bunga Rampai Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1992, hal 108

<sup>6</sup> Resolusi PBB 1386 (XIV), **Deklarasi Hak-Hak Anak**, tanggal 20 November 1958

<sup>7</sup> *Bearing in mind that, as indicated in Declaration of Right of the Child "the child by the reason of his physical and mental immaturity, need special safeguard and care, including appropriate legal protection, before as well after birth".* ( Mengingat bahwa, sebagaimana yang dinyatakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak, " anak karena ketidak matangan jasmani dan mentalnya, memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahiran ")  
Konsideran Resolusi PBB Nomor 44/25, 20 November 1989, **Convention Of Right Of The Child**, UNICEF.

dibina demi terwujudnya kesejahteraan anak. Kepentingan pembangunan bangsa dan negara harus memprioritaskan anak, sebagai sumber aspirasi untuk lahirnya generasi baru pewaris bangsa dengan kemampuan ilmu dan teknologi yang tinggi sehingga dapat mensejahterakan rakyat Indonesia.

Terjadinya tingkat kenakalan (kejahatan) anak bukan saja merupakan satu bentuk gangguan keamanan dan ketertiban semata-mata, melainkan juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa. Walaupun diakui bahwa penanganan anak bermasalah sejauh mungkin dihindarkan dari campur tangan sistem peradilan<sup>8</sup>

Menetapkan sanksi pidana penjara dalam perundang-undangan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan merupakan bagian dari salah satu kebijakan kriminal atau politik kriminal.<sup>9</sup>

Melaksanakan politik kriminal antara lain membuat perencanaan atau menanggulangi masalah-masalah yang berhubungan dengan kejahatan.

---

<sup>8</sup> Secara umum asas-asas umum UNSMR-JJ ( Beijing Rules) menyatakan tentang perlunya kebijakan social yang komprehensif yang bertujuan untuk mendukung tercapainya sebesar mungkin kesejahteraan anak, yang pada gilirannya akan mengurangi campur tangan sistim peradilan anak. Dengan berkurangnya capur tangan sistim ini, kerugian-kerugian pada diri anak akibat capur tangan sistim dapat dicegah. Langkah yang perlu dilakukan untuk itu adalah pemberian perhatian dan pengambilan tindakan pada anak dan remaja sebelum mereka terlibat perilaku penyimpangan atau kejahatan **United Nation Standart Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice**, Departement of Public Information , New York 1986

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, **Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara** , Badan Penerbit UNDIP, 1996, Hal. 2

Termasuk dalam perencanaan ialah merumuskan perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya di jadikan tindak pidana dan menetapkan sanksi-sanksi apa yang seharusnya di kenakan pada si pelanggar.

Di antara berbagai jenis pidana pokok, pidana penjara merupakan jenis sanksi pidana yang paling banyak di tetapkan dalam produk perundang-undangan pidana selama ini. Sehingga dalam perkembangannya pidana penjara merupakan jenis sanksi pidana yang saat ini mendapat sorotan tajam dari para ahli sebagai jenis pidana perampasan kemerdekaan yang kurang disukai.

Dalam melakukan pembaharuan hukum pidana, konsep rancangan KUHP disusun dengan bertolak pada tiga materi atau substansi atau masalah pokok dari hukum pidana (material) yaitu ;

a) perbuatan apa yang sepatutnya dipidana; b) syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk memperlakukan atau mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu; dan c) sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan terhadap orang itu. Ketiga materi atau masalah pokok itu biasa disebut secara singkat dengan istilah : masalah tindak pidana; masalah kesalahan dan masalah pidana.

Dalam permasalahan pokok hukum pidana yang ketiga yaitu mengenai masalah pidana dipertimbangkan seberapa jauh hukum pidana mengatur dan membatasi kewenangan mengenakan atau



menjatuhkan pidana karena sistem pemidanaan yang di tuangkan dalam perumusan undang-undang pada hakikatnya merupakan suatu sistim kewenangan menjatuhkan pidana.

Dalam rangka pembaharuan hukum pidana khususnya mengenai sistem pemidanaan atau sistem kewenangan menjatuhkan pidana maka perlu di pertimbangkan benar-benar isi dari hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia dan istrumen-instrumen internasional yang ada dan berkembang dalam masyarakat internasional baik itu pengaturan mengenai jenis-jenis pidananya (*strafsoort*), berat ringannya pidana (*strafmaat*) dan cara bagaimana pidana tersebut di laksanakan (*strafmodus*).

Dengan beberapa pertimbangan sehubungan dengan perkembangan Internasional mengenai pencegahan kejahatan dan pembinaan terhadap pelaku kejahatan dalam kongres internasional berkembang pemikiran mengenai alternatif sanksi pidana penjara sebagai sanksi yang telah lazim dijatuhkan.

Hal ini disebabkan adanya sisi negatif dari pidana penjara. Berbagai alternatif untuk pidana penjara, tampak dalam berbagai keputusan berikut ini :

1. *Rekomendasi yang di usulkan oleh Sub Commite II The Sixth United Nations Conggres on The Prevention of Crime and The Treatment of*

*Offenders* ( 1980 di Caracas- Venezuela), yang antara lain menyatakan sebagai berikut:

*"in a resolution on alternatives to imprisonment, the Congress recommended that Member States examine their legislation with a view towards removing legal obstacles to utilizing alternatives to imprisonment in appropriate cases in countries where such obstacles exist and encouraged wider community participation in the implementation of alternatives to imprisonment and in activities aimed at the rehabilitation of offenders"*<sup>10</sup>

2. Rekomendasi yang di usulkan dalam *Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* (1985 di Milan, Italia), yang antara lain menyatakan sebagai berikut :

*"In resolution on Reduction of the prison population, alternatives to imprisonment and social integration of offenders, the congress recommended that Member States Intensify the search for credible non custodial sanctions which would serve to achieve a reduction in the program population"*<sup>11</sup>

3. Didalam SMR-JJ (*The Beijing Rules*) di nyatakan antara lain :

Rule 19.1

*The placement of juveniles in an institution shall always be a disposition of last resort and for the minimum necessary period*<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Dokumen Sixth United Nations Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, A/Conf.87/14/Rev1, Caracas Declaration, Caracas Venezuela, 25 Agustus - 5 September 1980, Hal 81

<sup>11</sup> Dokumen, Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, A/CONF.121/22/Rev.1, Milan-Italia, 26 Agustus - 6 September 1985, hal.84

<sup>12</sup> United Nation Standart Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice, Departement of Public Information , New York 1986

Barda Nawawi Arief mengemukakan tentang isi didalam Rule 19.1 SMR-JJ (Beijing Rules)

"Penempatan seorang anak dalam lembaga harus selalu ditetapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu minimal yang diperlukan."<sup>13</sup>

4. Didalam Resolusi PBB 45/113 tentang "UN Rules for the protection of juveniles Deprived of their Liberty" antara lain dinyatakan :

- 1.1 Pidana Penjara harus di gunakan sebagai upaya terakhir (*"Imprisonment should be used as a last resort"*)
- 1.2 Perampasan kemerdekaan anak harus ditetapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu minimal yang diperlukan serta di batasi untuk kasus-kasus yang luar biasa atau eksepsional (*"Deprivation of the liberty of a juvenile should be a disposition of last resort and for the minimum necessary period and should be limited to exceptional cases"*)<sup>14</sup>

Dari beberapa rekomendasi di atas yang pada intinya sama yaitu menghimbau kepada negara-negara peserta untuk dapat merumuskan ke dalam hukum nasional mereka jenis sanksi selain penjara sebagai alternatif pidana penjara untuk pidana yang dianggap tidak terlalu serius atau membahayakan dengan maksud untuk merehabilitasi pelaku tindak pidana dan menghindarkan pelaku tindak pidana tersebut dari dampak negatif yang ditimbulkan dari pidana penjara.

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, **Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana**, Citra Aditiya, Bandung, 1998, hal 164

<sup>14</sup> ibid 166

5. Adapun dalam Konsep KUHP 1999/2000, Pasal 109 jenis sanksi yang khusus dijatuhkan kepada anak antara lain;

A. Pidana pokok bagi anak yang terdiri atas ;

1. Pidana nominal

(a) pidana peringatan

(b) pidana teguran keras

2. Pidana dengan syarat

(a) pidana pembinaan di luar lembaga

(b) pidana kerja sosial

(c) pidana pengawasan

3. Pidana denda

4. Pidana Pembatasan kebebasan

(a) pidana pembinaan didalam lembaga

(b) pidana penjara

(c) pidana tutupan.

B. Pidana tambahan antara lain :

(1) Perampasan barang-barang tertentu dan atau tagihan

(2) Pembayaran ganti kerugian;atau

(3) pemenuhan kewajiban adat

C. Tindakan

(1) Mengembalikan kepada orang tua, orang tua Asuh  
atau wali

- (2) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan latihan kerja
- (3) Menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak pada bidang pendidikan dan latihan kerja<sup>15</sup>

Dilihat dari urutan jenis pidana dalam konsep diatas, tersirat isi konsep untuk menghindari sejauh mungkin jenis pidana penjara, hal ini terlihat bahwa pidana penjara ditemaptkan dalam bagian ahir dari pidana pokok

Kebijakan hukum pidana khususnya dalam hal merumuskan atau memformulasikan sanksi pidana anak merupakan kebijakan yang paling strategis dalam pengoprasionalisasikan hukum pidana, karena apabila tahap kebijakan legislatif ini terjadi kesalahan atau kelemahan maka dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap berikutnya yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Dari uraian tersebut di atas, permasalahan di dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>15</sup> Direktorat Perundang-undangan Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Perundang-undangan, **Rancangan KUHP 1999-2000**, hal 47

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok-pokok permasalahan seperti telah di kemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui kebijakan sanksi pidana dalam undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak
2. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap sanksi pidana anak di dalam perundang-undangan untuk masa yang akan datang

### **D. MANFAAT HASIL PENELITIAN**

Hasil-hasil dari penelitian ini di harapkan dapat berguna untuk :

1. Menambah informasi yang lebih konkret bagi usaha pembaharuan hukum pidana, khususnya di bidang kebijakan hukum pidana mengenai sanksi pidana anak.
2. Melengkapi bahan-bahan penelitian dan studi mengenai sanksi pidana yang di lakukan oleh anak.

## E. METODE PENELITIAN

### 1. Metode Pendekatan Permasalahan

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada metode, sistimatika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya.<sup>16</sup> Penelitian hukum dapat di bedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum normatif di lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data skunder dari di sebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer yaitu data yang di peroleh secara langsung dari masyarakat.<sup>17</sup>

Pendekatan terhadap hukum dengan menggunakan metode normatif di lakukan dengan cara mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat dan sering pula disebut sebagai penelitian hukum yang dokrinal. Pendekatan terhadap hukum sebagai suatu

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta : UI Press, Cetakan Ketiga, 1996, hal 43

<sup>17</sup> Ronny Haninjo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990,hal 9

institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistim kehidupan bermasyarakat yang sering terjadi perilaku anggota-anggota masyarakat yang mempola yang kemudian di sebut sebagai penelitian hukum empiris atau sosiologis.<sup>18</sup>

Berdasarkan permasalahan penelitian, di depan objek yang di teliti mengenai kebijakan formulasi hukum pidana khususnya mengenai “sanksi pidana anak” , maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, karena dalam penelitian ini data yang di pakai dan di teliti terutama adalah data sekunder atau data yang berasal dari bahan kepustakaan.

Selain itu di lengkapi pula penelitian ini dengan pendekatan “Yuridis empiris “ untuk memperoleh gambaran mengenai aplikasi kebijakan hukum pidana terhadap sanksi pidana anak.

## 2. Jenis Sumber Data

Penelitian ini di titik beratkan pada studi kepustakaan, sehingga data sekunder atau bahan pustaka lebih di utamakan dari pada data primer. Data Skunder dapat di bedakan menjadi bahan

---

<sup>18</sup> Ronny Hanintjo Soemitro, **Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif dengan Penelitian Hukum Empiris**, Semarang: Masalah-Masalah hukum Universitas Diponegoro No. 9 tahun 1991, hal 44



hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier<sup>19</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan adalah :

#### a. Studi Kepustakaan

Studi ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.<sup>20</sup> Data Kepustakaan ini berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain sumber

#### b. Studi Lapangan

Merupakan cara untuk memperoleh data pendukung guna melengkapi informasi yang diperlukan di dalam menjawab permasalahan penelitian, dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) terhadap berbagai aparat penegak hukum yang memahami permasalahan tentang pemicanaan terhadap anak.

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali, Jakarta, 1985, Hal 39

<sup>20</sup> Soejono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Ibid, Hal 98

#### 4. Analisis dan Penyajian Data

Analisa data adalah merupakan proses akhir dari suatu penelitian. Setelah masalah dirumuskan, data-data yang dapat di definisikan dan di klasifikasikan maka langkah selanjutnya adalah menganalisa dan menginterpretasikan.<sup>21</sup>

Penelitian ini bersifat analitis deskriptif kualitatif normatif yaitu menggambarkan menjelaskan serta menganalisis secara yuridis normatif data yang telah diperoleh. Penjelasan terhadap data yang di lakukan dengan menggunakan teori-teori dan norma-norma hukum yang ada, baik terhadap data kepustakaan maupun data yang di peroleh di lapangan. Sedangkan keseluruhan data yang di peroleh di sajikan secara kualitatif<sup>22</sup>, yaitu dalam bentuk uraian-uraian yang sistematis.

#### F. SISTEMATIKA PENULISAN

Setelah menguraikan Bab I sebagaimana yang tersebut diatas maka :

Bab II berisi Tinjauan pustaka yang berisi teori-teori, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan serta peraturan-peraturan yang relevan dengan pokok permasalahan yaitu gambaran umum tentang anak, latar belakang tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Teori pemidanaan.

<sup>21</sup> Winarno Surakmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Transito, 1985, hal 139

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, op. cit, hal 250

kebijakan hukum pidana terhadap sanksi pidana anak didalam perundang-undangan pada masa yang akan datang.

Bab IV berisi kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian serta saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. GAMBARAN UMUM MENGENAI ANAK

##### 1. Pengertian Anak dan Anak Nakal (kenakalan Anak)

Perlu di ketahui bahwa sebenarnya pengertian tentang manusia dan kemanusiaan merupakan faktor yang dominan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan perlindungan terhadap anak yang merupakan permasalahan kehidupan manusia juga.

Anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Hubungan tersebut menurut sejarah manusia berasal dari Adam dan Hawa dan dari kedua makhluk Tuhan ini lahirlah keturunan yang kemudian beranak-piariak menjadi kelompok-kelompok yang semakin membesar berpisah dan berpencar satu sama lain berupa suku dan kabilah dan bangsa-bangsa seperti sekarang ini, seperti yang di firmankan oleh Allah dalam Al Hujarat Ayat 13<sup>1</sup>

Pengertian anak menurut Paulus Hadisuprpto, biasanya di lakukan dengan mendasarkan pada tingkat usia, dalam arti tingkat usia berapakah seorang dapat dikategorikan sebagai anak. Disamping itu ada pula yang menggunakan pendekatan

---

<sup>1</sup> Sumaryanti, dalam Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986 hal 169

psihososial dalam usahanya merumuskan batasan terhadap anak ini <sup>2</sup>

Penentuan batasan anak dari aspek psikhososial menurut Singgih Gunarso perkembangan usia anak hingga dewasa dapat diklasifikasikan menjadi lima, yaitu (a) anak, seseorang yang berusia dibawah 12 tahun; (b) remaja dini, seseorang yang berusia 12-15 tahun ;(c) remaja penuh, seseorang anak yang berusia 15-17 tahun; (d) dewasa muda, seseorang yang berusia diatas 21 tahun dan (e) dewasa, seseorang yang berusia diatas 21 tahun. Masing-masing tingkatan usia mempunyai karakteristik kejiwaan sendiri-sendiri. <sup>3</sup>

Didalam UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pengertian anak adalah seseorang yang belum pernah mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

Konvensi Hak-hak anak pasal 1 memberikan definisi bahwa; "Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal."<sup>4</sup>

Pengertian anak oleh Irma Setyowati Soemitro, adalah seorang anak harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-

<sup>2</sup> Paulus Hadisuprpto, **Juvenile Delinquency, Pemahaman dan Penanggulangannya**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 hal 7.

<sup>3</sup> Ibid Paulus Hadi suprpto, **Juvenile Delinquency, Pemahaman dan Penanggulangannya**, hal.9-10

<sup>4</sup> Muyassorotussolichah, **Hak-hak Anak dan Penegakan Hukumnya (Among Edisi ke-6)** Yogyakarta; Lembaga Perlindungan Anak, 2002 hal 10

hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah maupun sosial.<sup>5</sup>

Pengertian anak dalam hukum pidana dapat di lihat dalam ketentuan undang-undang berikut ini.

Menurut UU No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, mengklasifikasikan anak dalam pengertian berikut ini :

1. Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama berumur 18 tahun.
2. Anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 tahun
3. Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh ketetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 tahun

Menurut UU No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, mengklasifikasikan pengertian anak kedalam hal-hal berikut;

1. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur delapan tahun tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin.

---

<sup>5</sup> Irma Setyawati Soemitro, **Aspek Hukum Perlindungan Anak**, Bumi Aksara, 1990, hal 16

2. Anak Nakal yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut

2.1 Anak yang melakukan tindak pidana

2.2 Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan

Bismar Siregar dan Abdul Hakim Garuda Nusantara, menyebutkan;

“ Hukum harus menitikberatkan pada hak anak pada umumnya dan dalam proses peradilan pidana pada khususnya akan disoroti sebagai *social study* dari anak-anak yang melakukan tindak pidana (delinkuensi anak ) sehingga dapat dikaji secara individual latar belakang dan sebab – sebab pelanggaran pidananya”.<sup>6</sup>

Anak dalam pengertian pidana, di utamakan terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dan dalam sistim hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggungjawaban, sebagaimana layaknya seorang subjek hukum yang normal.

Pengertian anak dalam lapangan hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku yang menyimpang (kejahatan dan

---

<sup>6</sup> Bismar Siregar, Abdul Hakim GN, **Hukum dan Hak-Hak Anak**, Rajawali, 1986, hlm26

pelanggaran pidana) untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang ahirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang lebih baik.

## **2. Batas Usia Anak Dalam Ketentuan Perundang-Undangan**

Batasan mengenai umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan suatu kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Adanya ketegasan dalam suatu peraturan undang-undang tentang hal tersebut akan menjadi suatu pegangan bagi para petugas dilapangan, agar tidak terjadi salah tangkap, salah tahanan, salah sidik, salah tuntutan maupun salah mengadili, karena menyangkut hak asasi seseorang.

Batasan usia ini biasanya dipergunakan sebagai tolok ukur sejauh mana anak bisa dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan kriminal.<sup>7</sup>

Menurut Hilman Hadikusuma, menarik garis batas antara belum dewasa dan sudah dewasa, tidak perlu dipermasalahkan, oleh karena pada kenyataannya orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum.<sup>8</sup> Dengan demikian, untuk menentukan batas usia baik minimum dan atau maksimum dari seorang anak ditentukan berdasarkan kepentingan hukum yang dipatuhi.

<sup>7</sup> *Encyclopedia Americana*, 1974, seri 16 hal 270

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Jakarta; Fajar Agung, 1987



Mengenai batas umur anak dalam Undang-undang No. 3 tahun 1997, terdapat dalam ketentuan Pasal 1 butir 1 dan Pasal 4 ayat (1), sebagai ketentuan tentang batas usia anak.

Pasal 1 butir 1:

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapanbelas) tahun dan belum pernah kawin.

Ketentuan ini hanya membatasi diri khususnya dalam perkara anak nakal saja, tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki atau perempuan dengan umur di batasi secara minimal dan maksimal, dengan pengecualian anak belum pernah kawin.

Pasal 4 ayat (1);

Batas umur anak nakal yang dapat diajukan kesidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Batasan umur dalam kedua ketentuan diatas, menunjukkan bahwa yang disebut anak yang dapat diperkarakan secara pidana dibatasi ketika berumur antara 8 tahun sampai dengan sebelum genap 18 tahun. Apabila dibawah umur 18 tahun tetapi sudah kawin, harus dianggap sudah dewasa bukan sebagai kategori anak lagi.

Adanya ketentuan mengenai batas usia minimal anak dalam Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan

Anak sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh dokumen internasional. Khususnya mengenai batas usia minimal pertanggungjawaban pidana (*the minimum age of criminal responsibility*), yaitu sekurang-kurangnya 12 tahun. Ketentuan demikian menurut pendapat kami sudah memadai dan sudah sesuai dengan Rule 4.1 SMR-JJ (*"The Beijing Rules"*) yang menyarankan batas usia yang tidak terlalu rendah. Konsep KUHP Baru menentukan batas usia minimal 12 tahun untuk dapat di pertanggungjawabkan (Pasal 93 Konsep 1993) <sup>9</sup>. Didalam Konsep KUHP 2000 mengemukakan bahwa pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan Belas ) tahun yang melakukan tindak pidana

### **3. Hak-Hak dan Perlindungan Anak dalam Ketentuan Perundang-Undangan**

#### **1. Hak-Hak Anak dalam Ketentuan Perundang-undangan**

Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak pada 1990 berdasarkan Keputusan Presiden No. 36/ 1990 tertanggal 25 Agustus 1990. Sesuai dengan ketentuan Pasal 49 (2), maka Konvensi Hak Anak dinyatakan berlaku di Indonesia sejak 5 Oktober 1990. Meski demikian, kesungguhan

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek dan Perkembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya , Bandung, 1998, Hal 162

Indonesia untuk memenuhi hak-hak anak sebagaimana diatur didalam Konvensi sejak awal meragukan<sup>10</sup>

Di dalam Konvensi Hak Anak disebutkan bahwa anak mempunyai hak untuk mendapatkan :

1. Kelangsungan hidup dan berkembang
2. Nama
3. Kewarganegaraan
4. Identitas
5. Standart Hidup yang baik
6. Standart kesihatan yang Paling tinggi
7. Perlindungan Khusus Konflik Bersenjata
8. Perlindungan khusus jika mengalami konflik hukum
9. Perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak.
10. Perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi dalam penyalahgunaan obat-obatan
11. Perlindungan hukum jika mengalami eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual
12. Perlindungan khusus dari penculikan, penjualan dan perdagangan anak-anak
13. Perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi sebagai anggota kelompok minoritas atau masyarakat adat
14. Hidup dengan orang tua
15. Tetap berhubungan dengan orang tua apabila dipisahkan dari salah satu orang tua
16. Pelatihan ketrampilan
17. Berekreasi
18. Bermain
19. Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan seni dan kebudayaan
20. Perlindungan khusus dalam situasi yang genting
21. Perlindungan khusus sebagai pengungsi
22. Bebas beragama
23. Bebas berserikat
24. Bebas berkumpul
25. Informasi dari berbagai sumber
26. Perlindungan pribadi
27. Perlindungan dari siksaan

<sup>10</sup> Mohammad Fuad, "Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia", dalam Hamif Suranto(ed), *Jurnalisme Anak Pinggiran*, Jakarta ; Kelompok Kerja Anak Pinggiran, 1999 hal.78-79  
Periksa pula Candra Gautama, *Konvensi Hak Anak Panduan bagi Jurnalis* Jakarta Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), 2000, hal 37

28. Perlindungan dari perlakuan yang kejam, hukuman dan perlakuan yang tidak manusiawi
29. Perlindungan dari penangkapan yang sewenang-wenang
30. Perlindungan dari perampasan kebebasan
31. Pendidikan dasar secara cuma-cuma<sup>11</sup>

Dalam membicarakan anak sebagaimana yang dikemukakan J.J. Rousseau, seyogyanya kita lebih banyak membicarakan tentang hak-haknya ketimbang kewajibannya<sup>12</sup>

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, di dasarkan pada pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan, karena golongan anak-anak yang dapat mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

## 2. Perlindungan Hukum Bagi Anak

Sebagaimana kita pahami, bahwa seorang anak yang karena sifat dan keadaan yang melekat padanya, memerlukan perlakuan dan perlindungan khusus, terutama terhadap perbuatan-perbuatan (tindakan-tindakan) yang pada hakekatnya dapat merugikan

<sup>11</sup> Candra Gautama, "Konvensi Hak Anak Panduan bagi Jurnalis" op cit hal 69-70

<sup>12</sup> Lela B. Costin, *The Child and The Court : Child Welfare, Policies and Practice*, McGraw-Hill New York Book Company, 1972, hal 91  
Periksa pula Abdul Wahid Masru, *Kedudukan dan Peranan lembaga Pemasyarakatan Anak Dalam Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Anak*, BPHN, Departemen Hukum dan Perundang-undangan R.I., 2000

perkembangan anak itu sendiri maupun masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Sri Widoyati Wiratmo Soekito.<sup>13</sup> Walaupun secara sekilas seseorang dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, namun karena kualitasnya sebagai anak maka pada umumnya keadaan sekitar yang menimpa pada dirinya akan lebih besar pengaruhnya dalam menentukan sikapnya dari pada nilai pribadinya.

Anak-anak yang melakukan kenakalan atau tindak pidana memerlukan suatu penanganan tersendiri, yang amat berbeda dengan pelaku kejahatan dewasa. Mengenai perlunya penanganan khusus (peradilan anak) ditegaskan oleh Mason P. Thomas, sebagai berikut:

*"Legislature have passed laws to establish a separate court system for children under certain ages because youths should not held accountable under the same standards as adult and because there may be a better chance of reform or rehabilitation with young people"*  
 Penyelenggaraan proses peradilan anak sebagai suatu sistem, harus berorientasi pada kepentingan hari depan anak, karena anak nakal pada ahirnya harus diperbaiki kembali sifat, tingkah laku, kondisi-kondisi jiwa dan alam pikirannya. Untuk itu yang diperlukan dalam penanganan masalah tersebut adalah mengembalikan keseimbangan

<sup>13</sup> Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Dokumen Dasar Sistematika Rancangan UU Tentang Peradilan Anak*, Lokakarya Tentang Peradilan Anak, Binacipta, Bandung, 1979, hal 69

jiwa anak. Mengembalikan kesadaran dan ketaatan anak pada aturan hukum dan tata nilai yang berlaku adalah berbeda dengan cara yang harus dilakukan terhadap orang dewasa (pelaku). Oleh sebab itu wajarlah apabila diperlukan pendekatan khusus dalam menangani masalah hukum dalam proses peradilan anak, seperti yang sering terungkap di dalam berbagai pernyataan, antara lain:

1. Anak yang melakukan kenakalan (*Juvenile Offender*) janganlah dipandang sebagai seorang penjahat (criminal), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang.
2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif edukatif dan pendekatan kejiwaan atau psikologis yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental dari penurunan semangat (*discouragement*) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan dan kemandirian anak dalam arti yang wajar.<sup>14</sup>

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas.<sup>15</sup>

Didalam instrumen-instrumen internasional yang diarahkan untuk melindungi hal-hak anak bermasalah, yaitu

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief dalam *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan*, Bunga Rampai Hukum Pidana, op. cit, hal 115

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Op, cit, hal 153

anak-anak yang berperilaku bertentangan dengan norma hukum (pidana), telah dimulai semenjak tahun 1924 (Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak ) kemudian Deklarasi Hak Anak Tahun 1958 dan berbagai Konggres PBB tentang "Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelaku " yang ke-I sampai IX

Pada konggres PBB tentang "Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelaku" ke IX yang diselenggarakan pada tanggal 29 April-8 Mei 1995 di Kairo-Mesir, dalam draft Resolusi No. A/CON/ 169/L. 5 termasuk tiga instrumen yang dianggap penting untuk diperhatikan dalam pembicaraan tentang perlindungan hak-hak anak bermasalah, yaitu:

1. *UNITED NATIONS GUIDELINES FOR THE PREVENTION OF JUVENILE DELINQUENCY*  
( *THE RIYADH GUIDELINES* )

Instrumen internasional ini tercantum dalam Resolusi PBB 45/112 tanggal 14 Desember 1990, yang terdiri dari 66 butir sebagai pedoman dalam kerangka pencegahan "*Juvenile delinquency*" dan "*Youth Crimes*"

Adapun isi yang tertuang didalam resolusi tersebut, secara ringkas adalah sebagai berikut :

- a. Pencegahan Juvenile Delinquency merupakan bagian penting pencegahan kejahatan pada umumnya didalam masyarakat;
- b. Pengembangan sikap non-kriminogen dikalangan anak dan dimasyarakat perlu dilakuakn, dengan cara mendayagunakan undang-undang, aktifitas sosial yang bermanfaat, meningkatkan pendekatan manusiawi terhadap segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk memperhatikan dan memperlakukan anak dan remaja secara manusiawi;

- c. Mengusahakan terjaminnya perkembangan usia muda secara harmonis, demi terlangsungnya pertumbuhan personalitas anak sejak usia dini, anak-anak remaja tidak harus dijadikan obyek pengawasan dan sosialisasi, dalam hal ini termasuk jugapemahaman bahwa anak-anak remaja yang melakukan perbuatan pelanggaran ringan tidak harus dipakai dengan pengkriminalisasi dan penghukuman
- d. Penyusunan kebijakan yang dilandaskan atas hasil-hasil kajian yang sistimatis dan menjabarkan menjadi tindakan-tindakan yang kondusif dalam usaha-usaha pencegahan *juvenile delinquency*. Kebijakan itu hendaknya tersusun dalam suatu program, dimana generasi muda dilibatkan didalamnya (agar timbul *self respect* di kalangan mereka). Program itu mengatur tentang mekanisme, pengkoordinasian lembaga pemerintah maupun non pemerintah.
- e. Kebijakan yang telah tersusun hendaknya didalamnya terkandung rencana dan program-program strategis dalam rangka penanggulangan *juvenile delinquency* baik melalui Sisti Peradilan Anak maupun tidak lewat Sistim Peradilan Anak. Penjara hendaknya ditempatkan sebagai usaha terakhir dan itupun hanya untuk jangka pendek.
- f. Kebijakan itu selanjutnya perlu disosialisasikan dan diintegrasikan melalui keluarga, masyarakat, peer group, sekolah dan tempat-tempat pelatihan vokasional, organisasi-organisasi sukarela dan media massa
- g. Perundang-undangan yang disusun untuk mendukung kebijakan tersebut hendaknya terkandung aturan-aturan pencegahan viktimisasi, penyalahgunaan, pemerasan, pemanfaatan anak dalam tindak kejahatan, penyalahgunaan dan peredaran obat bius dan ada ketentuan tentang kriteria-kriteria penempatan anak dalam penjara, hukuman rumah atau hukuman sekolahan
- h. Dalam kaitan dengan penafsiran dan pengimpletasian Resolusi ini, hendaknya UN Declaration of Human Rights; the Internasional Covenant on Civil and Political Rights; the Declaration on the Right of of the Child and the Convention on the Right of the Child serta U Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, dijadikan kerangka acuan pada satu pihak, dan kondisi sosial, ekonomi, budaya negara anggota pada lain pihak.
- i. Erat dengan penafsiran dan pengimpletasian ini dalam kehidupan masyarakat, perlu adanya pelatihan-pelatihan terhadap aparat penegak hukum sehingga memahami betul dunia anak dan remaja, disamping itu



dibentuk pula lembaga ombusman yang independent untuk mengawasi pengimplementasian resolusi ini <sup>16</sup>

2. *UNITED NATIONS STANDARD MINIMUM RULES FOR THE ADMINISTRATION OF JUVENILE JUSTICE (BEIJING RULES)*

Instrument Internasional ini disetujui pada tanggal 6 September 1985 sebagai hasil dari pertemuan di Beijing, China pada tanggal 14-18 Mei 1984, yang kemudian dipresentasikan oleh Dewan Ecosoc PBB dalam kongres PBB ke-VII di Milan- Italia pada bulan Agustus-September 1985. Beijing Rules ini kemudian dijadikan Resolusi PBB pada tanggal 29 November 1985 dalam Resolusi 40/33

*UN Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenilles Justice* (selanjutnya disingkat SMR-JJ) ini secara keseluruhan terdiri dari 6 bagian: Bagian I *General Principles* terdiri dari 9 sub bagian ; Bagian II *investegasi dan Penuntutan* terdiri dari 4 sub-bagian ; Bagian II *Adjudication and Dispotion* terdiri dari 9 sub-bagian; Bagian IV *Pembinaan Luar Lembaga* terdiri dari 3 sub-bagian; Bagian V *Pembinaan Dalam Lembaga* terdiri dari 4 sub-bagian; dan Bagian VI *Penelitian, Perencanaan dan Evolusi* terdiri dari 1 sub-bagian.

<sup>16</sup> Paulus Hadisuprpto dalam Romli Atmasasmita dan Team, *Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju Bandung, 1997, hal 103-104  
Periksa pula Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Deliquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, op. cit, 105-106

Adapun isi di dalam keenam bagian Resolusi PBB ini, terkandung dalam uraian-uraian sebagai berikut:

- (1). Kebijakan Sosial yang komprehensif dalam rangka terwujudnya Kesejahteraan Anak, perlu dilakukan, dengan tersusunnya Kebijakan Sosial yang demikian pada gilirannya akan mengurangi keterlibatan dan campur tangan Sistem Peradilan Anak. Pemberian perhatian dan pengambilan tindakan terhadap anak dan remaja sebelum terlibat pelaku penyimpangan dan kejahatan perlu dilakukan. Kebijakan Dasar yang terkandung dalam Resolusi ini ialah anak terselamatkan dari penerapan Resolusi ini
- (2). *Juvenile* adalah anak remaja yang menurut sistem hukum yang berlaku, telah melakukan kejahatan yang perlakuannya harus berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa, *offence* adalah perilaku yang dapat dipidana menurut sistem hukum yang berlaku. *Juvenile Offender* adalah anak atau remaja yang telah melanggar atau diketahui melakukan pelanggaran hukum. Batasan usia tentang anak ditetapkan secara fleksibel yaitu antara 7-18 tahun, disesuaikan dengan sistem hukum nasional dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya setempat.
- (3). Pengkategorisasian jenis penyimpangan dan kejahatan anak hendaknya dirumuskan secara lebih luas dari pada jenis-jenis kejahatan untuk orang dewasa.
- (4). Usia pertanggungjawaban pidana merupakan faktor penting, penentuannya diterapkan dengan mengacu pada kesesuaian antara perkembangan dan kematangan moral dan kejiwaan anak. Yang penting penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak jangan terlalu rendah atau sama sekali tidak dirumuskan.
- (5). Peradilan anak sebagai bagian integral dari Kebijakan Keadilan Sosial Anak, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak dengan berpegang teguh pada asas proporsionalitas. Prinsip pencerminan keadilan sosial anak ini selanjutnya tersirat pula dari berbagai ketentuan disetiap tahapan proses peradilan anak. Tuntutan tetap diperhatikan anak dalam proses peradilan anak dan pemberian kesempatan diskresi seluas-luasnya pada setiap tingkatan pemeriksaan merupakan cerminan dari prinsip tersebut. Disamping itu perlu diperhatikannya hak-hak anak dalam Kontak Awal anak dengan penegak hukum (polisi) dan penggunaan sarana yang berupa *Diversion*. Sementara pada fase Ajudikasi dan Disposisi, dituntut agar ada

- kejelasan mengenai pihak-pihak yang diberi wewenang dalam proses adjudikasi dan disposisi, pemberian kesempatan kepada orang tua dan penasihat hukum untuk terlibat selama dalam proses adjudikasi dan disposisi, penyediaan laporan sosial anak dalam lembaga Koreksi.
- (6) Prinsip yang perlu diperhatikan dalam kaitan disposisi ini adalah bahwa penempatan anak dalam lembaga Koreksi harus ditempatkan sebagai usaha terakhir dan itupun hanya jangka pendek.
  - (7) Pembinaan anak dapat dilakukan diluar Lembaga atau di dalam Lembaga hendaknya melibatkan lembaga-lembaga seperti *parole*, *probation* dan lembaga-lembaga kesejahteraan anak baik lembaga pemerintah maupun non- pemerintah yang kesemuanya diarahkan pada usaha-usaha rehabilitasi anak. Sementara pembinaan anak dalam Lembaga, hendaknya dipedomani prinsip individualisasi perlakuan, artinya dalam pembinaan hendaknya memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya anak yang bersangkutan. Disamping itu perlu adanya dukungan sumber dana manusia dan fasilitas yang mendukung terciptanya usaha pembinaan anak dalam lembaga. Satu hal yang penting diperhatikan dalam kaitan ini ialah pemberian kesempatan seluas mungkin bagi orang tua dan penasihat hukum untuk tetap terlibat dalam pembinaan anak.
  - (8) Pelepasan bersyarat dalam konteks pembinaan anak merupakan hal yang perlu diprioritaskan, disamping perlunya dipikirkan dibentuknya tempat pembinaan anak yang bersifat semi Lembaga<sup>17</sup>

### 3. UNITED NATIONS RULES FOR THE PROTECTION OF JUVENILE DEPRIVED OF THEIR LIBERTY

Instrumen Internasional ini termuat dalam Resolusi PBB 45/ 113 yang berlaku tanggal 14 Desember 1990. Pada intinya ketentuan ini merupakan pemantapan standart minimum bagi perlindungan anak dari semua bentuk

<sup>17</sup> Paulus Hadisuprpto dalam Romli Atmasasmita dan Team, *Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju Bandung, 1997, hal 110-112  
 Periksa pula Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, op. cit, 113-115

perampasan kemerdekaan berlandaskan hak-hak asasi manusia dan menghindarkan anak dari efek samping segala bentuk penahanan demi tercapainya pengintegrasiaan anak ke dalam masyarakat.

Resolusi PBB 45/113 ini secara garis besar memuat :

- (1) Resolusi ini merupakan wujud pemantapan Standart Minimum perlindungan anak yang dirampas kemerdekaannya, sekaligus juga diperuntukkan sebagai bahan acuan para penegak hukum yang berurusan dengan peradilan anak. Oleh karenanya Resolusi ini hendaknya diterapkan secara utuh, tanpa diskriminasi dan tetap berpegang pada asas penghormatan konsep moralitas anak. Atas dasar itu, maka Resolusi ini hendaknya diwujudkan dikalangan negara anggota dalam wujud undang-undang yang diperlakukan untuk penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan anak.
- (2) Pengimpletasian Resolusi ini hendaknya tetap mengacu pada *Beijing Rules*, konsisten dengan ketentuan *Beijing Rules*, maka perampasan kemerdekaan anak hendaknya ditempatkan sebagai usaha terakhir dan itupun hanya untuk jangka pendek.
- (3) Anak menurut resolusi ini ialah seseorang yang berusia 18 tahun. Batas usia minimal bagi seorang anak yang dapat dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan ditetapkan atau ditentukan oleh undang-undang. Sementara yang dimaksudkan dengan perampasan kemerdekaan ialah setiap bentuk penahanan dan penempatan anak dalam lembaga Koreksi dimana anak tidak boleh meninggalkan tempat itu atas kehendak sendiri, atas dasar perintah lembaga pengadilan, administrative atau lembaga publik lainnya.
- (4) Perampasan kemerdekaan atas diri anak, hendaknya tetap memperhatikan penghormatan hak-hak asasi anak, yang diwujudkan dalam bentuk penyediaan tempat kegiatan yang bermanfaat demi peningkatan kesehatan dan munculnya *self respect* pada diri si anak, dalam rangka mempersiapkan anak berintegrasi di masyarakat
- (5) Dalam hal perampasan kemerdekaan anak sematamata demi penundaan sidang sedapat mungkin

harus dihindarkan. Kalaupun terpaksa, maka pada satu pihak anak tetap harus dianggap tidak bersalah dan ditempatkan terpisah dengan anak pelaku kejahatan, didampingi penasihat hukum secara gratis dan tetap dijamin *privacy*-nya. Pada lain pihak petugas harus sesegera mungkin melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan kasusnya, sehingga anak tidak berlarut-larut dalam tahanan.

- (6) Record yang berisi laporan tentang anak harus dibuat dirahasiakan dan ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah ditemukan. Dalam hal ada laporan yang salah, maka anak diberi kesempatan untuk melakukan koreksi. Setelah anak bebas, maka catatan itu harus disegel dan jangka waktu tertentu harus dihilangkan atau dihapus.
- (7) Catatan sekitar latar belakang kejiwaan dan sosial anak dan pengidentifikasian faktor-faktor yang berpengaruh pada perilaku anak harus segera dilakukan, dalam rangka penentuan tempat penahanannya, jenis dan tingkat perlakuan, serta penyusunan program yang sesuai dengan kondisi si anak.
- (8) Program-program yang ada harus memperhatikan kemungkinannya pengintegrasian masyarakat. Bila anak berusia sekolah, maka perlu diberi kesempatan baginya untuk menikmati pendidikan, pelatihan vokasional, pemberian waktu untuk rekreasi di udara terbuka perlu selalu diprioritaskan.
- (9) Laporan tentang kesehatan fisik dan mental anak hendaknya selalu dibuat dan disampaikan kepada orang tua. Pada kesempatan tertentu anak hendaknya tetap diberi kesempatan untuk menjenguk rumah, keluarganya, teman-teman dekatnya, kesemuanya untuk mendukung usaha-usaha pengintegrasian anak dalam masyarakat.
- (10) Penggunaan alat-alat paksaan fisik untuk tujuan apapun dilarang. Petugas dilarang menyandang atau menggunakan senjata.
- (11) Semua bentuk tindakan pendisiplinan harus secara tegas dinyatakan dalam aturan Tata Tertib Lembaga, yang mencakup kategori pelaku yang dapat dikenakan tindakan disiplin, tipe dan jangka waktu pendisiplinan, pihak yang berwenang menerapkan tindakan pendisiplinan dan penarikan sanksi pendisiplinan.
- (12) Perlunya ada petugas atau lembaga independent yang diberi kuasa kekuasaan untuk dengan bebas

tanpa memberitahu dahulu untuk masuk ke dalam Lembaga, bertemu dengan petugas Lembaga Koreksi, dengan anak dan memeriksa fasilitas yang ada dalam lembaga.<sup>18</sup>

## **B. TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK dan LATAR BELAKANGNYA**

### **1. Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak dan upaya pengulangannya**

Perkembangan masyarakat sebagai akibat proses modernisasi serta pengaruh globalisasi mendorong setiap orang untuk mengantisipasi segala perkembangan tersebut secara rasional dan proporsional, sehingga diharapkan setiap masalah yang timbul dalam masyarakat dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Demikian pula apabila kita telaah tentang suatu Sistem Hukum Pidana, maka diharapkan pembentukan dan pelaksanaan penegakan hukum pidana harus dapat mengantisipasi perkembangan masyarakat tersebut, agar dapat memenuhi kebutuhan serta dapat memecahkan atau menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat.

Perubahan yang terjadi akibat perkembangan didalam masyarakat akan mengakibatkan perubahan nilai yang oleh Oemar Seno Adji dijelaskan sebagai berikut:

<sup>18</sup> Paulus Hadisuprpto dalam Romli Atmasasmita dan Team, *Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju Bandung, 1997, hal 115-112  
Periksa pula Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency* (Pemahaman dan Penanggulangannya), op. cit, 119-121

"Perubahan atau pembaharuan dalam perundang-undangan di dunia adalah sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan untuk mengadakan ... kriminalisasi perbuatan...dekriminalisasi".<sup>19</sup>

Kriminalisasi<sup>20</sup> di maksudkan sebagai suatu proses yang menjadikan suatu perbuatan yang tadinya bukan merupakan tindak pidana karena belum diatur di dalam undang-undang hukum pidana, kemudian karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat bahkan dapat membahayakan kehidupan manusia, maka dirumuskan di dalam undang-undang hukum pidana dan diancam dengan pidana, sehingga perbuatan dimaksud dinyatakan sebagai tindak pidana.

Selanjutnya pembahasan hukum pidana tidak terlepas dari ketiga masalah utama yaitu tentang perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan pidana yang diancam terhadap pelanggaran larangan itu. Masalah pokok yang pertama berkaitan dengan perbuatan yang dilarang, menyangkut persoalan kriminalisasi dan dekriminalisasi dengan syarat-syarat yang terkandung didalamnya. Masalah pokok yang kedua mengandung

<sup>19</sup> Oemar Seno Adji, *Herzeining, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Erlangga, Jakarta; hal. 226

<sup>20</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, Hal 31-32 : Dengan kriminalisasi dimaksudkan proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana

peraturan yang sangat rumit yang menyangkut orang atau subyek hukum pidana dalam pertanggungjawaban pidana. Demikian pula tentang masalah pidana yang diancamkan terhadap pelanggar larangan tertentu.<sup>21</sup>

Sehubungan dengan kriminalisasi suatu perbuatan, Sudarto mengemukakan beberapa kriteria yaitu bahwa perbuatan itu tidak dikehendaki dengan ukuran bahwa perbuatan itu merugikan atau mendatangkan korban. Selain itu harus pula memperhatikan "*cost benefit principle*", artinya kriminalisasi sesuatu perbuatan harus seimbang dengan hasilnya, jangan sampai aparat penegak hukum "*over belast*" memikul beban yang terlalu berat sehingga peraturan itu tidak efektif lagi.<sup>22</sup>

Tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, merupakan perilaku yang menyimpang (*deviance*), yaitu perbuatan yang bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat,

<sup>21</sup> Muladi, **Lembaga Pidana Berayarat**, Alumni, Bandung, Hal 16-17

<sup>22</sup> Sudarto, **Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana**, Sinar Baru, Bandung, 1983, Hal 100-101  
Menurut Bassiouni yang dikutip Barda Nawawi Arief ( dalam Muladi dan Barda Nawawi A., **Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana**, Alumni Bandung, 1992, hal 161-162 : Keputusan melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada kebijakan yang mempertimbangkan bermacam faktor termasuk:  
a. *the proportionality of the means used in relationship to the outcome obtained*,  
b. *the cost analysis of the outcome in relationship to the objectives sought*  
c. *the appraisal of the objectives sought in relationship to other priorities in the allocation of resources of human power*  
d. *the social impact of criminalization and decriminalization in terms of its secondary effects.*



kelompok atau kampung tempat terjadinya perilaku tersebut<sup>23</sup> yang berupa kejahatan atau pelanggaran.

Tindak pidana semakin hari semakin berkembang, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitasnya. Perkembangan kualitas tindak pidana, merupakan suatu ancaman yang nyata yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan gangguan terhadap ketertiban, baik dalam kehidupan individu maupun masyarakat dari suatu negara, bahkan masyarakat internasional.

Sehubungan dengan meningkatnya tindak pidana tersebut, maka perlu kiranya pemerintah mengambil tindakan untuk menanggulangnya. Seperti di ketahui bahwa salah satu bentuk dari upaya penanggulangan tindak pidana tersebut, yaitu apa yang dinamakan dengan kebijakan kriminal atau politik kriminal (*"criminal Policy"*)

Berbicara mengenai masalah kebijakan, pada hakikatnya kebijakan hukum pidana <sup>24</sup>(*penal policy*) tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan kriminal<sup>25</sup>(*criminal policy*), yaitu usaha

<sup>23</sup> Peter Aggleton, **Deviance**, Tavstock Publication, London, 1987, Hal.7

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bandung, 1996, Hal 28: Kebijakan atau politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan. Menurut Marc Ancel (ibid, hal 23), *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada ahirnya dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

<sup>25</sup> Sudarto, **Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana**, op cit, hal 43

Menurut G.P. Hoefnagels, suatu politik kriminal harus rasional, kalau tidak demikian tidak sesuai dengan definisinya sebagai *"a rational total of the responses to"*

rasional untuk menanggulangi kejahatan. Mengenai konsep rationalitas di bidang politik kriminal, Karl O Cristian mengemukakan; *"The carateristic of a rational criminal policy is nothing more than the application of rational methods"*<sup>26</sup>

Sudarto mengemukakan bahwa kebijakan kriminal dalam arti sempit adalah Keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana<sup>27</sup>. Selanjutnya, definisi kebijakan kriminal yang lebih luas menurut beliau adalah, keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk diantaranya cara kerja dari pengadilan dan polisi<sup>28</sup>

Disamping definisi yang sempit dan yang lebih luas seperti tersebut diatas, ada definisi yang paling luas yang dikemukakan oleh Jorgen Jepsen. Menurut beliau, kebijakan kriminal adalah Keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat<sup>29</sup>

Setelah memahami pengertian dan istilah kebijakan kriminal, maka permasalahan lebih lanjut yang perlu diketahui ialah mengenai bagaimana cara pelaksanaannya. Menurut Barda Nawawi Arief, sebagaimana yang disimpulkan dari

---

*crime*" (Muladi dan Barda nawawi A., **Teori-Teori dan Kebijakan Pidana**, opcit, Hal 163)

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, **Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana**, op cit, hal 94

<sup>27</sup> Sudarto, **Kapita Selekta Hukum Pidana**, Bandung : Alumni, 1986, Hal.113-114

<sup>28</sup> Sudarto, **Kapita Selekta Hukum Pidana**,Ibid, Hal 114

<sup>29</sup> Ibid

pendapat GP. Hoefnagels, bahwa pelaksanaan kebijakan kriminal itu pada pokoknya dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu jalur penal (hukum pidana) dan jalur non penal (bukan hukum pidana)<sup>30</sup>

Mengenai tujuan kebijakan kriminal dikemukakan dalam "summary report" dari 34<sup>th</sup> Internasional Training Course yang diselenggarakan UNAFEI di Tokyo Tahun 1973:

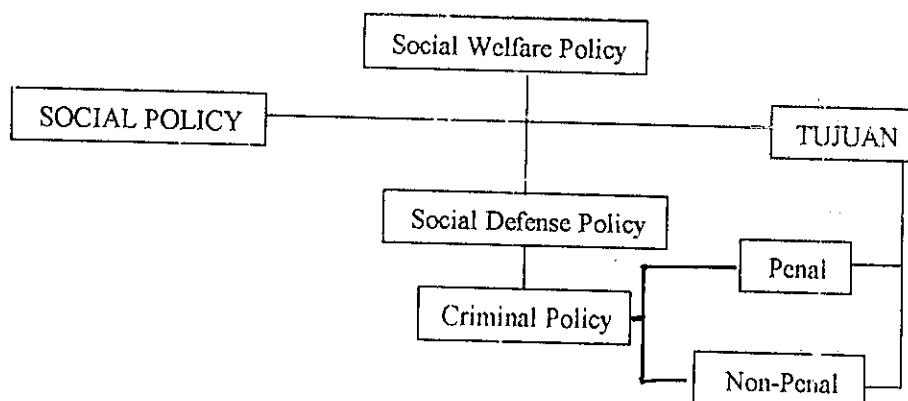
*Most of the group members agreed after discussion that protection of the society could be accepted as the final goal of criminal policy, although not the ultimate aim of society, which might perhaps be described by term like "happiness of the citizens", "a wholesome and cultural living", "social welfare" or "equality".<sup>31</sup>*

Kebijakan kriminal memiliki hubungan yang erat dengan kebijakan sosial sebab sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan, pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*), yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*). Keterkaitan hubungan itu dapat dilihat pada skema dibawah ini:<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, **Upaya Non Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan**, Makalah Seminar Kriminologi VI, Semarang: FH. UNDIP, 1991, hal 1-2

<sup>31</sup> Summary Report : dari 34<sup>th</sup> Internasional Training Course, Dalam Barda Nawawi A. , **Kebijakan Legislatif Dalam Menanggulangi Pidana Penjara**, Badan Penerbit Undip, Semarang , 1996, hal 31-32

<sup>32</sup> Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, opcit, hal. 3



Dari skema diatas, tergambar jelas adanya keterpaduan antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial ataupun keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan jalur penal dan non penal dalam upaya mencapai kesejahteraan kehidupan manusia. Dengan demikian keseluruhan kebijakan yang ditempuh didalam rangka menanggulangi kejahatan pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional

Mengenai kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), terdapat dua masalah sentral yang menurut Barda Nawawi Arief meliputi masalah penentuan:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar

Suatu perbuatan disebut sebagai tindak pidana (delik) apabila "perbuatan yang dilakukan oleh aturan hukum pidana

dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut".<sup>33</sup>

Menurut wujud atau sifatnya tindak pidana ini adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang anti sosial.<sup>34</sup>

Dikalangan para ahli di Indonesia, tidak ada pendapat yang seragam mengenai istilah "*Juvenile Delinquency*".<sup>35</sup> Ada yang menyebutnya sebagai Kenakalan Anak, Kenakalan Remaja, Kenakalan Pemuda, Delikueni Anak atau Tuna Sosial. Didalam istilah bahasa Indonesia belum didapatkan suatu terjemahan yang tepat tentang istilah "*Juvenile Delinquency*" ataupun belum ada suatu ketetapan Pemerintah mengenai hal

<sup>33</sup> Moeljatno, 1987, **Azas-azas Hukum Pidana**, Bina Akasara, Jakarta, Hal 54  
Menurut Roeslan Saleh, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang (Roeslan Saleh, **Tentang Tindak Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana**, Lokakarya Masalah Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, BPHN-Depkeh, 1982, Hal 3  
<sup>34</sup> Roeslan Saleh, **Perbuatan dan Pertanggung Jawab Pidana**, Aksara Baru, Jakarta, 1983, Hal 13

<sup>35</sup> Ruth Strong, **Fakta-Fakta Tentang Kejahatan Anak-Anak Nakal**, Yayasan Jakarta, 1972, Hal 3 menyatakan:

"- Di kalangan kepolisian, khususnya pihak biro Anak-anak telah menggunakan istilah "anak Tuna Laras"; sedangkan pihak Departemen social menggunakan istilah "Anak Tuna Sosial" yang pada hakikatnya mempunyai arti yang sama"

- Pada masyarakat Indonesia pada umumnya, nampaknya telah sepakat untuk menterjemahkan istilah "*Juvenile Delinquency*" dengan "Kenakalan Anak, dan dapat menghindari penggunaan istilah "Kejahatan Anak". Dalam hal ini, Lembaga Penyelidikan Pendidikan FKIP UNPAD, atas dasar pertimbangan yang sama telah menggunakan istilah "Anak Nakal", bukan "Anak Jahat" (Buletin Research Th. 1 No.2)"

ini, para ahli lebih cenderung menggunakan istilah "Kenakalan Anak" dari pada istilah "Kejahatan Anak".

Apa yang dimaksud tentang Kenakalan Anak-anak, dapat dilihat pada perumusan yang berikut:

a..Paul W. Tappan, yang memberikan pengertian "*Juvenile Delinquency*" sebagai berikut:

*"The Juvenile Delinquent is a person who has been adjudicated as such by a court of proper jurisdiction. Delinquency is any act, course of conduct or situation which might be brought before a court and adjudicated"*<sup>36</sup>

b.Maud A. Merrill, dalam bukunya "*Problem of Child Delinquency*"(Houston, 1974), seperti yang dikutip oleh Dr. Gerungan, merumuskan:

*"A child is classified as delinquent when his anti social tendencies appear to be so grave he became or ought to become the subject of official action"*<sup>37</sup>

c. Benyamin Fine merumuskan "*Juvenile Delinquency is, a pattern of behavior manifested by a youth below the age of eighteen that is contrary to the laws of the land and the accepted mores and that is anti social in character.*"

<sup>36</sup> Paul W Tappan, **Juvenile Delinquency**, Mc Graw Hill Book Coy Inc, New York-Toronto-London, 1949, Hal 23

Pendapat ini dapat ditemukan pula dalam Simanjuntak, **Latar Belakang Kenakalan Anak**, Alumni; Bandung, 1973 hal 70

Periksa pula dalam Y Bambang Mulyono, **Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya**, Kanisius :Jakarta, 1984 hal 22

<sup>37</sup> Maud A Merrill dalam Gerungan, **Psychologi Sosial Suatu Ringkasan**, Eresco, Bandung, 1996, Hal 199

*"Juvenile delinquency is a serious type of deviation contrary the law".<sup>38</sup>*

d. William G Kvaraceus berpendapat *"Most statues po nt out that delinquent behaviour constitutes a violation of the law or municipal ordinance by ayouth person under a certain age"*<sup>39</sup>

d.Fuad Hasan, yang mengartikan delikuensi sebagai perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bilamana dilakukan orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan <sup>40</sup>

e.B. Simanjuntak memberi tinjauan secara sosio cultural tentang arti juvenile delinquency. Suatu perbuatan itu disebut delikuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dimana dia hidup atau suatu pebuatan yang anti sosial dimana didalamnya terkandung unsure-unsur anti normatif<sup>41</sup>

Pada kesempatan yang lain B. Simanjuntak memberi batasan :

1. *Juvenile Delinquency* berarti perbuatan dan tingkah laku perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh anak (para *juvenile delinquents*)
2. *Juvenile Delinquent* itu adalah *offenders* yang terdiri dari "anak" (berumur dibawah 21 tahun- pubertas)

<sup>38</sup> Fine Benyamin, *1.000.000 Delinquents*, The New American Library, New York, 1957, hal 22

<sup>39</sup> Kvaraceus, Williams C, *Dynamic of Delincueny*, Charles E Merrils Books, Inc, Columbus, Ohio, 1966, hal 31

<sup>40</sup> Fuad Hasan, dalam B. Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Alurni, Bandung , 1984, Hal.46

<sup>41</sup> B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Sosialogi*, Transito,Bandung 1977, hal 25

yang termasuk yuridiksi pengadilan anak (*Juvenile Court*)<sup>42</sup>  
 g. Team Proyek "*Juvenile Delinquency*" FH Universitas

Padjajaran merumuskan:

"*Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela".

Jadi yang menjadi unsur-unsur *delinquency* itu adalah:

1. Adanya suatu tindakan atau perbuatan
  2. Tindakan atau perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan hukum
  3. Dan dirasakan serta ditafsirkan masyarakat dengan perbuatan yang tercela<sup>43</sup>
- h. Menurut Moelyono yang meninjau dari segi kriminologis,

mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

"*Juvenile Delinquency* dirumuskan dalam undang-undang tanpa suatu penilaian moral, untuk menandakan anak-anak muda (pelanggar hukum pidana atau norma sosial dan anak-anak terlantar) berhak dan wajib diberi bantuan khusus oleh masyarakat"<sup>44</sup>

- i. Menurut Drs Bimo Walgito merumuskan arti selengkapny dari "*Juvenile Delinquency*" yakni : Tiap perbuatan yang bila dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan, jadi perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh anak<sup>45</sup>

- j. Menurut Kartini Kartono, *Juvenile Delinquency* ialah perilaku jahat atau dursila atau kejahatan atau kenakalan anak-anak

<sup>42</sup> Fuad Hasan, dalam B. Simanjuntak, **Latar Belakang Kenakalan Remaja**, Ibid, hal 47

<sup>43</sup> Romli Atmasasmita, **Problem Kenakalan Anak-Anak atau Remaja**, Armico, Bandung, 1983, hal.21

<sup>44</sup> Saliyudin Sastrawijaya, **Beberapa Masalah tentang Kenakalan Remaja**, P.T. Karya Nusantara Bandung, 1977, hal 26

<sup>45</sup> Bimo Walgito, **Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)**, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1982 hal 2



dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.<sup>46</sup>

k.UU Pengadilan Anak ( UU No.3 tahun 1997 ) dalam pasal 1 ayat 2 merumuskan sebagai berikut:

“Anak Nakal adalah :

a.Anak yang melakukan tindak pidana

Walaupun Undang-undang Pengadilan Anak tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, akan tetapi dapat dipahami bahwa anak yang melakukan tindak pidana perbuatannya tidak terbatas kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan KUHP saja melainkan juga melanggar ketentuan diluar KUHP misalnya ketentuan pidana dalam Undang-undang Narkotika, Undang-undang Hak Cipta, Undang-undang Pengelolaan lingkungan hidup dan sebagainya

b.Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.” Dalam hal ini peraturan tersebut baik yang tertulis maupun tidak tertulis misalnya hukum adat atau aturan kesopanan dan kepantasan dalam masyarakat

<sup>46</sup> Kartini Kartono , Pathologi Sosial 2 Kenakalan Remaja, P.T. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2002, hal 6

## 2.LATAR BELAKANG TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK

Kejahatan anak atau yang disebut *delinkuensi* anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam titel-titel khusus dari bagian KUHP dan atau tata peraturan perundang-undangan.

Mengenai latar belakang tindak pidana anak, Wilson, menulis sebagai berikut: "*Because of the nature of the factor that seem to be associated with crime, many authorities doubt that crime can ever be brought under control. For example, sees crime as the result of three social factor :*

1. *the numbers of youth in society at given time*
2. *the disruptive effect of our society on the family unit*
3. *the opportunities for crime in our urbanized society.*<sup>47</sup>

Faktor-faktor sosial yang terdapat dalam masyarakat secara struktural akan memberikan penjelasan secara detail tentang masalah kejahatan anak sebagai pelaku, korban yang timbul dari kejahatan dan atau reaksi sosial dari kejahatan terhadap lingkungan sosial. *Delinkuensi* anak memberikan kekhususan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak sebagai sebab dari faktor-faktor kejahatan dan pelanggaran yang terdapat dalam diri si anak itu sendiri atau faktor lingkungan sosial tempat anak itu berada.

<sup>47</sup> Robert D. Pursely, *Fourth edition, Introduction to Criminal Justice*, Mac Milan Publishers Company, New York Right, 1984, Hal 92

Berbagai bentuk penyimpangan perilaku sosial anak dan akan menjadi objek delinkuensi anak yang potensial, manakala faktor-faktor penyimpangan tersebut tidak mendapat reaksi dari kepentingan hukum nasional. Khususnya mengenai hukum pidana dan hukum acara pidana

Sebagian besar anak dibesarkan oleh keluarga, disamping itu kenyataan menunjukkan bahwa didalam keluarga anak mendapatkan pendidikan dan pembinaan yang pertama kali. Pada dasarnya keluarga merupakan lingkungan kelompok sosial yang paling kecil, akan tetapi juga merupakan lingkungan paling dekat dan terkuat di dalam mendidik anak-anak terutama bagi anak-anak yang belum memasuki bangku sekolah. Dengan demikian berarti seluk beluk kehidupan keluarga memiliki pengaruh yang paling mendasar dalam perkembangan anak.

Drs. Agus Suyanto menjelaskan; "oleh karena sejak kecil anak dibesarkan oleh keadaan keluarga dan untuk seterusnya, sebagian besar waktunya adalah didalam keluarganya maka sepantasnyalah kalau kemungkinan timbulnya delinkuensi itu sebagian besar berasal dari keluarganya.<sup>48</sup> Sedangkan menurut ahli-ahli kriminologi baik dari mazhab psikoanalitik maupun mazhab sosiologik,

---

<sup>48</sup>. Agus Suyanto, Psikologi Perkembangan, Jakarta; Aksara Baru, 1981 hal 203

kedua mazhab tersebut sependapat bahwa lingkungan kehidupan keluarga merupakan faktor pembentuk dan paling berpengaruh bagi perkembangan mental, fisik dan penyesuaian sosial anak.

Sigmund Freud dari mazhab psikoanalitik dengan konsepsi psikologiko-psikokiatrik dan W. A. Bonger yang bermazhab ekonomi berpendapat sebagai berikut :

"Sigmund Freud : sebab utama dari perkembangan tidak sehat, ketidakmampuan menyesuaikan diri dan kriminalitas anak adalah konflik-konflik mental, rasa tidak dipenuhi kebutuhan pokoknya seperti rasa aman, dihargai, bebas memperlihatkan kepribadian dan lain-lain.

" W.A Bonger: penyebab divasi atau penyimpangan pada perkembangan anak adalah kemiskinan di rumah, ketidaksetaraan sosial dan keadaan-keadaan ekonomi lain yang merugikan dan bertentangan".<sup>49</sup>

Delikueni anak dapat pula terjadi karena keadaan ekonomi keluarga, terutama menyangkut keluarga miskin atau keluarga yang menderita kekurangan jika dibandingkan dengan keadaan ekonomi penduduk pada umumnya. <sup>50</sup>. Fenomena ini sering terjadi pada keluarga kelas bawah yang tergolong orang yang hanya dapat membiayai hidupnya dalam batas sangat minim yang biasa ditandai dengan kerja keras kepala keluarga; bahkan dalam keadaan mendesak seluruh anggota keluarga ikut mencari nafkah untuk mempertahankan hidupnya. Kondisi keluarga seperti ini biasanya memiliki konsekuensi lebih lanjut dan

<sup>49</sup> Moelyatno, Lanya, Ny, *Kriminologi*, Jakarta; PT Bina Aksara, 1986, Cetakan Kedua. Disadur dari "Crimonoli" oleh Stephan Hurwitz. Hal 103

<sup>50</sup> Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Jakarta :Rieneka Cipta, 1989, hal 22

kompleks terhadap anak-anak antara lain : hampir setiap hari anak terlantar, biaya sekolah tidak tercukupi. Akibat akan kompleks pula dalam kondisi yang serba sulit dapat mendorong anak sebagai delikuen.

Kajian lebih lanjut tentang peran keluarga yang berkaitan dengan delikuenensi anak, terdapat hal yang menonjol adalah kurangnya pendidikan agama didalamnya. Dalam pembahasan ini Dr Zakiah Darajat menjelaskan bahwa;

Yang dimaksud dengan didikan agama bukanlah pelajaran agama yang di berikan secara sengaja dan teratur oleh guru sekolah saja. Akan tetapi yang terpenting adalah penanaman jiwa agama mulai dari rumah tangga, sejak si anak masih kecil, dengan jalan membiasakan si anak kepada sifat kebiasaan yang baik. Akan tetapi amat disayangkan melihat kenyataan banyaknya orang tua yang tidak mengerti ajaran agama yang dianutnya, bahkan banyak pula yang memandang rendah ajaran agama itu praktis tidak pernah dilaksanakan dalam banyak keluarga.... Dengan tidak kenalnya si anak akan jiwa agama yang benar, akan lemahlah hati nuraninya (super ego), karena tidak terbentuk dari nilai-nilai masyarakat atau agama yang diterimanya waktu ia kecil. Jika hati nuraninya lemah, atau unsur pengontrol dalam diri si anak kosong dari nilai-nilai yang baik, maka sudah barang tentu akan mudah mereka terperosok kedalam kelakuan yang tidak baik dan menurutkan apa yang menyenangkannya waktu itu saja, tanpa memikirkan akibat selanjutnya”.<sup>51</sup>

Romli Atmasasmita berpendapat tentang latar belakang tindak pidana anak terkait pada faktor kriminogen dari seorang anak, atau secara tegas mengenai motivasinya. Apakah yang dimaksudkan “motivasi”, dapat di lihat dalam Oxford Dictionary. Bahwa motivasi sering diartikan dengan hal-hal

<sup>51</sup> Zakiah Drajat, Kesehatan Mental, Jakarta, Gunung Agung 1983, hal 113-114

yang menyebabkan atau mendorong individu atau kelompok untuk berbuat sesuatu. Dalam arti yuridis, motivasi diartikan : “.... Latar belakang seseorang untuk berbuat sesuatu”.<sup>52</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai motivasi diartikan sebagai : (1) dorongan yang timbul pada diri seseorang, sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu; (2) usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaknya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.<sup>53</sup>

Dari perumusan motivasi tersebut diatas, dapat dipetik adanya suatu kesamaan pendapat atau pengertian, bahwa suatu perbuatan tidaklah dapat dipisahkan dari sebab-sebabnya, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya suatu perbuatan itu sendiri.

Pembahasan mengenai masalah motivasi tersebut, secara teoritis mengandung manfaat, tujuan dan fungsi seperti yang diungkapkan dalam laporan hasil Team Proyek “*Juvenile Delinquency*” Fakultas Hukum dan Pengetahuan masyarakat Universitas Padjajaran pada medio Desember 1967, sebagai berikut:

---

<sup>52</sup> Ibid, Hal 44

<sup>53</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen P dan K, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Cetakan ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 1990

1. Motivasi itu mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, dimana motivasi mempunyai peranan sebagai tenaga penggerak atau motor yang memberikan daya energi dalam mewujudkan suatu perbuatan
2. Motivasi menentukan arah tujuan perhubungan yaitu untuk meralisasikan tujuan atau cita-citanya. Motivasi ini merupakan perbuatan yang meniadakan penyelewengan dan meluruskan perbuatan yang keliru. Dalam hal ini motivasi yang dimaksud adalah motivasi yang positif, penjelasan tujuan yang ditempuh berarti makin memperjelas jalan itu sendiri.
3. Motivasi itu sebenarnya mengadakan koreksi terhadap perbuatan yang dibenarkan dan manakah perbuatan yang harus dihindarkan

Dengan demikian, di dalam pengertian motivasi terkandung suatu niat, hasrat, tekad, dorongan kebutuhan cita-cita, yang kemudian dimanifestasikan dengan lahirnya perbuatan-perbuatan.<sup>54</sup>

Dengan mengungkapkan motivasi seorang anak yang melakukan kenakalan, haruslah diusahakan untuk terlebih dahulu mengenal pribadi si anak atau lebih luas lagi harus berusaha mengenal dunia anak itu sendiri. Dengan mengenal dunia anak akan lebih mempermudah untuk mengungkapkan faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan perbuatan. Dan usaha lebih jauh lagi berarti akan mengenal perbuatan si anak sehingga di mengerti perbuatannya dan akibat dari perbuatan itu sendiri.

Untuk menetapkan penyebab kenakalan anak-anak (etiologi) tidaklah mudah, karena banyak faktor yang harus diperhitungkan, misalnya : Faktor pribadi, pengaruh sosial atau pengaruh lainnya seperti riwayat hidup si anak sejak kecil. Faktor keluarga sangatlah penting, karena merupakan

---

<sup>54</sup> Romli Atmasasmita, Op. cit, Hal 45

lingkungan yang pertama (lingkungan primer) bagi si anak. Dalam mencari sebab kenakalan tersebut, bukanlah sebab-sebab yang tunggal atau unilateral. Sebab-sebab yang beraneka ragam serat satu dengan yang lainnya saling berkaitan, ada yang berpengaruh secara langsung dan ada yang secara tidak langsung. Terkadang sangat sulit untuk dapat membedakan sebab dan akibat dari perbuatan tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, B. Simanjuntak mengatakan bahwa dewasa ini penelitian etimologi *delinquency* telah ditinggalkan ; karena tidaklah mungkin menentukan sejumlah faktor-faktor yang dapat menerangkan semua kasus kenakalan anak (*juvenile Delinquency*). Yang dicari sekarang adalah mengapa dalam kelompok-kelompok orang yang berbeda atau dalam lingkungan yang berbeda-beda dengan kondisi yang berbeda terdapat lebih banyak atau kurangnya anak yang menjadi anak nakal. Jadi yang dicari bukanlah mengapa si anak melakukan kenakalan, tetapi hanyaanya ada kemungkinan suatu faktor tertentu yang membawa resiko lebih besar atau lebih kecil yang menyebabkan orang tertentu menjadi *Juvenile Delinquency*. Pendapat yang demikian meninggalkan pendapat "*the sufficient and necessary cause*" dan diganti dengan pendapat "*Necessary but not sufficient*" sebagai sebab kenakalan dari anak. *The sufficient and necessary cause* senada dengan pendapat John Stuart Mill yang menyatakan bahwa ada



satu faktor yang selalu merupakan faktor penyebab kenakalan anak, tanpa memerlukan faktor-faktor lain. Pendapat Stuart Mill ini ditolak oleh Manheim yang menyatakan bahwa yang ada hanyalah faktor-faktor yang selalu merupakan sebab kenalan anak bersama-sama dengan faktor lain. Dari uraian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mencari sebab-sebab kenakalan anak hendaknya digunakan pendekatan "multi factor" dan bukan merupakan pendekatan "General Theory". Pendekatan multiple factor ini dipakai Sheldon Gluck bersama istrinya Elianor Glueck dalam penelitian *Juvenile Delinquency*, sedangkan pendekatan General Theory digunakan Stuterland dengan teori *Differential Association*-nya <sup>55</sup>

Kriminologi adalah pendekatan yang digunakan dalam mencari sebab-sebab timbulnya kejahatan (etimologi kriminal)- Simanjuntak lebih lanjut menyatakan bahwa :<sup>56</sup>

"....tak ada sesuatu yang pasti selalu menghasilkan crime, baik abnormalitas fisik maupun penyakit jiwa, mental retardation, kurangnya kesehatan dan sebagainya. Kejahatan akan terjadi jika ada kombinasi antara faktor - faktor kepribadian dan faktor-faktor sosial serta struktur fisik tertentu. Dan pula faktor-faktor itu sendiri dalam satu hal menimbulkan crime tetapi dalam hal lainnya tidak, karena situasi-situasi itu tidak pernah sama sekali benar. Crime adalah buah dari

<sup>55</sup> B. Simanjuntak, op. cit, hal 56

<sup>56</sup> Ibid, hal 57

semua elemen didalam suatu situasi tertentu. Soalnya situasi-situasi sosial tidak ada yang sama dan terjadi berulang kali".

Sri Widowati Sockito membahas sebab-sebab *Juvenile Delinquency* menjadi tiga kelompok, yaitu ; (1) Faktor-faktor yang berhubungan dengan pribadi dan keadaan sekelilingnya; (2) Faktor-faktor struktural; (3) Faktor-faktor yang berhubungan dengan prosedur penentuan dan perlakuan tindakan kenakalan anak.<sup>57</sup>

Faktor-faktor yang menyebabkan *Juvenile Delinquency* yang berhubungan dengan pribadi atau keadaan sekeliling anak adalah (a) Rumah tangga atau keluarga yang retak (broken homes); (b) Ditelantarkan oleh orang tua (material, kasih sayang, acuh tak acuh); (c) Kekurangan-kekurangan psikologis; (d) Pergaulan atau teman yang tidak baik.

Sebab-sebab (causa) struktural terdapat pada :

(a) Sistim ekonomi dan pendidikan serta struktur untuk memperolehnya di suatu negara; (b) Dalam proses perubahan sosial sebagai akibat dari kemajuan industri, urbanisasi dan teknik. Untuk mengurangi sebab-sebab ini lebih sukar karena berhubungan dengan vested interest struktur yang ada, contohnya : perubahan sistim keluarga sesudah perang ; fenomena ibu yang bekerja atau yang tidak bekerja tetapi sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial; keadaan

---

<sup>57</sup> Sriwidowati Wiratmo Sockito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1989,

perumahan;kesempatan pendidikan; perlombaan pendidikan yang lebih tinggi; kepadatan penduduk di kota-kota besar; media komunikasi massa; perkembangan ekonomi dan kenaikan harga-harga dan sebagainya. Sebab-sebab tersebut hanya dapat dikurangi atau ditanggulangi pada level perencanaan sosial dan kebijaksanaan sosial.

Secara teoritik, banyak teori yang lazim dipakai sebagai pisau analisis untuk membedah latar belakang timbulnya kenakalan anak, yang menurut Paulus Hadi suprpto dengan menggunakan istilah delikueni anak terhadap kenakalan anak lebih menekankan pada kelompok teori *Undercontrol (Concensus Theories)*.<sup>58</sup> Dalam mengkaji masalah perilaku delikuen anak, teori ini mendasarkan diri pada asumsi bahwa kita semua menyepakati isi serta berlakunya kaidah-kaidah kemasyarakatan oleh karena itu merupakan kewajiban apabila semua masyarakat mematuhi kaidah-kaidah kemasyarakatan itu.

*Undercontrol Theory* terbagi dalam : (a) *Disorganisasi Sosial*; (b) *Teori Netralisasi*; dan (c) *Teori Kontrol*, yang dibahas pada bagian berikut.

#### **a. Teori Disorganisasi Sosial**

<sup>58</sup> John Hagan dalam bukunya *Modern Criminology, Crime, Criminal Behaviour and the Control*, Singapore :McGrae Hill Book Com, 1987 , hal 18 mengklasifikasikan tiga kelompok besar yakni : (a) *Teori Undercontrol*;(b) *Teori Kultur*, Status dan kesempatan; dan (c) *Teori Overcontrol*.

Yang termasuk dalam teori ini adalah Teori *Differensial Assosiation* dari E. Sutherland dan berkembang setelah itu *Teori Anomie* dari Robert Merton

Teori *Differensial Assosiation* mendasarkan diri pada proses belajar. Kejahatan seperti juga perilaku pada umumnya merupakan sesuatu yang dipelajari. Asumsi yang meladasi teori ini ialah : *a criminal act occurs when appropriate for it, as defined by the person, is present* <sup>59</sup>

Sutherland dalam menjelaskan proses terjadinya perilaku kejahatan termasuk delikueni anak mengajukan 9 preposisi, yaitu :

- (1) Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari, secara negatif berarti perilaku itu tidak diwarisi ;
- (2) Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama dapat bersifat lisan ataupun menggunakan bahasa isyarat;
- (3) Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan itu terjadi dalam kelompok personal yang intim. Secara negatif ini berarti komunikasi yang bersifat tidak personal, secara relatif tidak mempunyai peranan penting dalam hal terjadinya kejahatan;
- (4) Apabila perilaku kejahatan dipelajari maka yang dipelajari meliputi: (a) Teknik melakukan kejahatan; (b) Motif-motif tertentu, dorongan-dorongan, alasan-alasan pembenar termasuk sikap-sikap;
- (5) Arah dari motif dan dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat terkadang seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang secara bersamaan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan atau dipatuhi, namun kadang ia dikelilingi oleh orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberi peluang dilakukannya kejahatan;

<sup>59</sup> Rose Gialombardo, *Juvenile Delinquency, A Book of Readings*, Second edition, New York : John Wiley and Sons Inc. 1972, Hal 19

- (6) Seseorang menjadi delikuen karena ekses dari pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang dilakukannya kejahatan dari pada melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi.
- (7) *Differensial Assosiation* bervariasi dalam hal frekuensi, jangka waktu, prioritas serta identitasnya;
- (8) Proses mempelajari perilaku kejahatan yang diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang lazimnya terjadi dalam proses belajar pada umumnya;
- (9) Sementara perilaku kejahatan merupakan pernyataan kebutuhan dan nilai umum, akan tetapi hal tersebut tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai umum itu, sebab perilaku yang bukan kejahatan juga merupakan pernyataan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.

Menurut teori anomie, berasal dari seorang pakar Sosiolog Perancis, Emille Durkheim, yang berarti suatu keadaan tanpa norma. Konsep Anamie ini kemudian oleh Robert Merton direformasikan dalam rangka menjelaskan keterkaitan antara kelas-kelas sosial dengan kecenderungan pengadaptasiannya dalam sikap dan perilaku kelompok.

Teori Anomie dari Robet Merton ini mencoba melihat antara tahap-tahap tertentu dari struktur sosial dengan perilaku delinkuen. Tahapan-tahapan tersebut akan menimbulkan suatu kondisi dimana pelanggaran terhadap norma-norma kemasyarakatan merupakan wujud reaksi "normal". Merton berusaha menunjukkan bahwa berbagai struktur sosial yang mungkin terdapat didalam masyarakat dalam realitasnya telah mendorong orang-orang dengan kualitas tertentu cenderung berperilaku menyimpang ketimbang mematuhi norma-norma kemasyarakatan. Dua unsur yang

dianggap pantas untuk diperhatikan dalam mempelajari berbagai bentuk perilaku delinkuen ialah unsur-unsur dari struktur sosial yang melahirkan "*means*" dan cultural yang melahirkan "*goals*"

*Goals* diartikan sebagai tujuan-tujuan kepentingan-kepentingan yang sudah membudaya, meliputi kerangka aspirasi dasar manusia, seperti dorongan untuk hidup. Sedangkan *Means* adalah aturan-aturan dan cara-cara kontrol yang melembaga dan diterima sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang membudaya tersebut.

Selanjutnya, Merton mengemukakan lima bentuk kemungkinan pengadaptasian yang dapat terjadi didalam setiap kelompok masyarakat berkaitan dengan *goals* dan *means*. Berbagai kemungkinan tersebut dapat dilihat dalam matriks berikut ini <sup>60</sup>

| Bentuk Penyesuaian Diri     | Tujuan Kebudayaan | Cara-cara Melembaga |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| Konformitas (Conformity)    | Menerima          | Menerima            |
| Inovasi (Innovation)        | Menerima          | Menolak             |
| Ritualisme (Ritualism)      | Menolak           | Menerima            |
| Penarikan Diri (Retrestism) | Menolak           | Menolak             |
| Pemberontakan (Rebellion)   | Perombakan        | Perombakan          |

Bentuk 2,3,4 dan 5 adalah bentuk-bentuk penyesuaian diri yang "menyeleweng" dari norma-norma yang berlaku. Pada

<sup>60</sup> Rose Giulombardo, *Juvenile Delinquency, A Book of Readings* ibid, hal 97

bentuk *conformity*, merupakan perilaku yang terjadi manakala tujuan dan cara yang sudah ada di masyarakat diterima dan melalui sikap itu seseorang mencapai keberhasilan. *Innovation*, terjadi manakala seseorang terlalu menekankan tujuan yang membudaya tanpa menginternalisasikan norma-norma kelembagaan yang mengatur tata cara untuk mencapai tujuan yang membudaya tersebut. Menurut Merton, kecenderungan pengadaptasian itu banyak terjadi pada kejahatan-kejahatan yang bermotif ekonomi dan kejahatan terhadap harta benda, contoh pencurian. Bentuk adaptasi ini cenderung terjadi pada kelompok "lower-class". Sedangkan *Ritualism*, mencerminkan mereka yang terlempar dari kehidupan kemasyarakatan, termasuk alkoholik dan penyalahgunaan narkotika. *Rebellion*, merupakan perjuangan yang terorganisasikan ditujukan untuk melakukan perubahan-perubahan menyeluruh.

Menurut teori netralisasi, bahwa aktivitas manusia dikendalikan oleh pikiran. Dengan demikian, pertanyaan dan yang dilontarkan teori ini adalah : "pola pikiran yang bagaimanakah yang terdapat didalam benak orang-orang baik, dalam hal tertentu berubah menjadi jahat?". Pertanyaan ini sekaligus mencerminkan suatu anggapan bahwa kebanyakan orang dalam berbuat suatu selalu dikendalikan oleh pikiran yang baik. Teori Netralisasi juga beranggapan bahwa dalam masyarakat selalu terdapat persamaan pendapat tentang "hal-

hal yang baik didalam kehidupan masyarakat: dan "jalan yang layak untuk mencapai suatu hal tersebut"

Hal yang menarik dari teori ini ialah terletak pada cara menjawab tentang bagaimanakah prosesnya sehingga seseorang yang pada umumnya berpikiran baik sampai melakukan kejahatan dan atau berperilaku menyimpang. Menurut teori ini orang-orang tersebut berperilaku jahat atau menyimpang disebabkan adanya kecenderungan dikalangan mereka untuk merasioinalisasikan norma-norma dan nilai-nilai yang seharusnya berfungsi sebagai pencegah perilaku jahat menurut persepsi dan kepentingan mereka.

Sykes dan Matza dalam artikel yang berjudul "*The Tecnique of Netralization: Theory of Delinquency*" mengemukakan bahwa meskipun kebanyakan teori kejahatan beranggapan bahwa perilaku kejahatan dan *delinkuensi* , khususnya pelaku kejahtan kelas bawah, mempunyai cirri-ciri berbeda dengan orang pada umumnya. Sykes & Matza berpikir sebaliknya, yaitu bahwa justru kesamaan-kesamaan ciri antara pelaku kejahatan dengan orang kebanyakan lebih banyak kesamaannya dari pada perbedaannya. Pendapat demikian didasarkan atas pengamatan mereka bahwa ternyata dikalangan pelaku kejahatan terdapat adanya rasa malu dan rasa bersalah manakala mereka baru saja melakukan perbuatan jahatnya. Menurut Sykes dan Matza, pelaku



kejahatan itu merupakan : "orang-orang yang gagal meminta maaf atas perbuatannya (*apologetic failure*) dan mengikuti arus gaya hidup para pelaku kejahatan lainnya, melalui suatu proses yang disebut "pembenaran kelakuan". Pembetulan kelakuan ini oleh Sykes dan Matza disebut : "Teknik Netralisasi".

Menurut teori kontrol, berangkat dari asumsi bahwa individu didalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya menjadi "baik" atau "jahat". Baik atau jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakat. Ia menjadi baik kalau masyarakatnya membuatnya demikian dan menjadi jahat apabila masyarakat juga membuatnya demikian.

Pertanyaan dasar yang dilontarkan paham ini berkaitan dengan unsur-unsur pencegah yang mampu menangkis timbulnya perilaku *delikuen* dikalangan anggota masyarakat terutama para anak dan remaja, yaitu : Mengapa kita patuh dan taat pada norma-norma masyarakat?, atau : mengapa kita tidak melakukan penyimpangan ?. Pertanyaan demikian mencerminkan suatu pemikiran bahwa penyimpangan bukan merupakan problematik, Persoalan pokoknya adalah "ketaatan atau kepatuhan pada norma-norma kemasyarakatan". Dengan demikian menurut paham ini sesuatu perlu dicari kejelasannya ialah pada norma dan faktor-faktor yang menyebabkan

sesorang patuh atau taat pada norma-norma kemasyarakatan. Pada dasarnya upaya penjelasan perilaku penyimpangan tidak harus dilakukan dengan cara menjelaskan perilaku "tidak patuh norma" oleh karena itu, tidak mengherankan apabila penganut paham ini berpendapat bahwa ikatan sosial (*social bound*) seseorang dengan masyarakatnya dipandang sebagai faktor pencegah timbulnya perilaku penyimpangan. Seseorang dapat melemah atau terputus ikatan sosial dengan masyarakat, manakala di masyarakat itu telah terjadi pemerosotan fungsi lembaga kontrol sosial baik formal maupun informal. Termasuk lembaga kontrol sosial informal disini ialah sarana-sarana kontrol sosial non hukum positif atau dalam konteks masyarakat kita sarana-sarana tersebut dapat diidentikkan dengan lembaga adat, sebagai suatu sistim kontrol yang tidak tertulis namun memperoleh pengakuan keabsahan keberlakuannya di masyarakat.

Hirschi mengklasifikasikan unsur-unsur ikatan sosial itu menjadi empat, yaitu: (a) *Attacment*; (b) *Commitment*; (c) *Involvement*; (d) *Beliefs*. *Attachment*, mengacu pada kemampuan seseorang untuk menginternalisasikan norma-norma masyarakat. Apabila seseorang telah menginternalisasikan norma-norma itu, maka berarti ia mampu mengantisipasi kepentingan orang lain. Jadi kalau seseorang melanggar norma-norma masyarakat, berarti ia tak peduli dengan pandangan,

pendapat, serta kepentingan orang lain. *Commitment* mengacu pada perhitungan untung rugi keterlibatan seseorang pada perbuatan penyimpangan. Latar belakang pemikiran ini adalah bahwa orang pada umumnya menginvestasikan segala hal termasuk waktu, tenaga, dirinya sendiri dalam suatu kegiatan masyarakat dengan maksud memperoleh reputasi di masyarakat. *Involvement*, mengacu pada suatu pemikiran bahwa apabila seseorang disibukkan dalam berbagai kegiatan konvensional, maka ia tidak akan pernah sempat berpikir apalagi melibatkan diri dalam perbuatan penyimpangan. *Beliefs*, mengacu pada situasi keanekaragaman penghayatan kaidah-kaidah kemasyarakatan dikalangan anggota masyarakat. Keanekaragaman ini terutama difokuskan pada keabsahan (validitas) moral yang terkandung didalam kaidah-kaidah kemasyarakatan itu. Pelaku penyimpangan pada umumnya mengetahui bahwa perbuatannya "salah" namun makna dan kemampuan pemahamannya itu kalah bersaing dengan keyakinan lain "(kerancuan penghayatan keabsahan moral) sehingga kendur ikatan dengan tertib masyarakat konvensional dan pada gilirannya ia merasa bebas untuk melakukan penyimpangan.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Disarikan dari Paulus Hadisuprpto, *ibid*, hal 17-34

## **C. TEORI PEMIDANAAN (DASAR-DASAR PEMBENARAN DAN TUJUAN PIDANA)**

### **1. TEORI PEMIDANAAN (DASAR-DASAR PEMBENARAN DAN TUJUAN PIDANA)**

Dalam sistim penyelenggaraan hukum pidana (criminal justice system) pidana menempati suatu posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan dalam pembedanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Masalah pidana ini tidak dapat dipandang hanya sederhana, sebab persoalannya justru sangat kompleks dan mengandung makna yang sangat mendalam, baik yuridis, sosiologis maupun filosofis.

Khusus mengenai pidana sendiri, selama ini terdapat dua pandangan yang masing-masing baik secara yuridis, sosiologis maupun filosofis saling bertentangan. Sebagian ahli hukum keberatan terhadap penggunaan saksi (hukum) pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan dalam masyarakat. Menurut Alf Ross, keberatan terhadap penggunaan sanksi pidana dalam masyarakat ini muncul dengan adanya pandangan deterministik, yang kemudian berlanjut pada munculnya gerakan "anti pidana" (*the campaign against punishment*). Dengan munculnya keberatan tersebut, Menninger berpendapat seyogyanya sikap memidana harus diganti dengan " sikap

karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de ferechtigheid*). Salah seorang tokoh lain dari penganut teori absolut adalah Hegel yang berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan yang logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan<sup>63</sup>

Menurut Nigel Walker, para penganut teori ini dapat dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu penganut teori retributif yang murni (*the pure retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat; dan penganut teori retributif murni (dengan modifikasi) yang dapat digolongkan dalam penganut teori retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok atau sepadan dengan terdakwa; dan penganut teori retributif yang distributif (*retribution in distribution*) yang berpendapat bahwa pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok atau sepadan dengan dan dibatasi oleh kesalahan.

Selanjutnya Nigel Walker bahwa hanya golongan pertama sajalah (*the pure retributivist*) yang mengemukakan alasan dasar pembenaran untuk pengenaan pidana, sehingga golongan

---

<sup>63</sup> Op Cit, Muladi dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, hal 10-12

karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan melainkan mencerminkan keadilan (*uitdruking van de ferechtigheid*). Salah seorang tokoh lain dari penganut teori absolut adalah Hegel yang berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan yang logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan<sup>63</sup>

Menurut Nigel Walker, para penganut teori ini dapat dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu penganut teori retributif yang murni (*the pure retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat; dan penganut teori retributif murni (dengan modifikasi) yang dapat digolongkan dalam penganut teori retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok atau sepadan dengan terdakwa; dan penganut teori retributif yang distributif (*retribution in distribution*) yang berpendapat bahwa pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok atau sepadan dengan dan dibatasi oleh kesalahan.

Selanjutnya Nigel Walker bahwa hanya golongan pertama sajalah (*the pure retributivist*) yang mengemukakan alasan dasar pembenaran untuk pengenaan pidana, sehingga golongan

---

<sup>63</sup> Op Cit, Muladi dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, hal 10-12

kesalahan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan ).<sup>64</sup>

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini biasanya dibedakan antara istilah prevensi spesial dan prevensi general atau sering pula digunakan istilah "*special deterence*" dan "*genaral deterence*"

Dengan prevendi spesial dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana sehingga pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana yang mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana berubah menjadi orang yang lebih baik berguna bagi masyarakat. Teori tujuan pidana serupa ini dikenal dengan reformation atau *rehabilitation theory*.

Dengan prevensi general dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Selain teori-teori pembedaan sebagai dasar pembenaran dan tujuan pidan tersebut, terdapat aliran-aliran dalam hukum pidana yang sebenarnya tidak mencari dasar hukum atau pembenaran dari pidan, tetapi berusaha memperoleh suatu sistim hukum pidana yang praktis dan

---

<sup>64</sup> Ibid, Muladi dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, hal 16

kesalahan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan ).<sup>64</sup>

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini biasanya dibedakan antara istilah prevensi spesial dan prevensi general atau sering pula digunakan istilah "*special deterence*" dan "*genaral deterence*"

Dengan prevendi spesial dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana sehingga pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana yang mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana berubah menjadi orang yang lebih baik berguna bagi masyarakat. Teori tujuan pidana serupa ini dikenal dengan reformation atau *rehabilitation theory*.

Dengan prevensi general dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Selain teori-teori pembedaan sebagai dasar pembenaran dan tujuan pidan tersebut, terdapat aliran-aliran dalam hukum pidana yang sebenarnya tidak mencari dasar hukum atau pembenaran dari pidan, tetapi berusaha memperoleh suatu sistim hukum pidana yang praktis dan

---

<sup>64</sup> Ibid, Muladi dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, hal 16



bermanfaat. Secara garis besar, aliran ini dapat dibagi dalam dua aliran yaitu aliran klasik dan modern. Dalam kedua aliran dalam hukum pidana ini, sesuai dengan masa atau jamannya, dapat ditunjukkan kearah mana sebenarnya sistim pemidanaan hendak dibawa.

Aliran klasik adalah merupakan aliran yang merupakan reaksi terhadap acien regime yang arbitair pada abad ke -18 di Prancis yang banyak menimbulkan ketidak pastian hukum, ketidak samaan dalam hukum dan ketidakadilan. Aliran ini terutama menghendaki hukum pidana yang tersusun sistimatis dan menitik beratkan kepada perbuatan dan tidak kepada orang yang melakukan tindak pidana, sehingga hukum pidana yang dikehendaki adalah hukum pidana perbuatan (*daadstrafrecht*). Perumusan undang-undang dan perbuatan yang melawan hukum merupakan titik sentral yang menjadi perhatian hukum pidana. Perbuatan disini diartikan secara abstrak dilihat secara yuridis belaka terlepas dari orang yang melakukannya. Jadi aliran ini ingin mengobyektifkan hukum pidana dari sifat-sifat pribadi sipelaku

Dalam hal pidana dan pemidanaan aliran ini pada awalnya timbul sangat membatasi kebebasan hakim untuk menetapkan jenis pidana dan ukuran pemidanaan. Dikenallah pada waktu itu sistim "*the definite sentence*" yang sangat kaku (*rigid*). Peranan hakim dalam menentukan kesalahan seseorang

sangat dikurangi, sehingga tidak dikenal individualisasi dalam penetapan pidana.<sup>65</sup>

Dua tokoh yang terkenal dalam aliran klasik ini adalah Casare Beccaria dan Jeremy Bentham.

Beccaria misalnya terkenal sekali dengan ide atau konsepsinya bahwa pidana harus cocok dengan kejahatan (*punishment should fit crime*) yang kemudian merupakan tema esensiil dari aliran klasik. Filsafat yang mempengaruhi beccaria secara kuat adalah mengenai "kebebasan kehendak" dimana menurutnya perbuatan manusia bersifat purposive (bertujuan) dan ini didasarkan pada paham hendodism, prinsip kesenangan dan kesusahan, yaitu; manusia memilih perbuatan-perbuatan yang akan memberikan kesenangan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang membawa kesusahan. Oleh karena itu pidana harus dirancang untuk masing-masing kejahatan menurut tingkatnya yang akan menghasilkan lebih banyak kesusahan dari pada kesenangan terhadap mereka yang melakukan perbuatan. Alasan utama dari penjatuhan pidana adalah untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat dan untuk mencegah orang dari melakukan kejahatan.<sup>66</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya sistim yang akku ini ditinggalkan karena pengaruh aliran modern dan timbullah apa

---

<sup>65</sup> Ibid, , Muladi dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, 25-26

<sup>66</sup> Ibid, , Muladi dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, hal 27-28

yang dikenal dengan aliran neoklasik, yang menitik beratkan pada pengimbangan dari kesalahan sipembuat dan dikenal sebagai sistim dengan sebutan "*the indefinite sentence*".

Selain Beccaria, Jeremy Bentham adalah salah satu penganut *utilitarian hedonist* yang terkenal dengan salah satu teorinya yaitu "*felicific calculus*" yaitu bahwa manusia merupakan ciptaan atau mahluk yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu menurutnya suatu pidana harus ditetapkan pada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat dari kesenangan yang ditimbulkan dari kejahatan. Jelas hal ini sesuai dengan filsafat Beccaria mengenai "*let the punishment fit crime*". Karena Bentham adalah seorang pemikir dibalik kursi, ia selalu melihat kejahatan secara abstrak, sehingga sesungguhnya ia sama sekali gagal melihat penjahat sebagai manusia, sebagai suatu hal yang hidup, kompleks, kepribadian yang beraneka ragam. Ia memaafkan pidana yang berat karena pengaruhnya yang bersifat memperbaiki (*reforming effect*), tetapi ia mengakui bahwa pidana berat harus diterima oleh rakyat sebelum diperlakukan atau diefektifkan. Hukum pidana jangan dipergunakan sebagai pembalasan terhadap si penjahat, tetapi hanya untuk tujuan mencegah kejahatan.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Ibid, , Muladi dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, 30-31

Akiran modern timbul pada abad 19 dan yang menjadi pusat perhatiannya adalah sipembuat. Menurut aliran ini perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata terlepas dari orang yang melakukannya tetapi harus dilihat secara kongkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya. Faktor-faktor biologis maupun faktor lingkungankemasyarakatannya. Jadi aliran ini bertitik tolak pada pandangan determinisme.

Pertanggung jawab seseorang berdasarkan kesalahan harus diganti dengan sifat berbahayanya si pembuat(ctel dangereux). Bentuk pertanggung jawab kepada si pembuat lebih bersifat tindakan untuk perlindungan masyarakat. Kalau toh dipergunakan istilah pidana harus tetap dioreintasikan pada sifat-sifat sipembuat. Jadi aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan mengadakan resosialisasi si pembuat. Aliran modern ini dipelopori antara lain oleh Lombroso, lacassagne dan Enrico Ferri.<sup>68</sup>

Pada tahun-tahun setelah Perang Dunia II, aliran modern ini berkembang menjadi apa yang dikenal dengan aliran atau gerakan perlindungan masyarakat (*sosial defence*). Aliran ini kemudian terbagi menjadi 2 pandangan atau konsepsi yaitu

---

<sup>68</sup> Ibid, Muladi dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, hal 32-33

pandangan atau konsepsi yang radikal (ekstrim) dan pandangan atau konsepsi yang moderat (reformis).

Konsepsi yang radikal dipelopori dan dipertahankan oleh Filipo Gramatika. Salah satu dari tulisannya yang menimbulkan banyak sekali perhatian dan juga banyak diragukan adalah berjudul "*La lotta Cantra La Pena*" atau "*The Fights Against Punishment*" Menurutnya "hukum perlindungan sosial" harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawab pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial.

Terhadap pendapat ini, Van Bemmelen menyatakan tidak mungkin terlaksana, sebab mengandung bahaya-bahaya yang besar terhadap kebebasan individu didatu pihak dan pihak lain masyarakat tidak dapat melepaskan pencelaan dalam bentuk pidana terhadap perbuatan-perbuatan tertentu.

Konsepsi yang moderat dipertahankan oleh Marc Ancel yang menamakan gerakannya sebagai "*defence sociale nouvelle*" atau *new sosial defence*. Aliran ini bertujuan mengintegrasikan ide-ide perlindungan masyarakat ke dalam konsepsi baru hukum pidana.

Menurutnya tiap-tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama., tetapi dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, peranan besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum. Dengan ini sistem hukum pidana, tindak pidana, penilaian hakim dengan hukum secara murni mapun pidana merupakan lembaga-lembaga (institusi) yang harus dipertahankan.

Hanya saja menurutnya, dalam menggunakan sistim hukum pidana aliran ini menolak penggunaan fiksi-fiksi yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial. Hal ini sebenarnya merupakan reaksi terhadap ekseseks legalisme dari aliran klasik dan neo klasik.

Selanjutnya ia menyatakan bahwa kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial (*a human and social problem*) yang tidak begitu saja dengan mudah dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam perumusan suatu peraturan perundang-undangan. Namun hal ini tidak berarti bahwa hakim pidana tidak memutuskan berdasarkan undang-undang dan harus menolak penetapan pidana.

Aliran ini tidak menolak adanya konsepsi pertanggung jawaban yang bersifat pribadi (*individual responsibility*). Menurut

Marc Ancel, pertanggung jawaban yang didasarkan pada kebebasan individu merupakan kekuatan penggerak yang utama dari proses penyesuaian sosial (*the main driving force the process of social readaptation*). Untuk itu reaksi terhadap perbuatan anti sosial justru dipusatkan pada konsepsi pertanggung jawaban pribadi yang menekan pada perasaan kewajiban moral pada diri individu dan oleh karena itu mencoba untuk merangsang ide tanggung jawab atau kewajiban sosial terhadap anggota masyarakat yang lain dan juga mendorongnya untuk menyadari moralitas sosial.<sup>69</sup>

## 2. TUJUAN PEMIDANAAN BAGI ANAK

Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia, serta menjadikan pidana yang bersifat operasional dan fungsional. Untuk itu diperlukan pendekatan yang multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial. Pendekatan semacam ini mengakibatkan keharusan untuk memilih teori integrative tentang tujuan pemidanaan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual dan sosial damages*).

<sup>69</sup> *ibid*, , Muladi dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, hal 36-39

Pemilihan teori integrative tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atas alasan-alasan yang baik yang bersifat sosiologis, idiologis maupun yuridis. Secara sosiologis seperti yang dikemukakan Stanley Grupp bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut. G.P. Hofnagels dalam hal ini juga menyatakan bahwa persoalan utama kejahatan dan bersifat pidana ekstra yudisial dan dapat ditemukan didalam realitas manusia dan masyarakat.<sup>70</sup>

Apaun tujuan pemidanaan berdasarkan pada alAan yurisis filosofis Herbert L. Packer menyatakan bahwa hanya ada dua tujuan utama dari pemidanaan yaitu pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap pelaku dan pencegahan kejahatan. Lebih lanjut dikatakan bahwa pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi juga merupakan bentuk kontrol sosial yang disesalkan karena ia mengenakan penderitaan atas nama

---

<sup>70</sup> Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung :1998 , hal 54



tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan suatu kemungkinan<sup>71</sup>

Bertolak dari pandangan diatas bahwa tujuan pemidanaan terhadap anak pelaku, tidak lepas dari kebijakan perlindungan anak yang pada ahirnya bertujuan untuk kesejahteraan anak itu sendiri. Sifat kasuistis dari tujuan manakah yang lebih dititik beratkan diantara tujuan-tujuan pemidanaan lain adalah berkenaan dengan tujuan dan dasar pemikiran yang lebih mengutamakan kesejahteraan anak, seperti yang ditegaskan dalam SMR-JJ-1985 (*The Beijing Rules*) dalam Rule 5-1 tentang *Aims of Juvenile Justice* ditegaskan

*"The Juvenile Justice system shall emphasize the well being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offender and the offence."*

Dalam Commentary yang terdapat didalam Rule 5-1 disebutkan bahwa ada dua tujuan utama dari peradilan anak, yaitu: (1) memajukan kesejahteraan anak (*the promotion of well being of the juvenile*) dan (2) prinsip proporsionalitas (*the principle of proportionality*). Tujuan atau sasaran yang pertama merupakan focus utama dalam sistim hukum yang menangani pelanggaran anak-anak, khususnya dari sistim hukum yang mengikuti model peradilan pidana yang harus lebih menekankan atau mengutamakan kesejahteraan anak, agar terhindar dari adanya sanksi yang bersifat punitive

<sup>71</sup> Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung :1998 , hal 54

(menghukum semata).<sup>72</sup> Tindakan terhadap anak pelaku seharusnya didasarkan tidak hanya pada pertimbangan tingkat keseriusan pelanggaran tetapi juga pada situasi pribadi pelaku<sup>73</sup>

Atas tujuan dan dasar pemikiran demi kesejahteraan anak yang pada ahirnya pada kesejahteraan masyarakat penghukuman yang dijatuhkan kepada anak sebagai reaksi dari kenakalannya tidak dapat dijadikan obyek dari pencegahan umum . Seperti yang diungkapkan oleh Johannes Andenaes bahwa terhadap anak-anak, orang gila dan penderita sakit mental tidak dapat dijadikan obyek dari tujuan pemidanaan berupa pencegahan umum (*general prevention*)<sup>74</sup>

<sup>72</sup> Menurut Don C. Gibbons, tujuan dari mereka yang mendukung perkembangan peradilan anak bermaksud untuk menciptakan suatu struktur yang akan mengatur kebutuhan-kebutuhan anak lebih berupa treatment dan bukanlah penghukuman.  
Don C. Gibbons, *Society, Crime, Criminal Behavior*, Sixth Edition, Prentice Hall, New Jersey, 1992, hal 454

<sup>73</sup> Barda Nawawi Arief dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, op cit 112-113

<sup>74</sup> Johannes Andenaes dalam Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, op. cit, hal 83

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Sanksi Pidana Anak Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak**

Sebagaimana telah penulis kemukakan dalam bab sebelumnya bahwa, Kebijakan hukum pidana khususnya dalam hal merumuskan atau memformulasikan sanksi pidana anak merupakan kebijakan yang paling strategis dalam pengoprasionalisasikan hukum pidana, karena apabila tahap kebijakan legislatif ini terjadi kesalahan atau kelemahan maka dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap berikutnya yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi.

Menurut Marc Ancel didalam Barda Nawawi Arief, bahwa penal policy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada ahirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Sanksi Pidana Anak Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak**

Sebagaimana telah penulis kemukakan dalam bab sebelumnya bahwa, Kebijakan hukum pidana khususnya dalam hal merumuskan atau memformulasikan sanksi pidana anak merupakan kebijakan yang paling strategis dalam pengoprasionalisasikan hukum pidana, karena apabila tahap kebijakan legislatif ini terjadi kesalahan atau kelemahan maka dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap berikutnya yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi.

Menurut Marc Ancel didalam Barda Nawawi Arief, bahwa penal policy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada ahirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada

pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>1</sup>

Selanjutnya menurut Sudarto penal policy adalah bentuk pelaksanaan politik hukum pidana yaitu. usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.<sup>2</sup> Pendapat ini sebagai antisipasi dalam pembentukan KUHP baru.

Untuk menangani perkara yang tersangka atau terdakwa anak-anak telah terbentuk UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak, yang disahkan pada tanggal 3 januari 1997, dimuat dalam lembaran RI Tahun 1997 No. 3 dan Tambahan Lembaran Negara RI No. 3668. Undang-undang ini diberlakukan satu tahun setelah diundangkan, yakni mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1998<sup>3</sup>

Di dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak antara lain telah ditetapkan pengertian anak. Undang-undang ini juga berlaku secara *lex specialis* terhadap KUHP (WvS), khususnya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Lahirnya undang-undang Pengadilan Anak nantinya dapat menjadi acuan perumusan pasal-pasal KUHP Baru yang berhubungan

<sup>1</sup> Marc Ancel dalam Barda Nawai Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Citra Aditya, Bandung : 1996, hal 23, Periksa pula Marc Ancel, Sosial Defence, A Modern Approach to Criminal Problems, Routledge & Kegan Paul, London, 1965, hal 4-5

<sup>2</sup> Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal 93 & 109

<sup>3</sup> Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan, Jakarta, 2000, hal 11

dengan pidana dan tindakan bagi anak. Dengan demikian, tidak akan terjadi tumpang tindih ataupun saling bertentangan.

Pemerintah di dalam keterangannya di hadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat ketika rancangan undang-undang tersebut masih dalam tahap pembahasan, bahwa dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku yang menyimpang dilakukan anak sekali-sekali tidak boleh melupakan kedudukan anak dengan segala karakternya yang khusus dan perlu diwujudkan adanya suatu peradilan yang benar-benar memperhatikan kepentingan anak<sup>4</sup>

Di sini yang menjadi obyek dan subyek pelayanan dalam kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak dan kewajiban; motivasi seorang untuk ikut serta secara tekun dan gigih dalam setiap kegiatan perlindungan anak; pandangan bahwa setiap anak itu wajar dan berhak mendapat perlindungan mental, fisik dan sosial dari orang tua, anggota masyarakat dan negara.<sup>5</sup>

Gambaran di atas didasarkan pada pengertian dari citra yang tepat mengenai manusia, tidak terkecuali manusia yang disebut anak. Di sini masalah perlindungan anak adalah suatu masalah manusia

<sup>4</sup> Keterangan Pemerintah Dihadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengenai RUU tentang Peradilan Anak tanggal 1 Maret 1996.

<sup>5</sup> Shanti Delyana, **Wanita dan Anak Dimata Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal 15

yang merupakan kenyataan sosial.<sup>6</sup>

Kajian terhadap hal di atas jelas bagi mereka yang mempunyai citra yang tepat mengenai manusia dan kemanusiaan lebih mengerti apa yang dimaksud dengan membangun manusia seutuhnya, yang juga meliputi kegiatan perlindungan anak. Karena pengertian manusia yang tidak tepat akan menimbulkan suatu hambatan dalam kegiatan mengembangkan keadilan dan kesejahteraan pada umumnya dan kegiatan perlindungan anak pada khususnya.

Dimensi-dimensi yang mendasar dari hukum perlindungan anak, meliputi kedudukan sub sistem hukum antara seorang anak dengan sistem hukum yang mengatur manusia atau orang dewasa dalam kinerja hukum positif. Dalam cara pandang ini perlu diketahui status anak atau pengertian anak dalam karakteristik umum yang akan mengelompokkan status yang berbeda dari keadaan hukum dari orang dewasa. Artinya anak diletakkan ke dalam subjek hukum yang digolongkan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya, meskipun perbuatan yang dilakukan anak digolongkan sebagai bentuk kejahatan dan atau

---

<sup>6</sup> Arif Gosita, **Masalah Perlindungan Anak**, Akademika Presindo Jakarta, 1985, hal 15 berpendapat bahwa "... Alangkah baiknya kalau kita ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak bertitik tolak dari suatu pengertian tentang manusia sebagai berikut : yang dilindungi maupun yang melindungi siapa saja yang terlibat dalam masalah perlindungan anak, adalah manusia-manusia sesama kita yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan kita sebagai manusia yang berada dalam suatu masyarakat."

pelanggaran secara umum dan dapat dikenakan ketentuan hukum pidana atau hukum acara pidana itu sendiri.

Di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan. Dengan menyimak Pasal 23 ayat(1) dan ayat(2) diatur pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak nakal

#### 1. Pidana Pokok

- a) Pidana Penjara
- b) Pidana Kurungan
- c) Pidana Denda
- d) Pidana Pengawasan

#### 2. Pidana Tambahan

- a) Perampasan barang-barang tertentu
- b) Pembayaran Ganti Rugi

#### 3. Tindakan

- a) Mengembalikan kepada orang tua , wali atau orang tua asuh
- b) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
- c) Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan pembinaan dan latihan kerja.



Selain sanksi yang telah disebutkan, dalam UU No 3 tahun 1997 terdapat juga pidana bersyarat

## **1. Pidana Pokok**

### **a) Pidana Penjara**

Dalam praktek peradilan pidana, pidana penjara adalah salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan. Dilihat dari sejarahnya, penggunaan pidana penjara sebagai reaksi masyarakat sebagai akibat dari adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Roeslan Saleh mengemukakan bahwa "pidana penjara adalah pidana utama diantara pidana kehilangan kemerdekaan"<sup>7</sup>. Adapun menurut Barda Nawawi Arif, yang dimaksud dengan pidana penjara adalah suatu pidana yang berupa pembantasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan yang menyebabkan orang tersebut harus menaati semua peraturan tata tertib yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar. <sup>8</sup> Menurut Sahardjo pidana penjara adalah di samping menimbulkan rasa derita kepada narapidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing

---

<sup>7</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara, Jakarta, :1979, hal 7

narapidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi anggota masyarakat sosialis Indonesia yang beragama.<sup>9</sup>

Pada awalnya penjara merupakan suatu tempat di mana para terpidana dikumpulkan yang kemudian dalam perkembangannya penjara merupakan suatu tempat untuk memperbaiki penjahat. Adapun yang dimaksud dengan pidana penjara itu sendiri adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana hilang kemerdekaan yang dimaksud adalah tidak dapat berpergian dan kehilangan beberapa hak tertentu.<sup>10</sup>

Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 26 (1), paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi dewasa. Dalam perkara anak, didalam Undang-undang No. 3 tahun 1997 dirumuskan, bahwa batas maksimal ancaman pidana penjara dibedakan dengan orang dewasa. Batas maksimal ancaman pidana penjara untuk anak diatur lebih rendah dari pada ancaman pidana terhadap orang dewasa, karena memang situasi dan kondisinya tidak sama.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Penetapan Pidana Penjara Dalam Perundang-undangan Dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan*, Bandung:Desertasi, 1986, hal 75-76

<sup>9</sup> Andi Hamzah, Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta;1983, hal 96

Perikasa pula, Lobby Loqman, *Pidana dan Pidanaan*, Datacom, Jakarta, 2002, hal 62

<sup>10</sup> Ibid Andi Hamzah, Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, hal 47

<sup>11</sup> Ibid, Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, hal 87

Adanya perbedaan perlakuan dan ancaman pidana terhadap anak, dimaksudkan untuk lebih melindungi dan menganyomi anak agar dapat menyongsong masa depan yang masih panjang. Selain itu, juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jatidirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a UU No3 tahun 1997, paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana orang dewasa. Ketentuan ini hanya berlaku terhadap terdakwa yang berusia 12 - 18 tahun dan yang tidak melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, misalnya tindak pidana pencurian atau pemerasan maka hukuman yang dapat dijatuhkan maksimal adalah setengah dari ancaman pidana yang ditetapkan oleh pasal-pasal tersebut. Sedangkan bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) maka ancaman sanksi pidananya adalah 10 tahun penjara

Pidana yang penjara sebagai salah satu sanksi pidana yang paling sering digunakan.<sup>12</sup> Pidana penjara dilihat dari sejarahnya baru digunakan pada akhir abad ke-18 (delapan belas) yang bersumber pada paham individualisasi.<sup>13</sup> Walaupun dalam perkembangannya pidana penjara ini dapat dikatakan sebagai pidana yang telah menjadi milik dunia, namun dalam perkembangannya banyak yang mempersoalkan kembali tentang akibat yang tidak menguntungkan dari penggunaan pidana penjara ini. Akibat yang tidak menguntungkan ini dapat bersifat filosofis maupun praktis.<sup>14</sup> Ditinjau dari segi filosofis maka ada hal-hal yang saling bertentangan, yakni disatu pihak diusahakan untuk tumbuh sebagai instrumen reformasi narapidana dengan pendekatan yang manusiawi, namun dilain pihak sifat asli dari lembaga yang harus melakukan tindakan pengamanan dan pengendalian narapidana tidak dapat ditinggalkan begitu saja. Dilihat dari segi praktis kerugian tersebut tampak sebagaimana dilukiskan oleh Clemer,<sup>15</sup> bahwa penjara pada hakikatnya merupakan suatu masyarakat didalam suatu masyarakat, bahkan merupakan suatu sistim sosial yang informal yang disebut sub kultural narapidana. Melalui proses

<sup>12</sup> Hasil Penelitian dalam Desertasi Barda Nawawi Arief diperoleh gambaran bahwa sejak tahun 1973s/d 1982 sebanyak kasus dari 434.313 terdakwa dijatuhi pidana penjara.

<sup>13</sup> R.A. Koesnecan, *Politik Penjara Nasional*, Sumur, Bandung, 1961, hal 7-8

<sup>14</sup> Muladi, *Masalah-masalah Hukum No. 3 th. XVI 1986*, hal 10, tentang *Pelaksanaan Perampasan Pidana Kemerdekaan*

<sup>15</sup> Roger Hood & Richard Sparks, *Key Issues in Criminology*, World University Library, London, 1970, hal 217-227

sosialisasi yang disebut prisonisasi narapidana baru akan menjadi terpenjara dan makin lama pidana penjara dijalani, maka kecenderungan untuk menjadi penjahat makin besar. Pidana penjara oleh R.M. Jackson dipandang suatu jenis pidana yang kurang efektif, dalam penelitiannya dikemukakan bawa rata-rata angka pengulangan atau angka penghubungan kembali berbanding terbalik dengan usia pelaku. Angka yang tinggi terjadi pada anak-anak yaitu mencapai 50 % dan angka pengulangan tertinggi terjadi pada usia dibawah 21 tahun yaitu 70 %.<sup>16</sup> Dibanyak negara masalah efektifitas pidana penjara ini banyak mendapatkan kritikan dan ada kecenderungan untuk menggantikan lembaga pidana penjara dengan pidana yang lain <sup>17</sup>

Di samping itu pidana penjara dipandang tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan tetapi juga menimbulkan akibat negatif antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal, hilangnya kebebasan pribadi, kebebasan mandiri yang hilang. <sup>18</sup> Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang mengakibatkan juga hilangnya penghasilan. Kondisi yang demikian ini akan menimbulkan

<sup>16</sup> Jackson, *Enforcing the Law*, Pelican Books, 1972, hal 306-308

<sup>17</sup> Lihat Pula Konggres ke-4 mengenai Pencegahan Kejahatan dan Tindakan Terhadap Pelaku, 1975, no. 265

<sup>18</sup> Gresham M. Sykes, *The Painls of Punishment*, dalam Desertasi Barda Nawawi Arief

pengaruh buruk terhadap kehidupan anak-anak dan keluarganya. Terlebih adanya akibat cap jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak melakukan lagi kejahatan. Akibat yang lain juga sering dipandang menyebabkan turunnya tingkat derajat harga diri manusia, yang pada ahirnya akan menyebabkan hilangnya kepercayaan diri. Kritik yang cukup radikal dilihat dari sudut politik kriminal ialah adanya pernyataan bahwa orang tidak menjadi lebih baik tetapi justru menjadi lebih jahat setelah menjalani pidana penjara ini dikenakan kepada anak-anak atau remaja. Sehubungan dengan hal tersebut sering diungkapkan bahwa rumah penjara merupakan perguruan tingginya atau pabriknya kejahatan. Mengenai kritik terhadap pidana penjara ini, *The American Correctional Association* pada tahun 1959 telah mengemukakan bahwa pidana penjara yang dilaksanakan berdasarkan pandangan yang bersifat pembedaan semata-mata, akan lebih banyak menghasilkan penjahat dari pada mencegahnya. Dinyatakan selanjutnya, bahwa pidana penjara yang bersifat pembedaan saat ini bukanlah alat yang efektif.<sup>19</sup> Menurut Koesnoen, suatu politik perbaikan narapidana yang paling mengandung sifat pembedaan dan pembalasan tidak lagi mendapat sambutan. Rehabilitasi narapidana dalam suasana peri

---

<sup>19</sup> Ibid, Barda Nawawi Arief dalam Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara hal 42

kemanusiaan yang mempunyai tujuan pasti dari tiap politik kepenjaraan.<sup>20</sup> Kritik ini juga dilontarkan pada pidana penjara menurut pandangan retributif yang tradisional, sampai pada pandangan yang modern yang lebih mengacu pada perbaikan narapidana. Untuk mengurangi akibat yang tidak menguntungkan dengan adanya pidana penjara tersebut, maka ditempuh langkah-langkah pembaharuan hukum pidana baik sistem pemidanaannya maupun dalam kewenangannya di bidang pelaksanaan pidana penjara, baik yang bersifat universal (internasional) maupun khusus perbaikan seperti di Indonesia yaitu menghindarkan pengenaan pidana penjara dengan penetapan pidana pengawasan dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

#### **b. Pidana Kurungan**

Didalam Pasal 27 UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyebutkan bahwa pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi dewasa

Mengenai apakah yang dimaksud maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa adalah maksimum ancaman pidana kurungan terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan

---

<sup>20</sup> R.A. Koesnoe, Op. Cit, hal 71

ketentuan dalam KUHf atau undang-undang lainnya (penjelasan Pasal 27 UU No. 3 tahun 1997 )

Mengenai Pidana kurungan, menurut Roeslan Saleh dalam bukunya, Stelsel Hukum Pidana, "satu-satunya tujuan dari pidana kurungan adalah untuk menakutkan dan bukan untuk memperbaiki pelaku"<sup>21</sup>

Perbedaan utama antara pidana kurungan dan pidana penjara adalah bahwa orang yang dikenakan pidana kurungan tidak dapat dipindahkan kemana saja untuk menjalani pidananya tanpa persetujuan lebih dahulu, lain halnya dengan pidana penjara tidak dilakukan persejuaan lebih dahulu.

Perbedaan kedua adalah hak orang yang dipidana kurungan untuk memperbaiki keadaannya atas biaya sendiri, ini sering dinamakan pistole.

Perbedaan ketiga adalah berupa pidana yang lebih ringan dari pada pidana penjara.

### **c. Pidana Denda**

Pidana denda pada pokoknya mempunyai ketentuan batas maksimal sama dengan ketentuan batas maksimal pidana pidana penjara dan pidana kurungan. Terdakwa anak hanya dapat

---

<sup>21</sup> Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Yayasan Badan Penerbit Gajahmada ,Yogyakarta, 1962, hal 17



dijatuhi maksimal setengah dari pidana yang berlaku bagi orang dewasa.

Ketentuan Pasal 28 (1) UU Pengadilan Anak menyebutkan, bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada anak nakal paling banyak setengah dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.

Dalam menjatuhkan pidana denda, peranan hakim sangat penting. Setelah mengetahui tujuan pemidanaan, Hakim wajib mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada disekitar pembuat tindak pidana, apa dan bagaimana pengaruh dari perbuatan pidana yang dilakukan, pengaruh pidana yang dijatuhkan bagi sipembuat pidana dimasa mendatang, pengaruh tindak pidana terhadap korban serta banyak lagi keadaan lain yang perlu mendapatkan perhatian dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana.<sup>22</sup>

UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, mengatur pula ketentuan yang relatif baru yaitu apabila pidana denda tersebut ternyata tidak bisa dibayar maka dapat diganti dengan wajib latihan kerja. Undang-undang menetapkan demikian sebagai upaya untuk mendidik anak yang bersangkutan agar memiliki ketrampilan yang bermanfaat bagi dirinya.

---

<sup>22</sup> Ninik Suparni, Ekssistensi Pidana Denda Dalam Sistim Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta;1996, hal 49

Dalam kaitannya dengan wajib latihan kerja, perlu diciptakan koordinasi efektif dengan pekerja sosial sukarela dari organisasi kemasyarakatan. Ditegaskan melalui Pasal 34 UU Pengadilan Anak bahwa pekerja sosial bertugas membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Departemen Sosial untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Lama wajib latihan kerja sebagai pengganti denda, paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

Mengenai pidana denda juga bisa dipandang sebagai alternatif pidana pencabutan kemerdekaan. Sebagai sarana dalam politik kriminal, pidana ini tidak kalah efektifnya dari pidana pencabutan kemerdekaan. Berdasarkan pemikiran ini maka pada dasarnya sedapat mungkin denda itu harus dibayar oleh terpidana dan untuk pembayaran itu ditetapkan dengan tenggang waktu. Bilamana denda tidak dapat terbayar maka dikenakan pidana wajib latihan kerja. Mengingat bahwa tujuan pemidanaan yang tidak berupa pembalasan, maka dalam hal penjatuhan denda hakim harus memperhatikan kemampuan terpidana secara nyata.

Pelaksanaan pembayaran denda selama ini dirasakan kurang efektif dikarenakan masih tetap dipertahankannya sistim pelaksanaan pidana denda menurut pasal 30 dan 31 KUHP. Tidak

adanya pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda baik secara umum maupun dalam hal-hal khusus ( misalnya untuk denda yang dijatuhkan terhadap anak yang belum dewasa, yang belum bekerja atau masih dalam tanggungan orang tua )

Mengenai penetapan jumlah pidana denda perlu kiranya dipikirkan suatu perumusan dalam kebijakan legislatif yang lebih longgar. Hal ini mengingat pidana denda berbeda dengan jenis pidana pokok lainnya, merupakan jenis pidana yang bernilai uang dan mempunyai nilai ekonomis. Ini berarti setiap kebijakan legislatif yang menaikkan jumlah pidana denda, akan tetap mempunyai nilai relatif yang pada suatu waktu akan tetap dirasakan sebagai saksi pidana yang ringan. Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan pidana denda tidak cukup hanya dengan menempuh kebijakan legislatif berupa menaikkan atau meningkatkan jumlah besarnya ancaman pidana denda. Kebijakan legislatif yang perlu ditempuh harus mencakup keseluruhan sistim pelaksanaan sanksi pidana.

Kebijakan legislatif yang perlu dipertimbangkan dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan pidana denda antara lain meliputi :

- a) sistim penetapan jumlah atau besarnya pidana denda
- b) batas waktu pelaksanaan pembayaran denda
- c) tindakan-tindakan paksaan yang dapat menjamin terlaksananya pembayaran denda

Pelaksanaan pidana denda dalam hal-hal khusus (misal terhadap anak yang belum dewasa dan masih menjadi tanggungan orang tua) Pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda.

#### d. Pidana Pengawasan

Seperti penulis kemukakan sebelumnya bahwa dari keempat macam pidana pokok dalam UU Pengadilan Anak, pidana pengawasan merupakan jenis pidana baru yang khusus untuk terpidana anak. Yang dimaksud dengan "pidana pengawasan" adalah pidana yang khusus dikenakan kepada anak yakni pengawasan yang dilakukan oleh jaksa terhadap perilaku anak tersebut dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan<sup>23</sup>, jadi pidana pengawasan, bukan merupakan pidana penjara atau pidana kurungan yang dilaksanakan di rumah terpidana tetapi berupa pengawasan terhadap terpidana selama beberapa waktu yang ditetapkan oleh keputusan pengadilan.<sup>24</sup>

Di dalam menjalani pidana pengawasan, anak yang bermasalah dikembalikan kepada orang tuanya atau orang lain yang menjalankan kekuasaan orang tua, dalam hal orang tuanya

---

<sup>23</sup> UU No. 3 Tahun 1997, Bahan Pokok Penyuluhan Hukum Departemen Kehakiman RI 1997/1998

<sup>24</sup> Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, op. cit, hal 31

tidak ada, seperti wali atau orang tua asuh. Pengawasan yang dilakukan terhadap perilaku anak sehari-hari, dengan tujuan untuk mengembalikan anak tersebut kedalam kehidupan normal dan sekaligus mencegah terjadinya penanggulangan dalam melakukan tindak pidana. Untuk itu, selama menjalani pidana pengawasan anak yang bersangkutan memperoleh bimbingan dari pembimbing kemasyarakatan<sup>25</sup>

Ketentuan dan bentuk tata cara pelaksanaan pidana pengawasan menurut UU No. 3 tahun 1997 akan diatur lebih lanjut dengan pengaturan pemerintah. Adapun materi yang diatur dalam peraturan pemerintah tersebut hendaknya nanti harus tetap berpedoman pada UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak khususnya pada Pasal 30.

Pidana pengawasan dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Lamanya, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- b. Pengawasan terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari dirumah anak tersebut dilakukan oleh jaksa.
- c. Pemberian bimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan

---

<sup>25</sup> Abdul Wahid, Laporan ahir Tim Naskah Akademid Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana pengawasan, BPHN,

Didalam praktek yang perlu diingat adalah adanya persamaan persepsi, kerja sama dan koordinasi diantara aparat tersebut, yakni :

- a. Persamaan persepsi bahwa pengawasan dan bimbingan dilakukan dalam upaya pembinaan anak dengan mengingat pertumbuhan, perkembangan fisik, mental dan sosial anak.
- b. Kerjasama dan koordinasi yang dilakukan dengan baik dan seimbang yakni jangan sampai pengawasannya menonjol dibandingkan bimbingannya. Apabila dapat dilakukan, yaitu pengawasan yang beraspek bimbingan yang tidak meninggalkan aspek pengawasan
- c. Bentuk-bentuk pengawasan dan bimbingan perlu dirumuskan secara tepat.
- d. pengawasan apakah dengan anak yang melapor ataukah jaksa yang datang kerumah atau tempat tinggal anak. Demikian juga bentuk bimbingan, apakah bentuk fisik, ketrampilan atau mental atau rohani.
- e. Dalam memberikan bimbingan tidak ada salahnya apabila ada kerjasama dengan Departemen Agama, Departemen Sosial, Departemen Tenaga Kerja atau pihak-pihak lain yang dapat menunjang keberhasilan bimbingan.<sup>26</sup>

Pidana pengawasan dalam UU No. 3 tahun 1997 dalam pembentukannya banyak mendapatkan kritikan dari anggota dewan karena ketidaksetujuan mereka apabila pidana pengawasan dicantumkan sebagai salah satu pidana pokok yang dijatuhkan kepada anak nakal

Meskipun dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang sampai dengan disahkannya UU No 3 tahun 1997 pencantuman pidana pengawasan banyak mendapatkan kritikan,

pada ahirnya mereka (anggota dewan ) sepakat untuk tetap mencantumkan pidana pengawasan tersebut. Anggota Dewan berpendapat bahwa, pidana pengawasan yang diusulkan oleh pemerintah tidak pernah dikenal selama ini dalam KUHP khususnya Pasal 10 KUHP (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda)<sup>27</sup>

Dalam praktek (das sein)nya, pidana pengawasan akan menemui kesulitan teknis, sebab melibatkan Kejaksaan atau Bapas untuk mengawasi. Menurut UU Kejaksaan bahwa kejaksaan yang terbawah yaitu kejaksaan negeri yang berdomisili di Ibukota Kabupaten ataupun Kotamadia. Untuk seorang terpidana yang tinggalnya sangat jauh maka berapa jumlah jaksa yang harus disiapkan. Dari segi kewenangan disebutkan dalam Pasal 30 bahwa dalam suatu putusan pengadilan disebutkan Jaksa ataupun Bapas selaku pengawas. Jadi akan terjadi dobel pengawasan, pengawasan sebagai vonis pidana pengawasan. Kedua sebagai tugas pengawasan. Dengan demikian setelah masuk Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) masih ada juga pengawasan atau mungkin ditempatkan diluar Lapas.

Terhadap kritikan akan ketakutan menemui kesulitan dalam pelaksanaan pidana pengawasan , menurut penulis perlu

---

<sup>26</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal 32

<sup>27</sup> Notulen Rapat Anggota Dewan RI

dipertanyakan kembali, apakah benar akan menemui kesulitan, karena pidana pengawasan ini belum pernah dijalankan. Selain itu mengenai bagaimana bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana Pengawasan, dapat dilihat (sebagai gambaran) Laporan Akhir Tim Naskah Akademis dari BPHN Tahun 1999/2000 sebagai bahan rekomendasi bagi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 3 tahun 1997 Pasal 23 ayat (4). Dalam mencari bentuk-bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pengawasan tetap bertitik tolak pada usaha pencapaian tujuan untuk memperbaiki perilaku anak dalam menjalani kehidupan sosialnya serta untuk mencegah anak yang bersangkutan untuk tidak melakukan pengulangan pidana, di samping diharapkan pula mampu menimbulkan prevensi umum (general prevention) bagi anak yang lain agar tidak menjadi anak nakal.

#### **e. Pidana Bersyarat**

Selain pidana pokok yang telah penulis kemukakan, di dalam UU No. 3 tahun 1997 dikenal adanya pidana bersyarat dalam Pasal 29 ayat 1 pidana bersyarat ini dapat dituhkan oleh hakim apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Maksimal dua tahun tersebut bukan besarnya ancaman pidana dari suatu ketentuan undang-undang yang berlaku bagi anak,

UPT-PUSTAK-UNDIP



akan tetapi pidana maksimal yang dijatuhkan hakim khusus untuk pidana bersyarat.

Dalam putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat tersebut, undang-undang menghendaki supaya hakim menentukan dua macam syarat, yaitu:

(1). Syarat umum

Bahwa anak nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat. Apabila melakukan tindak pidana lagi, maka berlaku ketentuan di atas, wajib menjalani hukuman pidananya setelah ada perintah dari hakim.

(2). Syarat khusus

Syarat khusus dimaksudkan sebagai penentuan sikap untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim, dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.

Syarat khusus ini dapat berupa terpidana tidak boleh mengemudikan kendaraan bermotor atau diwajibkan mengikuti kegiatan yang diprogramkan oleh Balai Pemasyarakatan, Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus harus lebih pendek dari pada masa pidana bersyarat bagi syarat umum.

Adapun mengenai jangka waktu masa pidana bersyarat, sebagai mana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 6 Undang-undang Pengadilan Anak maksimal selama tiga tahun.

Selama menjalani masa pidana bersyarat, pengawasannya dilakukan oleh kejaksaan. Sedangkan pembimbing kemasyarakatan yang melakukan bimbingan terhadap terpidana, dengan maksud agar anak tersebut menempati persyaratan yang telah ditentukan. Terpidana yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan dan statusnya sebagai klien pemasyarakatan.

Selama anak nakal tersebut berstatus sebagai klien pemasyarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah. Kalau terpidana anak masih tercatat sebagai pelajar ia tetap meneruskan sekolahnya. Meskipun diperbolehkan sekolah, syarat umum dan syarat khusus yang ditetapkan dalam putusan pengadilan wajib tetap dijalankan oleh terpidana.

Masalah yang belum jelas adalah adanya keterkaitan antara pidana pengawasan dan pidana bersyarat dalam Pasal 29. Menurut Pasal 29 (5) dalam hal dijatuhkannya pidana bersyarat, jaksa melakukan pengawasan dan pembimbing kemasyarakatan melakukan bimbingan selama pidana bersyarat dijalani. Jadi di sini ada ketidakjelasan antara pidana bersyarat (Pasal 29 ) dengan pidana pengawasan ( Pasal 30 ), karena terlihat adanya kemiripan

antara kedua jenis pidana itu. Patut dicatat, bahwa menurut konsep KUHP Baru pidana pengawasan pada hakikatnya adalah pidana yang diberikan dengan syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu, ketentuan mengenai pidana bersyarat dalam Konsep ditiadakan. Masalah lain adalah, tidak adanya pedoman penjatuhan pidana pengawasan dalam UU No 3 tahun 1997. Untuk pidana bersyarat ada pedoman di dalam Pasal 29 ayat 1 yaitu apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 2 tahun. Jadi jelas pidana bersyarat dikaitkan dengan pidana pokok "penjara". Ketentuan yang demikian tidak ada dalam Pasal 30, sehingga dapat dipermasalahkan apakah pidana pengawasan dapat dijatuhkan terhadap semua jenis pidana yang diancamkan atau dijatuhkan oleh hakim ( yaitu penjara, kurungan atau denda). Apakah dapat dikenakan untuk semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau hanya untuk pidana tertentu.

## **2. Pidana Tambahan**

### **a. Perampasan barang-barang tertentu**

UU No 3 tahun 1997 tidak memberikan penjelasan barang apa saja yang dapat dirampas.

Dalam KUHP barang-barang bukti yang dapat dirampas adalah barang bukti yang diajukan dimuka persidangan. Barang-barang bukti berasal hasil penyitaan yang dilakukan oleh penyidik

karena barang-barang itu ada hubungannya dengan perkara pidana. Barang-barang yang dirampas ada tujuannya, yaitu dirampas untuk kepentingan negara atau dirampas untuk dimusnahkan.

Dalam praktek tidak ada hakim yang memutus perkara pidana dengan menetapkan suatu barang bukti untuk dirampas (saja), pasti ada kepentingan yang menyebabkan suatu barang bukti itu dirampas. Apabila barang bukti yang nyata-nyata diajukan dipersidangan, hakim berpendapat bahwa barang tersebut milik terpidana atau orang lain yang diperoleh dari tindak pidana, berhubungan dengan terwujudnya tindak pidana, barang digunakan dalam persiapan melakukan tindak pidana, dipergunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana dan barang yang khusus dibuat atau diperuntukkan dalam mewujudkan tindak pidana maka hakim akan menetapkan tindakan perampasan barang.<sup>28</sup>

#### **b. Pembayaran Ganti Rugi**

Dalam Penjelasan Undang-undang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa pembayaran ganti rugi yang dijatuhkan sebagai pidana tambahan merupakan tanggung jawab dari orang tua atau orang lain yang menjalankan kekuasaan orang tua. Jika terdapat pidana yang demikian, tetapi orang tuanya atau orang

yang menjalankan kekuasaan orang tua tidak mau membayar ganti rugi bagaimana?

Terhadap pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi di dalam Undang-undang Pengadilan Anak eksekusinya tidak seperti yang dilakukan dengan melakukan sita eksekusi barang-barang milik terpidana untuk dilelang dan hasilnya untuk membayar ganti rugi dan sisanya dikembalikan. Eksekusi terhadap terpidana anak tetap dilakukan oleh kejaksaan, namun kejaksaan tidak mempunyai hak untuk melakukan sita eksekusi, karena sita eksekusi tidak dikenal dalam perkara pidana., hanya pada perkara perdata saja. Penyitaan dalam perkara pidana hanya ada pada tahap penyidikan dan dilakukan oleh penyidik. Kejaksaan tidak mungkin dapat memaksa terpidana ( dengan upaya menurut hukum) pembayaran ganti rugi tersebut. Wajar bila dibuat peraturan pelaksanaan yang sejalan dengan hukum acara pidana yang berlaku, sehingga tidak saling bertentangan.

### 3. Tindakan

Dalam sistim pidana kita menganut dua sistim jalur, atau apa yang dikenal dengan "*double track system*" yaitu bahwa dalam sistim pembedaan digunakan dua jenis sanksi, ialah pidana (*starf, punishment*) dan tindakan (*measure, maatregel*). Sanksi pidana dimaksudkan terutama pada perlindungan masyarakat, sedang

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta B

tindakan ditujukan pada pelanggar hukum untuk pembinaannya kearah kehidupan yang lebih baik dan berguna baik bagi masyarakat atau kehidupan pribadinya.

Di dalam Undang-undang No . 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bentuk dari tindakan adalah sebagai berikut:

**a. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh**

Apabila anak nakal menurut putusan pengadilan dikembalikan kepada orang tua atau orang tua asuhnya, bukan berarti sepenuhnya dibawah pengawasan orang tua tersebut akan tetapi anak yang bersangkutan tetap berada dibawah pengawasan dan bimbingan kemasyarakatan.

**b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja**

Dalam suatu perkara anak nakal, apabila hakim berpendapat bahwa orang tua atau orang tua asuhnya tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik maka hakim dapat menetapkan anak tersebut untuk ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Latihan kerja dimaksudkan untuk memberikan bekal ketrampilan kepada anak, misalnya dengan memberikan ketrampilan mengenai pertukangan, pertanian, perbengkelan dan sebagainya sehingga setelah selesai tindakan dapat menjalani hidup yang mandiri.

**c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan pembinaan dan latihan kerja.**

Pada prinsipnya pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, diselenggarakan oleh pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Departemen Sosial, akan tetapi dalam hal kepentingan anak menghendaki, hakim dapat menetapkan anak yang bersangkutan diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, seperti pesantren, panti sosial dan lembaga sosial lainnya dengan memperhatikan agama anak yang bersangkutan

Penjatuhan sanksi hukum berupa tindakan dalam Pasal 24 ayat 2 UU No. 3 tahun 1997 mengemukakan bahwa dalam menjatuhkan tindakan dapat pula disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditentukan oleh hakim. Adapun yang dimaksud dengan teguran adalah peringatan dari hakim baik secara langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun secara langsung melalui orang tua, wali, orang tua asuhnya, agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatan yang mengakibatkan ia dijatuhi tindakan.

Teguran disini bukanlah sebagai pidana maupun tindakan. Pengaturan yang demikian tentu saja sangat disayangkan, karena dengan pengaturan yang demikian teguran bukan ditetapkan sebagai jenis pidana, juga bukan sebagai tindakan, hanya sebagai

tambahan saja dari tindakan yang dapat diberikan hakim kepada anak nakal, sama halnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada pembimbing kemasyarakatan

Dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, Hakim harus memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Di samping itu, hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga dan keadaan lingkungannya. Demikian pula, Hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan.

Adapun jenis tindakan yang dijatuhkan kepada anak berdasar UU No 3 tahun 1997 Pasal 24 ayat 1 ternyata lebih sempit apabila dibandingkan dengan Rumusan Rancangan KUHP Baru. Rumusan pegenaan tindakan terhadap anak (Pasal 132 Rancangan KUHP) adalah:

- a) Pengembalian kepada orang tua, wali atau pengasuhnya.
- b) Penyerahan kepada pemerintah atau seseorang
- c) Keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau suatu badan swasta
- d) Pencabutan surat ijin mengemudi
- e) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- f) Perbaikan akibat tindak pidana



- g) Rehabilitasi
- h) Perawatan didalam suatu lembaga

Sistim pertanggung jawaban pidana anak (termasuk pemberian "tindakan") di dalam UU No 3 tahun 1997 pada dasarnya masih sama dengan sistim pertanggungjawaban orang dewasa, yaitu berorientasi pada si pelaku secara pribadi atau individual. Jadi menganut sistim pemidanaan atau "pertanggungjawaban individual atau personal" (*individual atau personal responsibility*).

Adapun mengenai hal ini dapat dikemukakan jawaban sebagai berikut

- a) Merupakan prinsip umum yang wajar bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi, yaitu hanya dikenakan kepada orang atau si pelaku itu sendiri (asas personal) dan hanya dikenakan kepada orang yang bersalah (asas kesalahan atau asas culpabilitas)
- b) Penerapan prinsip umum pemidanaan yang demikian (pertanggungjawaban individual) terhadap orang dewasa merupakan hal yang wajar, karena memang orang dewasa sudah selayaknya dipandang sebagai individu yang bebas dan mandiri serta bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya. Namun penerapan prinsip umum ini kepada anak masih patut dikaji, karena anak belum dapat

dikatakan sebagai individu yang mandiri secara penuh. Oleh karena itu penerapan prinsip umum ini harus dilakukan sangat hati-hati dan selektif dengan mengingat tingkat kematangan atau kedewasaan setiap anak yang berbeda. Di samping itu, mengingat adanya sifat "independensi" (ketergantungan atau ketidakbebasan penuh) pada diri anak, maka penerapan prinsip umum inipun seyogyanya diimbangi dengan kemungkinan adanya "pertanggungjawaban pengganti" (*vicarious Liability*) yang ditujukan kepada orang lain.

- c) Didalam UU No. 3 tahun 1997 belum diatur secara tegas tentang percobaan, penyertaan dan pembantuan, hal ini merupakan suatu tindak pidana walaupun yang dilakukan lebih dari satu orang.
- d) Bertolak dari uraian diatas, ada baiknya dikembangkan gagasan untuk mengimbangi sistim pemidanaan atau pertanggungjawaban individual itu dengan sistim pertanggungjawaban struktural atau fungsional. Salah satu kelemahan atau keterbatasan sistim pemidanaan individual dalam upaya penggulungan kejahatan yang sifatnya sangat "fragmentair", yaitu melihat upaya pencegahan atau penggulungan kejahatan dari sudut individu pelaku saja. Sasaran utamanya lebih ditujukan

pada pencegahan individu agar tidak melakukan tindak pidana. Jadi kurang menekankan pada upaya penanggulangan kejahatan secara struktural dan fungsional. Strategi demikian patut dipermasalahkan dalam menghadapi masalah kejahatan atau tindak pidana anak. Masalahnya adalah apakah cukup kejahatan anak ditanggulangi hanya dengan memidana atau menindak si anak, padahal "masalah anak" lebih merupakan masalah struktural. Terlebih karena sifat kemandirian dan ketergantungan (indepensi) si anak, maka anak yang melakukan kenakalan atau kejahatan sebenarnya adalah "korban struktural" atau "korban lingkungan". Oleh karena itu sepantasnya dikembangkan pemikiran atau gagasan atau strategi "pertanggungjawaban struktural atau fungsional". Artinya, pemidanaan tidak hanya berfungsi untuk mempertanggungjawabkan dan membina (melakukan "*treatment*") si anak sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga berfungsi untuk mempertanggungjawabkan dan membina atau mencegah pihak-pihak lain yang secara struktural atau fungsional mempunyai potensi dan kontribusi yang besar untuk terjadinya kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Ibid Barda Nawawi Arief'd, *peradilan Anak Di Indonesia* hal 70

### **E. Kebijakan Sanksi Pidana Anak Pada Masa Akan Datang**

Setelah membahas sanksi yang terdapat dalam Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maka uraian berikut akan membandingkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan sebelumnya yaitu KUHP, peraturan perundang-undangan tentang anak yang ada didalam Konsep KUHP serta Peraturan perundang-undangan tentang anak diberbagai KUHP Asing.

#### **1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana**

Di dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang anak yaitu Pasal 45,46,47 KUHP. Dengan dikeluarkannya UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan Anak serta ditegaskan dalam Pasal 67 ketentuan tersebut dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Walaupun pasal yang terdapat dalam KUHP tidak berlaku lagi, apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak terdapat dalam UU yang baru maka tetap diberlakukan KUHP sebagai aturan induk.

#### **2. KONSEP RUU KUHP Tahun 1999/2000**

Di dalam Konsep RUU KUHP ini diatur secara khusus mengenai anak di dalam bagian keempat Buku I, Bab III, Pasal 106-123. Ketentuan khusus untuk anak dikelompokkan ke dalam dua bagian

a. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana anak (pasal 106-pasal 108 ), Konsep mengatur tentang :

- (1) "Batas usia pertanggungjawaban pidana" (*"the age of criminal responsibility"*) bagi anak, yaitu antara 12-18 tahun (Pasal 106)

Di dalam penjelasan ditegaskan; bahwa ketentuan ini mengatur tentang batas umur minimum untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana bagi seorang anak yang melakukan tindak pidana. Penentuan batas usia 12 (dua belas) tahun didasarkan pada pertimbangan psikologis yaitu kematangan emosional, intelektual dan mental anak.

Seorang anak dibawah umur 12 (dua belas) tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan karena itu penyelesaian kasusnya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan lainnya (terdapat didalam penjelasan Pasal 106 Konsep RUU KUHP tahun 1999/2000) .

Batas umur maksimum 18 (delapan belas) tahun untuk dapat diajukan ke pengadilan anak, adalah sesuai dengan umur kedewasaan anak, agar bagi mereka dapat diterapkan ketentuan mengenai anak.

- (2) Penundaan atau penghentian peradilan pemeriksaan dimuka pengadilan ) bersyarat bagi anak (pasal 107)

Mengingat jiwa anak yang masih peka dan labil, maka sedapat mungkin anak sebagai pembuat tindak pidana dihindarkan dari pemeriksaan sidang di pengadilan.

- (3) Tidak berlakunya ketentuan *recidive* sebagai alasan pemberatan pidana bagi anak (Pasal 108)

Mengingat bahwa penanggulangan tindak pidana (*recidive*) yang dilakukan oleh anak pada umumnya disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan bukan karena bakat jahat dari anak itu sendiri, maka pemberatan pidana pada penanggulangan tindak pidana yang dilakukan anak tidak perlu dilakukan

- b. Ketentuan mengenai "pidana dan tindakan" untuk anak (pasal 109- pasal 123). Konsep menentukan pidana terdiri dari :

- (1) Pidana Pokok

Terdapat didalam Pasal 109 ayat 1 yang memuat jenis-jenis pidana bagi anak yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Hakim dapat memilih pidana yang dianggap tepat sesuai dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan dan sifat anak yang bersangkutan. Sehingga jenis pidana pokok bagi anak yang terdapat dalam pasal ini disusun dari yang

paling ringan dan secara bertahap ke pidana yang berat, adapun jenisnya adalah sebagai berikut:

### 1.1 Pidana nominal

Pidana nominal merupakan jenis sanksi paling ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan bagi anak. Adapun pidana nominal ini terbagi menjadi :

#### 1.1.1 Pidana peringatan

Yang dimaksud dengan “pidana peringatan” adalah pemberian nasehat kepada anak agar menjauhi perbuatan negatif (penjelasan Pasal 110)

#### 1.1.2 Pidana teguran keras

Yang dimaksud dengan pidana teguran keras tidak hanya sekedar memberi nasehat, melainkan anak diberi peringatan keras (penjelasan Pasal 110)

### 1.2 Pidana dengan syarat yang terdiri dari

1. pidana pembinaan di luar lembaga
2. pidana kerja sosial
3. pidana pengawasan.

Ketentuan dalam pasal ini mengatur mengenai pidana dengan syarat. Dalam hukum pidana dengan syarat, diartikan bahwa hakim tidak menjatuhkan penjara, tapi berupa pidana pembinaan di luar lembaga berupa

pidana kerja sosial atau pidana pengawasan. Pidana kerja sosial dapat diterapkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan denda ringan. Salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan dalam penjatuhan pidana kerja sosial adalah harus ada persetujuan dari terdakwa. Pidana kerja sosial ini tidak dibayar karena sifatnya sebagai pidana (*work as penalty*), oleh karena itu pelaksanaan pidana ini tidak boleh mengandung hal-hal yang bersifat komersial. Riwayat sosial terdakwa diperlukan untuk menilai latar belakang terdakwa serta kesiapan yang bersangkutan baik secara fisik maupun mental dalam menjalani pidana kerja sosial.

Pelaksanaan pidana pengawasan ini dikaitkan dengan ancaman pidana penjara. Pidana pengawasan bersifat "*non custodial*", "*probation*" atau pidana penjara bersyarat yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana lama. Pidana ini merupakan alternatif dari pidana penjara dan tidak ditujukan untuk tindak pidana yang berat sifatnya.

Pada waktu menjatuhkan salah satu pidana tersebut, hakim menentukan syarat-syarat baik umum maupun khusus, yang harus dipenuhi dalam jangka waktu



tertentu. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka dapat dilakukan perpanjangan waktu menjalani pidana tersebut.

### 1.3 Pidana denda

Pada dasarnya pidana denda harus dibayar oleh anak itu sendiri sehingga pidana itu dapat dirasakan oleh si anak. Oleh karena itu, pidana denda dijatuhkan pada anak yang telah berusia 16 (enam belas) tahun, yaitu mereka yang telah layak bekerja, dengan batas usia kerja 14 (empat belas) tahun.

### 1.4 Pidana pembatasan kebebasan

Merupakan pidana terberat dibandingkan dengan pidana lainnya, maka pidana ini dijatuhkan sebagai upaya terakhir. Selain itu juga ditentukan dengan syarat-syarat secara rinci sehingga hakim dapat memilih dengan tepat alasan penjatuhan pidana pembatasan kebebasan

Adapun mengenai pidana pembatasan kebebasan terdiri dari:

#### 1.4.1 Pidana pembinaan didalam lembaga

Pidana pembinaan didalam lembaga dilaksanakan baik dalam lembaga yang diselenggarakan oleh

pemerintah maupun oleh swasta. Namun jika keadaan perbuatan anak yang bersangkutan ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan anak. Lama pembinaan dalam lembaga sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Terhadap pidana ini dapat pula dikenakan pembebasan bersyarat, yaitu paling lama setelah menjalani setengah ( $1/2$ ) dari lamanya pembinaan yang ditentukan oleh hakim, dengan syarat berkelakuan baik.

#### 1.4.2 Pidana penjara

Pidana penjara bagi anak dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Ancaman pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan kepada anak, dengan harapan anak tersebut masih dapat dibina untuk diperbaiki baik budi pekerti maupun ahlakunya. Pidana penjara untuk anak paling lama 10 (sepuluh) tahun dianggap telah cukup untuk membina anak dalam kehidupan yang selanjutnya.

#### 1.4.3 Pidana tutupan

Pidana tutupan merupakan cara pelaksanaan pidana penjara. Kemungkinan dapat terjadi bahwa anak yang mendekati 17 (tujuh Belas) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun telah ikut dalam kegiatan politik atau tindakan yang bersarkan keyakinan yang patut dihormati, maka terhadap anak tersebut dapat pula dikenakan pidana tutupan.

## (2) Pidana Tambahan

Terdapat didalam Pasal 109 ayat 2), yang terdiri dari :

- a. Perampasan barang-barang tertentu dan atau tagihan;
- b. Pembayaran ganti kerugian; atau Pemenuhan kewajiban adat

Selain pidana pokok dan pidana tambahan di dalam Konsep RUU KUHP terdapat pula tindakan yang terdapat dalam Pasal 122, terdiri dari :

- a. Untuk anak yang tidak atau kurang mampu bertanggung jawab (Pasal 122 ayat 1):
- b. Perawatan di Rumah Sakit Jiwa
- c. Penyerahan kepada pemerintah; atau
- d. Penyerahan kepada seseorang
- e. Untuk anak yang mampu bertanggung jawab (dapat dijatuhkan tanpa pidana pokok ) Pasal 122 ayat 2:

- f. Pengembalian kepada orang tua atau wali atau pengasuhnya
- g. Penyerahan kepada pemerintah
- h. Penyerahan kepada seseorang
- i. Keharusan mengikuti latihan (oleh pemerintah atau swasta)
- j. Pencabutan SIM
- k. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- l. Perbaikan akibat tindak pidana
- m. Rehabilitasi ;dan atau
- n. Perawatan di lembaga

Menurut Pasal 123, pelaksanaan ketentuan mengenai tindakan dalam Pasal 122 diatas, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

### 3. KUHP BELANDA

Ketentuan-ketentuan khusus untuk anak yang melakukan tindak pidana, diatur tersendiri dalam Bab VII KUHP Belanda. Bab baru ini dimasukkan kedalam *WvS Nederland* pada tahun 1961 berdasarkan UU No. 9 Nopember 1961, S. 402 dan telah

mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan UU-7-7-1994, Stb. 1994 No. 528<sup>30</sup>

Jenis Pidana yang terdiri dari :

(1) Pidana pokok (*principal penalties*)

Pasal 77 h (1), terdiri dari :

- a. Untuk kejahatan; kurungan atau denda
- b. Untuk pelanggaran; denda;

(2) Sanksi Alternatif (*alternative sanction*)-pengganti pidana pokok

Pasal 77 h (2), terdiri dari:

- a. Kerja sosial;
- b. Memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana
- c. Mengikuti proyek pelatihan

(3) Pidana Tambahan (*Additional penalties*)

Pasal 77 h (3) terdiri dari :

- a. Perampasan barang;
- b. Pencabutan SIM;

(4) Tindakan (*measures*)

Pasal 77 h (4) terdiri dari :

- a. Penempatan pada lembaga khusus untuk anak
- b. Penyitaan

---

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 11

c. Perampasan keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum;

d. Kompensasi (ganti rugi)

Ada tiga klasifikasi umur yang diterapkan dalam KUHP Belanda ini yaitu:

a. Pasal 77a berisi :

Pidana ini tidak dapat diterapkan pada seseorang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum 18 tahun pada saat tindak pidana ini dilakukan. Tetapi menggunakan ketentuan-ketentuan khusus dalam Pasal 77d-77g;

b. Pasal 77 b berisi :

Dalam hal seseorang telah mencapai usia 16 tahun, tetapi belum 18 tahun pada saat delik dilakukan, hakim dapat tidak menerapkan Pasal 77g-77gg dan memberlakukan ketentuan dalam bab terdahulu, apabila ada alasan berdasarkan kualitas atau bobot delik (*the gravity of the offence*), sifat atau karakter pembuat (*the character of the offender*), atau keadaan-keadaan pada waktu delik dilakukan (*the circumstances in which the offence was committed*).

c. Dalam hal seseorang telah mencapai usia 18 tahun tetapi belum 21 tahun pada saat delik dilakukan, hakim dapat menerapkan Pasal 77g-77gg apabila ada alasan berdasarkan sifat atau

karakter si pembuat (*the character of the offenders*) atau keadaan-keadaan pada saat delik dilakukan.

1.1 Pidana "kurungan anak" (*juvenile detention*) akan dilaksanakan di dalam lembaga penjara yang dirancang untuk tujuan itu oleh Menteri Kehakiman. Pasal 22 dapat diterapkan. Tindakan berupa "penempatan disuatu lembaga untuk remaja" harus dilaksanakan sesuai dengan pasal 37c

Diaturnya tentang batas waktu daluwarsa penuntutan dalam Pasal 70, untuk kejahatan dikurangi separuh dari tenggang waktu yang berlaku. Tetapi ketentuan ini tidak berlaku untuk kejahatan dalam pasal 240b dan 242-250ter, yang dilakukan terhadap anak oleh orang yang telah mencapai usia 16 tahun pada saat delik dilakukan. Ini merupakan aturan baru karena didalam KUHP Belanda sebelum perubahan tidak ditemukan.

Kurungan anak dijatuhkan minimal 1 hari dan maksimal 12 bulan dalam hal seseorang belum mencapai usia 16 tahun pada saat kejahatan dilakukan dan masimal 24 bulan. Kurungan anak ini ditetapkan dalam hari, minggu dan bulan. Pelaksanaan kurungan anak dilembaga negara atau fasilitas yang ditentukan dalam Pasal 65 UU Pemberian Bantuan pada Anak (*Wet op de*

124

*jeugdhupeverlening*) yang disubsidi untuk tujuan itu oleh Menteri Kehakiman.

Di dalam kasus-kasus yang khusus Menkeh dapat memerintahkan bahwa pelaksanaan kurungan anak dipecah atau diselang seling dalam suatu periode yang tidak lebih dari 3 bulan, Seseorang yang sedang menjalani kurungan anak dapat meninggalkan lembaga untuk sementara apabila dapat memenuhi jaminan yang telah ditentukan.

Hakim yang menjatuhkan pidana dapat setiap saat melepaskan anak yang berada dalam kurungan anak untuk dapat memperoleh pelepasan bersyarat (*parole*). Dalam hal pelepasan bersyarat (*parole*) lamanya waktu pengawasan ditetapkan tidak lebih dari 2 tahun. Informasi mengenai lamanya waktu pengawasan dan persyaratan yang ditetapkan harus disampaikan secara pribadi kepada terpidana.

Pejabat penuntut Umum atau terpidana dapat mengajukan permohonan kepada hakim yang menjatuhkan pidana kurungan anak, agar pidana yang dijatuhkan itu seluruhnya atau sebagian diganti dengan salah satu jenis pidana dalam Pasal 9 ayat 1, apabila pelaksanaan pidana yang dijatuhkan itu atau sebagian



125

berlangsung atau terjadi dimana terpidana telah mencapai umur 18 tahun dan apabila hakim berpendapat bahwa pidana itu tidak lagi tepat untuk terdakwa.

- 1.2 Denda yang dijatuhkan tidak kurang dari NGL 5 dan tidak lebih dari NGL 5000. Denda ini dapat dicil apabila hakim harus dapat menetapkan jumlah pada setiap cicilan. Apabila pidana denda ini telah dijatuhkan dan pembayaran penuh (*full payment*) maupun biaya pemulihan atau ganti rugi secara penuh (*full recovery*) tidak terjadi, hakim dapat memerintahkan "kurungan anak" sebagai pidana pengganti atau atas permintaan terpidana, mengenakan "sanksi alternatif" sebagai pidana pengganti berupa kurungan anak apabila pidana itu telah dilaksanakan dan harus dilaksanakan pada tempat yang telah ditentukan oleh penuntut umum.

Sanksi alternatif pidana denda ini harus dikenakan secara proporsional dengan jumlah denda atau biaya pemulihan yang belum dipenuhi (*the amount outstanding*). Sanksi itu hanya dapat dikenakan apabila terpidana belum mencapai usia 18 tahun. Hakim mengenakan pidana kurungan sebagai pidana pengganti apabila ia berpendapat bahwa kurungan anak sebagai pidana

pengganti masih layak atau tepat. Lamanya "kurungan anak" maupun "kurungan" sebagai pidana tidak boleh kurang dari satu hari dan tidak lebih dari 3 bulan. Untuk setiap pemenuhan NGL 25 dari kekurangan denda yang belum dibayar, tidak boleh lebih dari 1 hari. Apabila pembayaran sisa denda dipenuhi maka pidana pengganti berupa pidana "kurungan anak" maupun "kurungan" dihapuskan.

2. Hakim dapat menjatuhkan sanksi alternatif atas permintaan terdakwa dan pemohon harus menyatakan sanksi alternatif yang diminta.

Adapun sanksi alternatif ini terdiri dari :

#### 2.1 Kerja Sosial (community service)

Lamanya kerja sosial (community service) atau lamanya kerja untuk memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana, tidak boleh lebih dari 200 jam. Jangka waktu bekerja tidak boleh lebih dari 6 bulan, apabila pekerjaan itu terdiri dari pekerjaan yang tidak lebih dari 100 jam dan 1 tahun pada "kasus-kasus yang tersisa" (remaining cases)

#### 2.2 Memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana

Lamanya memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana adalah tidak lebih dari 240 jam

Hakim harus menyatakan :

1. Jumlah jam kerja yang harus dilaksanakan.
2. Jangka waktu kapan pekerjaan itu setelah putusan itu berkekuatan tetap, harus dimulai dan kapan harus diselesaikan.
3. Sifat dan macam pekerjaan yang harus dilaksanakan.

### 2.3 Mengikuti proyek pelatihan

Lamanya proyek pelatihan tidak lebih dari 200 jam. Jangka waktu berlangsungnya proyek pelatihan harus tidak lebih dari 6 bulan.

Hakim harus menyatakan:

1. Lamanya proyek pelatihan, jangka waktu kapan pekerjaan itu, setelah putusan berkekuatan tetap, harus dimulai dan kapan harus diakhiri atau diselesaikan.
2. Lembaga dimana proyek pelatihan itu akan dilaksanakan
3. Sifat dan macam proyek pelatihan

Mengenai percobaan, persiapan, penyertaan dan pembantuan pidana dan tindakan diberlakukan sebagai kejahatan selesai atau lengkap. Dalam kasus perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang terpisah dan berdiri sendiri, harus dipandang sebagai satu tindak pidana (delik tunggal) dalam hal penerapan pidana,

sanksi alternatif dan tidakan. Terlihat dalam pasal 63 "apabila seseorang yang telah dijatuhi pidana, dinyatakan bersalah lagi melakukan kejahatan atau pelanggaran sebelum putusan pidana itu, maka ketentuan dalam bab ini berlaku apabila delik-delik itu diadili pada waktu yang bersamaan" Didalam KUHP Belanda tidak mengenal adanya pidana penjara sebagai pidana pokok, tetapi digantikan oleh pidana kurungan dan denda. Dan sebagai pengganti pidana pokok yaitu berupa pidana kerja sosial, pidana memperbaiki kerusakan yang dikibatkan tindak pidana dan mengikuti proyek pelatihan. Sebagai alternatif pidana ini sangat mendorong agar anak sebelum dikenakan pidana yang lebih berat pada saat pertama ia melakukan kejahatan sebagai pertimbangan hakim dapat dijatuhkan pidana alternatif ini.

3. Didalam KUHP Belanda terdapat pula pidana tambahan yang berupa perampasan barang dan pencabutan SIM dan tindakan yang terdiri dari; Penempatan pada lembaga khusus anak, penyitaan, perampasan keuntungan yang diperoleh karena melawan hukum, kompensasi (ganti rugi) .

Karena tidak dikenal adanya pidana penjara dalam KUHP Belanda hal ini menunjukkan bahwa di Belanda, sedini mungkin menjauhkan stigma. Menurut Hoefnagels<sup>31</sup> Stigma te jadi

<sup>31</sup> Peter Hoefnagels, *The Concept of Crime An Introductory of Comparative Criminology*, F.H. Universitas Padjajaran, Bandung, 1984, hal 26

bilamana identitas seseorang terganggu atau rusak, yang berarti bahwa persesuaian antara apakah seseorang itu dengan pandangan masyarakat terhadap dia terganggu atau rusak. Sehingga menghindarkan stigma tentang pidana penjara kepada anak hal ini sangat memperhatikan kesejahteraan serta masa depan anak-anak tersebut.

#### 4. KUHP YUGOSLAVIA

Dalam bagian umum KUHP Yugoslavia ada bab khusus yang mengatur tentang sanksi tindakan dan pidana untuk anak, yaitu dalam Bab VI mulai Pasal 64s/dPasal 79 L. Bab VI ini berjudul "*Provisions Relating To Educative and Penal Measures For Minors*"

Menurut KUHP Yugoslavia dibedakan menurut usia anak:

##### a. Anak (*a child*)

Dibawah usia 14 tahun, tidak dapat dipidana maupun dikenakan tindakan edukatif (*edukative measure*) atau tindakan keamanan (*securty measure*).

##### b. Anak Junior (*a junior minor*)

Seorang anak yang pada saat melakukan delik telah berusia 14 tahun tetapi belum mencapai usia 16 tahun (*anak junior*) tidak dapat dipidana, tetapi dapat dikenakan tindakan edukatif.

##### c. Anak Senior (*a senior minor*)

Seorang anak yang pada saat melakukan delik telah berusia 16 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun (*anak senior*) dapat

dikenakan tindakan edukatif dan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHP, dapat dipidana; akan tetapi, pidana yang dapat dijatuhkan hanya pidana khusus untuk anak ( yaitu penjara anak atau *minor's imprisonment*)

Jenis tindakan dalam KUHP Yugoslavia adalah :

(1) Tindakan Disiplin ( *Disciplinary measures*)

- a. Teguran keras atau pencercaan;
- b. Dimasukkan ke Pusat Pendisiplinan atau Penertiban Anak;

(2) Tindakan Pengawasan Intensif ( *Measures of intensified supervision*);

- a. Pengawasan orang tua atau wali;
- b. Pengawasan dalam keluarga lain atau badan-badan perwalian

(3) Tindakan Institusional ( *institutional measures*)

- a. Penempatan di lembaga pendidikan
- b. Penempatan pada panti asuhan pendidikan korektif
- c. Penempatan pada panti asuhan anak cacat<sup>32</sup>

Penempatan pada panti Tindakan-tindakan Edukatif (Edukative Measure) bertujuan untuk melindungi pendidikan, perbaikan dan pengembangan para pelaku anak dengan memperluas

perlindungan, bantuan dan pengawasan kepada mereka dan juga untuk mereka melakukan tindak pidana.

Pedoman pemilihan tindakan, dalam pemilihan tindakan yang edukatif, pengadilan harus mempertimbangkan usia anak, tingkat perkembangan kejiwaannya, kecenderungan-kecenderungannya, motif melakukan delik, pendidikannya masa lalu, lingkungan dan kondisi dia tinggal, tingkat keseriusan delik yang dilakukan, apakah pernah mendapat tindakan edukatif atau pidana sebelumnya dan keadaan-keadaan lain yang relevan. Tindakan pendisiplinan ini harus diberikan kepada anak yang kepadanya tidak perlu dilakukan tindakan edukatif dan reformatif yang diperluas dan khususnya apabila ia telah melakukan delik karena kekurangajaran. Tindakan pengawasan intensif harus diberikan apabila perlu dilakukan tindakan-tindakan edukatif dan reformatif yang lebih diperluas terhadap anak itu dan pengasingan atau pemisahan dia dari lingkungannya tidak diperlukan. Tindakan institusional diberikan kepada anak apabila perlu dilakukan tindakan edukatif dan reformatif yang diperluas dan perlu dilakukan pengasingan atau pemisahan (isolasi) dia dari lingkungan dimana anak ini tinggal.

---

<sup>32</sup> Ibid, Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, hal 99

Pemidanaan bagi anak senior (antara usia 16 - 18 tahun) sebagai berikut:

Pengadilan dapat menjatuhkan pidana kepada anak senior yang mampu bertanggung jawab apabila ia melakukan tindak pidana yang diancam lebih dari 5 tahun penjara.

Pidana penjara anak (*minor's imprisonment*) tidak boleh kurang dari 1 tahun dan tidak boleh lebih dari 10 tahun dan pelaksanaan pidana ini tidak dapat ditunda.

Pidana penjara anak ini dilaksanakan dalam lembaga khusus yang disebut *penal corrective home* atau Lembaga koreksi penal dimana mereka dapat berada di situ sampai usia 23 tahun.

Seorang dewasa hanya dapat diadili untuk delik yang dilakukannya sewaktu atau sebagai anak junior apabila ia belum mencapai usia 21 tahun dan apabila pidana lebih dari 5 tahun penjara diancamkan untuk delik yang dilakukannya. Terhadap orang itu hanya dapat dikenakan tindakan yang berupa *committal to the educative corrective home* atau penempatan pada lembaga koreksi edukatif. Ataupun dapat dikenakan pidana penjara anak.

#### 1.1 Teguran keras atau pencercaan (*Reprimand*),

Diberikan apabila hal itu cukup untuk memela atau memarahi anak itu atas tindak pidana yang dilakukannya.

Dalam menjatuhkan teguran atau cercaan, hakim



menunjukkan kepada anak itu akan sifat berbahaya dari perbuatan dan memberi peringatan bahwa tindakan lebih berat akan dikenakan kepadanya apabila ia melakukan tindak pidana lain.

1.2 Pusat pendisiplinan atau penertiban anak,

Pengadilan akan memasukkan anak ke pusat pendisiplinan apabila hal itu diperlukan untuk mempengaruhi kepribadian dan perilakunya dengan mengenakan tindakan-tindakan berjangka waktu pendek yang sesuai. Pengadilan dapat memasukkan anak ke pusat pendisiplinan dalam jangka waktu :

- a. Untuk beberapa jam tertentu pada hari-hari libur dan tidak boleh lebih dari 4 hari libur berturut-turut dalam sehari, tetapi tidak boleh lebih dari 1 bulan.
- b. Untuk beberapa jam tertentu dalam sehari, tetapi tidak boleh lebih dari 1 bulan.
- c. Untuk ditinggal terus menerus dalam beberapa hari, tetapi tidak lebih dari 20 hari.

Dalam menjatuhkan tindakan ini, harus diperhatikan dengan teliti bahwa anak itu tidak ketinggalan atau meninggalkan pendidikan formalnya sebagai akibat dari tindakan ini.

Dalam pusat pendisiplinan ini, anak dipekerjakan pada pekerjaan yang hermanfaat sesuai dengan usianya. Sehingga dalam keputusan memasukkan anak ke pusat kedisiplinan, pengadilan dapat menetapkan bahwa setelah selesai menjalani tindakan ini, anak itu ditempatkan dibawah pengawasan intensif dari badan perwaliaan.

2.1 Pengawasan Intensif oleh orang tua atau wali

Dilakukan apabila orang tua atau wali telah gagal melakukan pengawasan terhadap anak. Pengadilan memberikan putusan dalam memberikan intruksi dan kewajiban-kewajiban tertentu kepada orang tua atau wali

2.2 Pengawasan Intensif oleh keluarga lain

Tindakan ini diambil apabila orang tua atau wali tidak dalam posisi untuk melakukan pengawasan kepadanya atau tidak dapat diharapkan dari mereka untuk melakukan pengawasan.

Pengawasan intensif oleh badan perwalian; tindakan ini diambil apabila orang tua atau wali tidak berada dalam posisi untuk melakukan pengawasan intensif kepada anak itu dan tidak terpenihi syarat-syarat untuk menyerahkan anak itu ke keluarga lain.

3.1 Penempatan ke lembaga pendidikan,

Tindakan ini diberikan kepada anak yang memerlukan pengawasan tetap oleh para pendidik terlatih didalam lembaga pendidikan untuk anak. Adapun lamanya tidak kurang dari 6 atau tidak lebih dari 3 tahun.

### 3.2 Penempatan ke panti asuhan untuk pendidikan atau perbaikan (*The Educative-Corrective Home*)

Hal ini diberikan dengan mempertimbangan tingkat keseriusan dan sifat delik yang dilakukan dan apakah sebelumnya telah dijatuhi tindakan edukatif dan pidana. Untuk lamanya tindakan ini tidak kurang dari 1 tahun dan tidak lebih dari 5 tahun.

### 3.3 Penempatan pada lembaga untuk anak cacat

Diberikan kepada anak cacat (anak tuli, buta, tuli dan bisu, dll) sebagai pengganti penempatan ke lembaga edukatif atau panti asuhan pendidikan korektif. Tindakan ini juga dapat diberikan sebagai pengganti tindakan keamanan yang berupa penempatan kelembaga penahanan atau pemeliharaan medis<sup>33</sup>

## 5. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran yang strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan

dan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Maka agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, perlu dilakukannya upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Guna mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Undang-undang yang selama ini berlaku hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Didalam Pasal 16 ayat 3 Undang-undang ini menyatakan bahwa penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk;

1. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
2. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. Adapun yang

---

<sup>33</sup> Ibid, Ibid, Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, hal 112

dimaksud dengan bantuan lainnya misalnya bimbingan sosial dari pekerja sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater atau bantuan dari ahli bahasa

3. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum

Pada Pasal 59 Undang-undang ini menyebutkan Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui :

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak
2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
6. Pemberiaan jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua dan keluarga
7. Perlindungan dan pemberitahuan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi

Melihat kemajuan dalam undang-undang perlindungan anak yang sangat memperhatikan kepentingan dan masa depan dari anak, maka penulis berpendapat, bahwa lembaga legislatif mempunyai pemikiran yang selangkah lebih maju dalam menangani masalah anak

#### **6. Kecenderungan Internasional**

Dalam Kongres PBB ke-5 mengenai *The Prevention Of Crime and the Treatment of Offender* yang diadakan di Geneva pada tahun 1975 dinyatakan dalam bagian *reform of criminal law* butir 177 (F) bahwa: *it seemed possible to suggest to all countries some general guidelines which owing to the limitation of the present report, necessarily had to be brief a persistent endeavour to select measures that carried the least stigma and with the application of which the community could be associate.* Selanjutnya disebutkan pula dalam butir ke 187 kongres tersebut dalam bagian *non-judicial forms of social control* bahwa : *special care should be taken to avoid social labeling and stigmatization. To that end an extensive information campaign should be launched to ensure that the whole population knew and accepted the view that the fate of the*

139

*handicapped deviants and offenders was business of the entire community and of each of its members*<sup>34</sup>

Yang sangat dibutuhkan dalam hal ini menurut Hoefnagels adalah suatu suntikan (*injection*) dari pemikiran sosiologis kedalam keseluruhan administrasi peradilan pidana guna menjami supaya kegajilan-keganjilan pada saat ini dalam hubungannya antara stigma dan penghukuman dapat ditekankan sampai pada tingkat minimum yang tidak dapat dihindari.<sup>35</sup>

Andeanaes dalam hal ini menyatakan, bahwa didalam sistim tradisional, pidana diartikan sebagai pernyataan pencelaan sosial terhadap suatu perbuatan. Peradilan pidana dapat digambarkan sebagai suatu "permainan moralitas" (*morality play*) bahkan juga merupakan upacara degradasi (*degradation ceremony*).<sup>36</sup>

Penghukuman dan pidana meninggalkan stigma moral dan siterhukum dicap jahat. Stigma moral ini mungkin sangat ringan dan hampir-hampir tidak ada, misalnya saja didalam tindak-tindak pidana lalu lintas dan tindak pidana ringan yang lain, tindak pidana yang berkaitan dengan kebenaran seseorang untuk melakukan sesuatu karena bertentangan dengan kepercayaannya

<sup>34</sup> Dokumen, Fifth United Nations Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, 1975, UN, New York, 1976, hal 23-24

<sup>35</sup> Op Cit. Muladi, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, hal 82

<sup>36</sup> Ibid, Muladi, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, hal 82

(*conscientious objectors*) dan pelaku-pelaku tindak pidana yang lain yang motifnya secara ideal dapat diterima.

Tetapi paling tidak dalam hal menyangkut kejahatan-kejahatan tradisional stigma dalam pemidanaan ini tampak secara tidak jelas. Karakter pemidanaan sebagai pencelaan moral tidak diragukan lagi meningkatkan pengaruh pencegahan. Untuk beberapa kelompok pelaku tindak pidana, stigmatisasi tersebut lebih banyak menimbulkan penderitaan dan oleh karena itu lebih menakutkan, dari pada pengenaan pidananya sendiri.<sup>37</sup>

Menurut Muladi, pencarian alternatif pidana penjara atau pidana pencabutan kemerdekaan telah menjadi masalah yang bersifat universal. Masalah mendayagunakan ini menjadi lebih penting bila dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang hendak dicapai.<sup>38</sup>

Gerakan yang bersifat universal ini dimulai oleh gerakan abolisionis yang menghendaki dihapuskannya secara keseluruhan hukum pidana. Gerakan ini pada hakekatnya berisi kritik yang sangat tajam terhadap hukum pidana bahwa juga pada sistem peradilan pidana. Keduanya tidak dapat melepaskan dirinya dari sifat yang represif, sebagai karakteristik aslinya. Reaksi sosial ini akibat samping adanya pidana (penjara) kadang tidak bersifat preventif atau rehabilitatif, bahwa kadangkala malah meningkatkan desosialisasi serta adanya stigma dari masyarakat yang tidak dapat ditinggalkan oleh terpidana.

Timbulnya akibat sampingan atau langsung dari adanya pidana ini, gerakan abolisionis berusaha untuk menghilangkan atau menghapuskan sarana yang non penal yang bersifat koersif ini dengan sarana yang non penal atau penggabungan dengan

<sup>37</sup> Ibid, Muladi, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, hal 83

<sup>38</sup> Ibid, Muladi, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, hal 83



sarana penal dan non penal sekaligus. Gerakan abolisionis ini berkembang cukup pesat di bumi belahan Eropa maupun Amerika dengan karakteristiknya masing-masing.

Tokoh-tokoh aliran ini antara lain; L. Hulsman, Thomas Matheiesen, Herman Bianchi serta Nils Christie.

Bilamana gerakan di Amerika menekan penghapusan pidana penjara (*Prison abolitionist*), maka gerakan di Eropa menekankan keberatannya terhadap sistem peradilan pidana secara keseluruhan (*the criminal justice system as a whole*) dalam hal yang mana sistem kepenjaraan merupakan jantungnya yang bersifat represif.

Kaum abolisionis mengajukan beberapa konsep pemikiran tentang kejahatan, pidana dan pengendalian sosial, konsep itu adalah :

*Decarceration* atau *deinstitutionalization*, yakni penghapusan penjara dan menggantikannya dengan pengendalian, pembinaan dan pelayanan dimasyarakat terbuka.

*Diversion*, yakni menghindarkan pelaku tindak pidana dari proses peradilan pidana yang formal dan menggantikannya dengan sistem kelembagaan yang berorientasi pada masyarakat

*Decategorization*, merupakan suatu usaha untuk mematahkan berbagai sistem pengetahuan dan diskusi yang menciptakan kategori-kategori perbuatan yang menyimpang.

*Delegalization*, dalam arti menemukan baru dan memperkuat cara-cara penyelesaian perselisihan dan manajemen konflik tradisional dan bentuk-bentuk keadilan diluar sistem

*Deprofessionalization*, yang mengandung makna bahwa, untuk menggantikan struktur monopoli profesional dan kekuasaan perlu dibentuk jaringan kontrol masyarakat, partisipasi masyarakat dan pelayanan informal.<sup>35</sup>

Kecenderungan internasional yang kemudian muncul sebagai reaksi gerakan abolisionis ini adalah gerakan reformis yang berusaha untuk mencari alternatif pidana penjara (*alternativeto imprisonment*).

Gerakan reformis ini mendapatkan perhatian dari perserikatan bangsa-bangsa, yang pada tahun 1980 di Caracas oleh Sub-

Committee II pada *The Sixth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang khusus membicarakan topik *De-institutionalization of correction*, diantaranya memberikan rekomendasi :

*" In a resolution on alternative to imprisonment, the congress recommended that Member States examine their legislation with a view toward removing legal obstacle to utilizing alternatives to imprisonment in appropriate cases in countries where such obstacles exist and encouraged wider community participation in the implementation of alternatives to imprisonment and activities aimed at the rehabilitation of offenders"*<sup>40</sup>

Kecenderungan untuk mencari alternatif pidana ini hampir melanda semua negara. Walaupun sebenarnya sejak tahun 1965 Perserikatan Bangsa-bangsa telah memfokuskan perhatian pencarian alternatif penjara ini yaitu berupa tindakan-tindakan yang bersifat non-institusional, misalnya berupa pengesektifan pidana bersyarat.

Usaha-usaha pembaharuan dan pencarian bentuk-bentuk alternatif pidana penjara telah dilakukan untuk memperbaiki daya laku dari alternatif pidana penjara ini, namun merupakan suatu

<sup>39</sup> Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar FH Undip Semarang, 1990, hal 21

<sup>40</sup> *The Sixth United Nations Congress on the Prevention Of Crime and The Treatment Of Offenders*, 1980

kenyataan bahwa disatu pihak pidana penjara sangat diperlukan sebagai perlindungan masyarakat. Walaupun sebenarnya pidana penjara ini sekaligus melekat tujuan dan kerugian-kerugian yang kadang sangat sulit dihindari.

Bilamana ditinjau dari segi tujuan yang ingin dicapai kerugian tersebut dapat bersifat praktis maupun filosofis.

Adapun bila ditinjau dari segi filosofis, akan terdapat hal-hal yang sangat penting bertentangan antara tujuan yang hendak dicapai tetapi sekaligus terdapat kerugian yang melekat didalamnya.

Kondisi yang *ambivalence* tersebut adalah :

Menurut Muladi, tujuan dari pidana penjara adalah untuk menjamin pengamanan narapidana dan yang kedua adalah memberikan kesempatan-kesempatan untuk rehabilitasi. Adapun hakikat dari fungsi penjara tersebut diatas seringkali melibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada ahirnya menimbulkan kerugian bagi si terpidana yang terlalu lama didalam lembaga pemasyarakatan yaitu berupa ketidakmampuan narapidana tersebut untuk melanjutkan kehidupannya secara produktif dalam masyarakat.<sup>41</sup>

Adapun pendapat yang sejalan dengan *ambivalence* tersebut adalah pendapat dari Keith Bottomley, dalam bukunya yang berjudul *Dilemmas in the Penal Process*, mengatakan bahwa hal yang

sangat mengherankan adalah adanya pertentangan antara rehabilitasi dan kontrol (pengamanan terhadap narapidana) dan yang merupakan persoalan utama adalah masalah pertentangan pendapat antara rehabilitasi pidana serta tindakan<sup>42</sup>

Jadi lembaga pidana penjara tetap merupakan hal yang paling penting walaupun telah diadakan perbaikan-perbaikan dalam melaksanakannya, yaitu disamping sebagai pengendalian sosial juga sebagai pengamanan.

Oleh karena itu perlu dihayati prinsip-prinsip dalam pengaturan maupun didalam pelaksanaannya pidana penjara, yaitu dengan menempatkan alternatif pidana penjara seperti pidana pengawasan, pidana denda dan tindakan pada tempat yang utama. Sejauh mungkin dihindari penggunaan pidana penjara, karena dalam hal ini segi negatif akan lebih besar dibandingkan manfaat yang didapat. Disamping tidak mendukung pemungkian rehabilitasi atau pembinaan terhadap narapidana dan yang paling dirasakan adalah stigma atau cap jahat.

Seperti telah dikemukakan oleh Muladi bahwa penggunaan pidana bersyarat sebagai alternatif pidana penjara akan membawa beberapa keuntungan yaitu:

---

<sup>41</sup> Op. Cit. Dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana, hal 45

<sup>42</sup> A. Keith Bottomley, *Decisions in the Penal Process Law and Society series*, Martin Robertson and Company, London, 1973, hal. 177

- a. Memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya dimasyarakat, sepanjang kesejahteraan terpidana dianggap sebagai hal yang utama dari pada resiko yang mungkin diderita oleh masyarakat;
- b. Memungkinkan terpidana untuk melanjutkan kebiasaan-kebiasaan hidupnya sehari-hari;
- c. Mencegah terjadinya stigma yang dikibatkan oleh pidana perampasan kemerdekaan
- d. Memungkinkan terpidana untuk bekerja, yang secara ekonomi menguntungkan kehidupannya, keluarganya ataupun bagi masyarakat;
- e. Secara finansial pembinaan diluar lembaga lebih murah dibandingkan pembinaan didalam lembaga pemasyarakatan;
- f. Para petugas pembina dapat menggunakan segala fasilitas yang ada dimasyarakat untuk mengadakan rehabilitasi terhadap terpidana;
- g. Tidak menutup perkembangan pribadi terpidana bila dibandingkan dimasukkan kedalam lembaga pemasyarakatan;<sup>43</sup>

Keuntungan-keuntungan lainnya yang dipandang berguna bagi pembinaan terpidana yang secara mutlak diberikan secara tidak terikat kepada si terpidana di samping syarat-syarat khusus yang telah diberikan atau ditentukan dalam putusan hakim.

Tetapi yang menjadi kendala adalah belum adanya atau belum berfungsinya lembaga pengawasan ini secara efisien dan sempurna.

Denda sebagai alternatif pidana penjara memegang peranan yang tidak kalah penting dalam pembinaan narapidana sebagai tujuan akhir dari sistim pemidanaan. Tetapi dilain pihak disamping pidana pengawasan dan pidana denda ini merupakan jenis pidana yang kurang banyak diminati, karena tidak diadakan penyesuaian mata uang secara riil.

Untuk mengatasi hal tersebut menurut Muladi<sup>43</sup>, dapatlah dipergunakan dua pendekatan tentang alternatif pidana penjara yaitu :

Pendekatan, melihat dari alternatif pidana penjara sebagai *alternative sanction*, yaitu sanksi yang dapat menggantikan sanksi pidana penjara, dimana sanksi alternatif ini hanya dapat digunakan dan diterima bilamana sanksi tersebut dapat melayani tujuan pemidanaan dan pidana penjara dipandang memang perlu digunakan

Pendekatan yang menyatakan, sanksi alternatif merupakan salah satu upaya untuk mencari tujuan dari pemidanaan dimana dengan pidana penjara tujuan pemidanaan itu tidak tercapai<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Ibid, Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang, hal 26

<sup>44</sup> Ibid Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang, hal 26

Penulis menanggapi dua pendekatan ini secara kritis dan realistis, karena memang ada fungsi hukum pidana yang tidak mungkin dihilangkan hanya dengan alternatif pidana penjara, yang diharapkan adalah keserasian dan keselarasan serta keseimbangan dalam penggunaan alternatif pidana sehingga sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Demikian pula dalam hal menuntut anak, maka hakim dalam memutuskan perkara seyogyanya memperhatikan hal-hal :

- a. perkembangan pribadi anak.
- b. masa depan anak.
- c. diharapkan untuk lebih mengutamakan kesejahteraan anak disamping kepentingan masyarakat.

Sudarto, dalam bukunya yang berjudul *Kapita Selekta Hukum Pidana*, mengatakan bahwa semua kegiatan yang berhubungan dengan proses peradilan anak harus selalu menguntungkan atau menyejahterakan anak demi perkembangan pribadi anak.<sup>45</sup>

Van Bommenlen berpendapat bahwa dalam memutuskan sanksi terhadap anak, harus dipertimbangkan tiga tujuan utama yaitu :

---

<sup>45</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung ; 1986, hal 129

- a. bahwa pidana dan penanganan anak belum dewasa harus memperhatikan kepentingan pada perbaikan anak tersebut
- b. pidana dan tindakan sedapat mungkin harus disesuaikan dengan kepribadian anak
- c. pidana dan tindakan harus dapat mencegah pengulangan tindak pidana <sup>46</sup>

Oleh karena itu apabila mengingat hal-hal tersebut diatas, maka kelemahan-kelemahan pidana penjara harus dihindari dengan lebih mengutamakan pidana denda, pidana pengawasan dan tindakan.

Dalam hal memberikan perlindungan atau pendidikan bagi anak, maka upaya pengamanan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak atau remaja yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya, merupakan hal yang utama.

Dalam perlindungan anak ini, agar anak dapat merasakan aman, maka kepentingan dan hak asasinya terjamin dan tidak dirugikan, sehingga dapat mencapai pertumbuhan mental, fisik dan sosial yang maksimal

Adapun yang melindungi harus dapat merasa bahwa dirinya dapat memberikan perlindungan dan jaminan dalam menjalankan kegiatan perlindungan sebagai pemenuhan tugasnya atau



panggilannya bahkan mendapat dukungan yang layak dari anggota masyarakat dan pejabat pemerintah.

Pemberian perlindungan harus bersifat edukatif dan membangun dalam arti harus diarahkan kepada kemampuan sehingga dapat bermanfaat bagi dirinya dan negaranya.

Jaminan pelaksanaan perlindungan, untuk mencapai hasil yang maksimal perlu adanya jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan ini, untuk lebih dapat dirasakan dan diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat. Hendaknya jaminan ini dituang didalam suatu peraturan hukum yang tertulis dalam bentuk undang-undang, sehingga masyarakat dapat mengetahuinya. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan dinegara lain, yang patut dikembangkan dan ditiru.

### **7. Kebijakan Pidana Masa Yang Akan Datang**

Menentukan jenis-jenis apa yang hendak dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan memasuki pembicaraan mengenai ketentuan perundang-undangan masa datang (*ius constituendum*)

Setelah penulis membahas mengenai beberapa peraturan yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia serta beberapa KUHP asing dan kecenderungan internasional maka tepatlah

---

<sup>46</sup> Van Bamelon, Hukum Pidana I, hal 22

apabila dipikirkan untuk merekomendasikan tindakan non custodial dalam kebijakan formulasi hukum pidana dimasa mendatang

Mengingat anak yang masih begitu peka, maka sedapat mungkin , agar hakim dapat memilih pidana yang tepat bagi anak. Pedoman atau prinsip apa yang seharusnya diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada anak adalah sangat penting, karena masalah ini yang menjadi pusat perhatian dari dokumen Internasional .

Sistim pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus dilakukan secara hati-hati dan selektif karena mengingat anak mempunyai tingkat kedewasaan yang berbeda-beda sehingga perlu dikembangkannya pemikiran pertanggung jawaban strukural artinya pembinaan tidak hanya berfungsi untuk mempertanggungjawabkan dan membina (treatment) si anak sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga berfungsi untuk mempertanggungjawabkan dan membina atau mencegah pihak-pihak lain yang mempunyai andil untuk terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Sehubungan dengan hal tersebut setelah penulis membahahas perbandingan KUHP maka, penulis mengusulkan susunan sanksi pidana untuk masa yang akan datang sesuai

UPT-PUSTAK-UNDIP

dengan yang telah tersusun didalam Rancangan KUHP yang terdiri dari

1. Pidana Nominal adalah pidana yang paling ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan anak. Sehingga sanksi pidana yang termuat didalamnya adalah berupa pidana peringatan (admonition) dan teguran keras (reprimand).

Didalam Konsep KUHP tahun 2000, dalam penjelasan Pasal 110, pidana peringatan adalah pemberian nasihat kepada anak agar menjauhi perbuatan negative. Sedangkan pidana teguran keras, tidak hanya sekedar memberi nasihat, melainkan anak diberi peringatan keras.<sup>47</sup>

Mengenai pidana teguran sebagai penjabaran dari pidana peringatan menurut Sudarto tidak ada kesukaran. Pidana ini dikenakan terhadap terpidana yang dengan mengingat keadaannya dan perbuatannya untuk pembinannya cukup apabila dikenai teguran. Besar sekali kekuasaan hakim dalam menentukan pidana baru ini.<sup>48</sup>

Manfaat dari pidana ini ialah bahwa ia tidak akan mendatangkan stigma bagi terpidana. Disamping itu juga

---

<sup>47</sup> Op. Cit Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, hal 120

<sup>48</sup> Sudarto, Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia, Cetakan II, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1976, hal 18  
Periksa pula Himpunan Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana, Tahun 1980/1981, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen kehakiman RI, 1985, hal 92

murah, bahwa tidak memerlukan biaya sama sekali. Kalau dengan pemidanaan yang ringan sudah dapat dicapai tujuan pemidanaan khususnya dapat diusahakan agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi, maka penggunaan pidana ini sama sekali tidak ada keberatannya.<sup>49</sup>

Selanjutnya menurut Sudarto bahwa kelihatannya pidana ini seperti bukan pidana. Ini memang demikian, kalau dilaksanakan begitu saja, tanpa alasan yang meyakinkan dan sama sekali tidak diresapi maknanya oleh terdakwa dan tidak disertai pidana tambahan. Akan tetapi kalau pidana ini diterapkan dengan tanggung jawab penuh dan disadari dengan sungguh-sungguh oleh terdakwa, maka ada artinya juga. Masalahnya apakah dalam perjumpaan dengan hakim dan terpidana yang terbiasa relatif singkat itu sudah dapat diketahui oleh hakim jiwa dari terpidana, sehingga ia yakin akan pidana tersebut. Hal lain yang perlu diperhatikan sehubungan dengan penjatuhan pidana ini adalah pandangan fisik polisi dan masyarakat pada umumnya. Bagi polisi penjatuhan pidana ini mungkin dirasakan tidak mengimbangi segala usaha untuk menyidik dan menyiapkan perkaranya, sehingga masuk dan diajukan ke pengadilan. Harus pula mendapat pertimbangan perasaan yang mungkin ada pada

---

<sup>49</sup> Ibid Sudarto, Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia hal 20

masyarakat yang menyaksikan dan mendengar tentang perbuatan yang telah dilakukan terpidana. Mereka ini juga menimbang-nimbang tentang sesuai tidaknya pidana yang dijatuhkan itu., meskipun hal ini tidak boleh dijadikan pedoman semata-mata.<sup>50</sup>

2. Pidana Pembinaan diluar lembaga dikenakan terhadap terpidana yang mengingat keadaan dan perbuatannya tidak membahayakan masyarakat, sehingga pembinaannya tidak perlu mendapatkan pengasingan tetapi hanya berupa pembinaan.

Tujuan dari pidana pembinaan di luar lembaga dimaksudkan untuk memberikan pembinaan kepada anak, baik dalam rangka penyembuhan karena tidak atau kurang mampu bertanggungjawab pidana disebabkan sakit jiwa maupun berupa pembinaan lainnya bagi anak yang sehat jiwanya untuk memperoleh ketrampilan yang berguna bagi kehidupannya.

Pidana kerja sosial dapat diterapkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek. Pidana kerja sosial mempunyai beberapa keunggulan antara lain :

- a. Pidana kerja sosial menisbikan proses stigatisasi yang selalu menjadi efek pidana perampasan kemerdekaan. Proses stigatisasi dalam banyak hal telah menempatkan seorang

---

<sup>50</sup> Ibid, Sudarto, Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistim Pidana Indonesia hal 20

terpidana sebagai orang yang berlabel sebagai penjahat, sekalipun orang tersebut tidak melakukan kejahatan, Stigmatisasi ini pada gilirannya akan menghambat pembinaan narapidana. Secara psikologi orang yang sudah (terlanjur) dicap sebagai penjahat akan lebih mudah frustasi untuk melakukan kejahatan. Logikanya sangat sederhana, dari pada hanya sekedar dianggap sebagai penjahat, lebih baik melakukan sekalian. Tidak berhasilnya pembinaan narapidana karena efek negatif yang berupa stigmatisasi ini akan jelas akan melahirkan penjahat kambu. Kegagalan ini pada gilirannya juga harus dibayar mahal oleh masyarakat, karena meningkatnya ancaman sebagai korban kejahatan.

- b. Pidana kerja sosial akan meniadakan efek negatif berupa pendidikan kejahatan oleh penjahat. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa Lembaga Pemasyarakatan sering sekali berfungsi sebagai tempat kuliahnya para penjahat yang akan melahirkan penjahat yang lebih professional. Lahirnya para penjahat yang professional ini pada gilirannya juga akan menambah beban kepada masyarakat, karena munculnya ancaman yang lebih besar.
- c. Dilihat dari perspektif ekonomi, pidana kerja sosial juga jauh lebih murah dibandingkan pidana perampasan kemerdekaan. Dengan pidana kerja sosial, maka subsidi untuk biaya hidup

dilembaga dapat ditekan sehingga pada ahirnya juga tidak akan membebani masyarakat secara keseluruhan.

Menyadari berbagi keunggulan pidana kerja sosial sebagaimana tersebut diatas memberikan pemahaman bahwa, pidana kerja sosial dengan demikina secara teoritis memberikan harapan besar untuk dapat lebih memberikan perlindungan kepada masyarakat akan bahaya kejahatan. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa pidana kerja sosial dapat memenuhi aspek tujuan pemidanaan yang berupa perlindungan masyarakat. Oleh karenanya, dilihat dari aspek perlindungan masyarakat. Pidana kerja sosial sangat relevan dengan tujuan pemidanaan.<sup>51</sup> Suatu jenis pidana baru adalah pidana pengawasan, karena bersifat non custodial dan dapat dikatakan sebagai alternatif dari pidana pencabutan kemerdekaan dan tidak ditujukan untuk pidana yang berat sifatnya. Penjatuhan pidana pengawasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana yang dincam dengan pidana penjara sepenuhnya terletak pada pertimbangan hakim. Hakim harus memperhatikan keadaan dan perbuatan terpidana, apakah pembinaan terpidana cukup diawasi atau tidak. Pidana ini pada umumnya dikenakan pada orang yang pertama kali melakukan kejahatan.

---

<sup>51</sup> Togat, Pidana Kerja Sosial dalam Pembahasan Hukum Pidana Indonesia, Djambatan ; Jakarta, 2002 hal 50-51

Probation atau pidana kerja sosial merupakan suatu alterbatif yang tepat atau cocok untuk pidana bersyarat, khususnya apabila pidana bersyarat ini tidak memberikan peluang yang cukup untuk perbaikan atau rehabilitasi si pelanggar. Adapun mengenai perbedaan penting antara suspended sentence dengan probation adalah bahwa dalam probation, putusan pemidanaan ditunda. Jadi tidak ada "Final Sentence". Untuk dibuatnya perintah pengawasan (probation order), cukup bahwa hakim yakin akan kesalahan tetdakwa dan delik yang dilakukan tidak dapat dipidana lebih dari 3 tahun penjara. Perbedaan yang sangat signifikan antara probation dan suspended sentence adalah bahwa orang yang diberi probation menjadi sasaran rencana rehabilitasi dibawah pengawasan dan bimbingan pekerja soaial yang terlatih untuk masa 1-3 tahun.<sup>52</sup>

3. Pidana denda yang tidak dibayarkan dapat diambilkan dari sebagian kekayaan atau pendapatannya, dalam hal terpidana mampu untuk itu tetapi tidak mau membayar denda yang dijatuhkan kepadanya. Apabila usaha ini tidak tercapai maka penulis merekomendasikan pidana wajib kerja sosial sebagai pengganti denda, karena dengan wajib kerja sosial akan memberikan tanggung jawab kepada anak untuk membayar apa

---

<sup>52</sup> Barda Nawawi Arief, Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hal 72



yang telah dia perbuat serta menghindarkan pemikiran untuk mengulangi perbuatannya.

Pidana denda juga bisa dipandang sebagai alternatif dari pidana pencabutan kemerdekaan. Sebagai sarana politik kriminal, pidana ini tidak kalah efektifnya dari pidana pencabutan kemerdekaan. Berdasarkan pemikiran ini maka seyogyanya pembayaran denda lebih diutamakan dengan tenggang waktu yang cukup.

Mengingat tujuan pemidanaan yang tidak berupa pembalasan, maka dalam penjatuhannya pidana denda hakim harus memperhatikan kemampuan terpidana secara nyata.

Disamping itu pidana denda juga mempunyai keuntungan, yaitu :

- a. Pidana denda tidak menimbulkan stigma atau cap jahat bagi terpidana, sebagaimana halnya yang dapat ditimbulkan dari penerapan pidana perampasan kemerdekaan.
  - b. Dengan penjatuhannya pidana denda, negara akan mendapatkan pemasukan di samping proses pelaksanaan hukumnya lebih mudah dan murah.
4. Pidana pembatasan kebebasan, ini merupakan pidana terberat dibanding dengan pidana lainnya, maka penulis berpendapat agar pidana ini dijatuhkan sebagai upaya yang terakhir. Selain itu juga ditentukan syarat-syarat secara rinci, sehingga hakim dapat memilih dengan tepat alasan penjatuhannya pidana

pembatasan kebebasan. Adapun didalam pidana pembatasan kebebasan ini terdapat pidana pembinaan didalam lembaga dikenakan terhadap anak yang berhubungan dengan keadaan dan perbuatannya akan membahayakan masyarakat, apabila yang bersangkutan dalam keadaan bebas, sehingga untuk pembinaannya perlu diasingkan. Pidana pembinaan didalam lembaga ini dilakukan ditempat latihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan baik pemerintah maupun swasta. Apabila anak telah menyelesaikan setengah dari pidananya dan berkelakuan baik maka berhak untuk dapat mendapatkan pelepasan bersyarat

Pidana penjara sebagai bagian dalam pidana pembatasan kebebasan. Pidana penjara ini merupakan pidana yang terberat , maka , penulis berpendapat sebelum menjatuhkan pidana ini hendaknya dipikirkan untuk mencari alternatif pidana yang lain terlebih dahulu mengingat anak masih dalam taraf pertumbuhan dan masa depannya juga masih sangat panjang. Adanya pendapat bahwa penjara merupakan perguruan tinggi untuk melakukan suatu kejahatan adalah benar karena apabila telah masuk kedalamnya terdapat kemungkinan untuk melakukan perbuatannya kembali.

Sehubungan dengan kenyataan diatas perlu kiranya dihayati prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh baik dalam

pengaturan maupun didalam pelaksanaan pidana perampasan kemerdekaan yang antara lain adalah; menempatkan prevensi pada alternatif pidana perampasan kemerdekaan (alternatives to imprisonment) seperti denda dan pidana pengawasan, jangan menggunakan pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek sejauh mungkin menerapkan The Standart Minimum Rules For The Treatment of Prisioners (SMR) yang telah diadopsi oleh konggres PBB I tentang pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Para Pelaku pada tahun 1955 dengan perubahan-perubahannya, selalu berusaha untuk mengembangkan alternatif pidana perampasan kemerdekaan dan program-program pembinaan narapidana diluar lembaga.<sup>53</sup>

Penulis merekomendasikan agar pidana penjara sebagai pidana perampasan kemerdekaan bersifat khusus atau eksepsional dan sebagai alternatif dapat digantikan dengan sanksi non custodial

Pidana tutupan adalah bagian dari pidana pembinaan didalam lembaga. Pidana tutupan ini meskipun merupakan salah satu pokok, namun pada dasarnya merupakan cara pelaksanaan dari pidana penjara yang bersifat istimewa. Karena jenis pidana ini tidak diancamkan secara khusus dalam perumusan tindak

---

<sup>53</sup> Muladi, Jenis-jenis Pidana Pokok Dalam KUHP Baru, Masalah-Masalah Hukum , Semarang, 1986, hal 61

pidana. Pertimbangan penjatuhan pidana tutupan didasarkan pada motif si pembuat tindak pidana yaitu karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati (harus ditentukan oleh hakim dan harus termuat dalam pertimbangan putusannya. Tindak pidana yang dilakukan karena alasan ini pada dasarnya tindak pidana politik.

5. Didalam pidana tambahan terdapat perampasan barang-barang tertentu ini dapat dijatuhkan terlepas dari pidana pokok . Hal ini erat kaitannya dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh pembuat dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Barang yang dapat dirampas ditentukan secara limitatif.

Adapun mengenai pidana ganti kerugian sebagai pidana tambahan bisa memenuhi salah satu tujuan pemidanaan yaitu penyelesaian konflik atau mendatangkan rasa damai

Pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan merupakan hal yang baru. Pidana ini dijatuhkan dengan harapan dapat memulihkan keseimbangan magis yang terganggu adanya delik yang bersangkutan. Jadi dalam pengertian modern pidana ini hanya bisa menyelesaikan konflik dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Pidana ini disesuaikan dengan adat setempat yang nyata-nyata masih hidup dikalangan penduduk. Tentu saja kewajiban ini tidak boleh sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat

umum. Pelaksanaan pidana ini harus tetap dalam pengawasan hakim, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum acara pidana.<sup>54</sup>

Setelah penulis memberikan gambaran tentang sanksi pidana dan tindakan pada masa yang akan datang. Terlihat bahwa sanksi yang dijatuhkan tersusun mulai dari yang paling ringan menuju yang paling berat. Hal yang demikian ini sangat menguntungkan bagi anak karena adanya tingkatan sanksi sehingga hakim dalam menjatuhkan pidananya akan lebih bijaksana.

Disini jelas bahwa walaupun secara terpaksa seorang anak diberikan reaksi, maka reaksi itu pun harus mampu memberikan jaminan adanya asas proporsionalitas dalam pemberian perlakuannya pada diri pelaku (anak). Apabila hal ini dapat diterapkan didalam peraturan perundangan tentang anak dan dalam pengaturannya terdapat kejelasan dari pasal ke pasal sehingga dalam pelaksanaanya tidak menimbulkan banyak kebingungan dan kerancuan. Hal ini sangat diharapkan bagi perkembangan jiwa anak dimasa depan maupun dampak sosial lainnya. Segala perlakuan yang pernah dialami akan membekas seumur hidupnya. Anak yang masih mempunyai masa depan serta memperhatikan efek negatif yang ditimbulkan

---

<sup>54</sup> Sudarto, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan*, BPJIN, 1982, hal 26

dari pidana penjara. Diharapkan mereka dapat tumbuh menjadi anak yang berguna bagi dirinya sendiri, keluarga dan negara.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

I. Kebijakan sanksi pidana dalam undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak

1. Dibentuknya Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak, maka setiap anak yang terlibat dalam perkara pidana mendapatkan perlakuan dan sanksi yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Adanya pembedaan pembedaan perlakuan dan sanksi perlu mengingat anak merupakan generasi muda yang perkembangan sosialnya masih perlu pembinaan.

Perbedaan penjatuhan sanksi ini adalah setengah dari sanksi pidana maksimum yang dijatuhkan kepada orang dewasa.

Tidak dikenal pidana seumur hidup atau pidana mati. Hal itu bukan berarti menyimpang dari *prinsip equality before the law*.

Ketentuan demikian dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh serasi dan seimbang bagi anak.

2. Didalam Undang-undang No. 3 tahun 1997 terdapat pidana pokok yang berupa pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana pengawasan. Terdapat pula pidana tambahan yang berupa perampasan barang-barang tertentu dan pembayaran ganti rugi serta tindakan
3. Sanksi pidana yang dijatuhkan dalam perkara anak dapat berupa pemidanaan atau sanksi yang berupa tindakan. Kedua hukuman tersebut tidak dapat diakumulasikan, melainkan dijatuhkan salah satunya.
4. Adanya kekhususan dan hal-hal yang relatif baru sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 3 tahun 1997 tersebut, melahirkan perbedaan dalam proses pidana dan pemidanaan. Perbedaan itu melingkupi hal yang berkaitan dengan jenis-jenis pidana dan tindakan maupun prosedur pemidanaan. Dalam hal itu terdapat perbedaan jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada orang dewasa dan anak nakal. Demikian pula proses peradilannya yang bagi anak nakal menjadi wewenang Pengadilan Anak.



## II. Kebijakan sanksi pidana anak pada masa yang akan datang

1. Didalam KUHP mengenai pasal 45,46,47, ketentuan ini tidak berlaku digantikan dengan UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Jadi Undang-undang Pengadilan Anak merupakan *Lex Specilais derogat lex generalis*
2. Sanksi pidana dan tindakan yang tersusun di dalam Konsep KUHP lebih menekankan tentang kesejahteraan anak. Hal ini terlihat dalam penyusunan pidananya mulai dari sanksi yang paling ringan yaitu peringatan dan teguran, menuju kepada pidana pembatasan kebebasan yaitu penjara dan tutupan.
3. Keseluruhan instrumen internasional itu hampir semuanya menekankan pentingnya perhatian masyarakat baik internasional maupun nasional terhadap kesejahteraan anak.
4. Berkaitan dengan sistim hukum yang dipakai dalam rangka penyusunan kebijakan legislatif pada masa yang akan datang berdasarkan perbandingan yang dilakukan terhadap beberapa KUHP asing maka perwujudan sanksi pidana dan tindakan yang ada didalamnya disusun mulai dari sanksi yang paling ringan menuju yang paling berat.
5. Didalam formulasi hukum di Indonesia masih menjatuhkan pidana penjara sebagai pidana pokok. Didalam KUHP asing dikenal

adanya sanksi alternatif (*alternative sanction*) sebagai pengganti pidana pokok. Hal ini menunjukkan bahwa pidana penjara dan kurungan mulai dihindarkan, dikarenakan efek negatif yang ditimbulkan akan lebih berat. Selama ini apabila sudah menjalani pidana penjara adanya keinginan untuk mengulangi perbuatannya. Pidana yang non custodial lebih dikedepankan untuk menggantikan pidana penjara ini. Hal yang seperti ini yang sangat diharapkan karena sejauh mungkin menghindari stigma tentang penjara.

6. Melihat beberapa perbandingan yang ada maka penulis berpendapat bahwa sanksi yang tersusun mulai dari yang paling ringan hingga yang berat serta adanya sanksi alternatif yang dapat meringankan bagi terdakwa dapat direkondisikan didalam penyusunan perundang-undangan dimasa yang akan datang \*
7. Adapun mengenai pedoman pemidanaan harus tetap diberikan. Syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana ini dapat diatur secara bersama-sama dengan pedoman menjatuhkan pidana ini. Pedoman tersebut misalnya bahwa terdakwa tidak menyadari bahaya dari perbuatannya, terdakwa menunjukkan rasa penyesalan, terdakwa menunjukkan sikap bahwa mulai dari saat itu akan berkelakuan menjadi lebih baik dan bertanggung jawab serta tidak akan mengulangi perbuatan itu kembali. Hal-hal seperti yang telah

tersebut diatas dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim untuk memutuskan jenis pidana lain yang harus dijatuhkan karena mengingat pembinaan terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana harus dilakukan dengan pendekatan secara khusus serta dengan pertimbangan khusus dengan pedoman untuk sebesar-besarnya kepentingan anak

## **B. SARAN**

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis menyarankan untuk mempertimbangkan kembali jenis-jenis sanksi pidana yang ada dalam UU No. 3 tahun 1997, dengan menghapuskan pidana penjara karena mempunyai efek yang sangat buruk terhadap perkembangan dan masa depan anak
2. Pidana penjara walaupun tidak ditempatkan didalam deretan pidana pokok tetapi tersendiri sebagai jenis pidana yang bersifat khusus atau eksepsional. Didalam Beijing Rules yang menekankan bahwa penahanan terhadap anak harus dibatasi seminimum mungkin dan dihimbau kepada pemerintah sedikit mungkin memasukkan anak kedalam sistim peradilan dengan mengupayakan pemanfaatan lembaga alternatif lainnya demi kesejahteraan anak dan harus pula memberi jaminan bahwa setiap reaksi terhadap pelaku kejahatan atau kenakalan

diperlakukan secara proporsional sesuai dengan situasi dan lingkungannya

3. Hendaknya pengaturan mengenai jenis – jenis sanksi pidana dilengkapi dengan tujuan, pedoman maupun syarat-syarat khusus untuk memudahkan penerapannya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adji ,Oemar Seno, *Herzeining, Ganti Rugi, Suap,Perkembangan Delik*,  
Jakarta : Erlangga , 1985
- , *Hukum Pidana Pengembangan*, Jakarta : Erlangga,  
1985
- Aggleton, Peter, *Deviance*, London : Tvastock Publication, 1987
- Atmasasmita, Romli, *Problem Kenakalan Anak-Anak atau Remaja*,  
Bandung : Armico, 1983
- , Team, *Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung :  
Mandar Maju, 1997
- Ancel, Marc, *Sosial Defence, A Modern Approch to criminal problem*,  
London : Routlege & Kegan Paul, 1965
- Benyamin, Fine, *1.000.000 Delinquents*, New York : The New American  
Library, 1957
- Bottomly, A Keith, *Decixions in the Penal Proses Law and Sosiety Series*,  
London : Martin Robertson and Company, 1973
- Costin, Lela B, *The Child and The Court : Chilad Welfare, Policies and  
Practice*, Mc Grew-Hill New York Book Company, 1972
- Delyana, Shanti, *Warita dan Anak Dimata Hukum*, Yogyakarta : Liberty,  
1988
- Drajat, Zakiah, *Kesehatan Mental*, Gunung Agung, 1983

**UPT-PUSTAK-UNDIP**

- Gunarto, Marcus Priyono Laporan Penelitian Faktor-faktor Penyebab Perbuatan Pidana Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Pada LPAN Jateng-DIY) 1989, Hal 6
- Hagan, John, *Modern Criminology, Crime, Criminal Behaviour, and Its Control*, Singapore : Mc. Graw Hill Book Com, 1987
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Kekerabatan Adat*, Jakarta; Fajar agung, 1987
- Hadisuprpto, Paulus, *Juvenile Delinquency, Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997
- Hamzah, Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986
- Hamzah, Andi, Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistim Pemidanaan Di Indonesia*, Jakarta : Akademika Presindo, 1983
- Hood, Roger, Richard Sparks, *Key Issues in Criminology*, London: World University Library, 1970
- Hoefnagels, Peter, *The Consept of Crime An Introductory of Comparative Crimonologi*, Bandung : F.H Universitas Padjajaran, 1984
- Gautama, Chandra, *Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis*, Jakarta : Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), 2000
- Gerungan, *Psycology Sosial Suatu Ringkasan*, Bandung : Eresco, 1996

Gibbons, Don C, Sixth Edition, *Society, Crime, Criminal Behavior*, New  
Jersey :Prentice Hall, 1992

Gialombardo ,Rose, Second edition, *Juvenile Delinquency, A Book of  
Readings*, New York : John Wiley and

Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Presindo,  
1985

-----, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Akademika Presindo  
,1989

Farid, Muhamad, *Konvensi Hak Anak dan Implementasinya*, Jakarta :  
Jurnalisme Anak Pinggiran , 1999

Jacson, *Enforcing the Law*, Pelican Books, 1972

Kartono, Kartini, *Pathologi sosial 2 ; Kenakalan Remaja*, Jakarta : P.T  
Raja Grafindo Perkasa, 2002

Koesnoen, R.A, *Politik Penjara Nasional*, Bandung : Sumur Bandung,  
1961

Kvaraceus, Williams C, *Dynamic of Delinquency*, Ohio : Charles E Merrils  
Books, 1996

Loqinan, Lobby, *Pidana Dan Penidanaan*, Jakarta : Datacom, 2002

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Alumni

-----, *Proyeksi Hukum Pidana Materiel Indonesia di Masa Datang*,  
(Pidato Pengukuhan), Semarang : FH UNDIP, 1990

- , *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistim Peradilan Pidana*,  
Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro,  
1997
- , *Kapita Selekta Sistim Peradilan Pidana*, Semarang : Badan  
Penerbit Universitas Diponegoro, 1995
- Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi  
Revisi, Bandung : Alumni, 1992
- , *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung :  
Citra Aditya, 1998
- Mulyono, Y Bambang, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan  
Penanggulangannya*, Jakarta : Kanisius, 1984
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta ,Bina Aksara, 54
- Moelyatno, Lanya, Ny, *Kriminologi*, Jakarta: Bina Aksara, 1986
- Nawawi Arief, Barda, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan  
Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya, 1998
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung :  
Citra Aditya, 1998
- , *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Pidana  
Penjara*, Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 1986
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan  
Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya,  
2001



- , *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- , *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994
- , Upaya Non Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Makalah Seminar Kriminologi VI, Semarang : FH UNDIP , 1991
- , Sanksi Pidana Anak di Belanda ; Bahan Kuliah, Semarang : Magister Ilmu Hukum, 2000
- , Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta: P.T. Raja Grafindo, 2002
- Prints, Darwin, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997
- Projdikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Eresco, 1986
- Reksodipuro, Mardjono, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Kumpulan Karangan : Buku Empat, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi UI, 1995
- Pursely, Robert D , Fourth edition, *Introduction to Criminal Justice*, New York : Mac Milan Publishers Company, 1984

Saleh, Roeslan, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta :  
Aksara Baru, 1983

-----, *Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban  
Pidana*, Lokakarya Masalah Pembaharuan Hukum  
pidana Nasional, BPHN -Depkeh, 1982

-----, *Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan penerbit  
Gajahmada, 1962

Sastrawijaya, Safiyudin, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*,  
Bandung : P.T. Karya Nusantara, 1977

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* , Jakarta, UI Press,  
Cetakan Ketiga, 1996

----- dan Mamudji ,Sri, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu  
Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali, 1985

Soekito, Sri Widowati Wiratmo, *Dokumen Dasar Sistematika Rancangan  
UU Tentang Peradilan Anak; Lokakarya Tentang  
Peradilan Anak*, Bandung : Binacipta, 1979

-----, *Anak dan Wanita Dalam Hukum* ,  
Jakarta : Pelita, 1983

Soemitro, Ronny Hanintijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*,  
Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990

-----, *Perbandingan Antara Penelitian Hukum  
Normatif dengan Penelitian Hukum Empiris*, Semarang:

Masalah-masalah Hukum Universitas Diponegoro No.  
9 tahun 1991

Simanjuntak, B, *Latar Belakang Kenakalan Anak*, Bandung : Alumni,  
1975

-----, *Pengantar Kriminologi dan Sosiologi*, Bandung :  
Transito, 1977

Stanley E, Group, *Theories of Punishment*, London : Indiana University  
Press, 1971

Strong, Ruth, *Fakta-fakta Tentang Kejahatan Anak Nakal*, Yayasan  
Jakarta, 1972

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1986

-----, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian  
Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung :  
Sinar Baru, 1983

-----, *Hukum Pidana I*, Cet II, Semarang : Yayasan Sudarto d/a  
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990

-----, *Suatu Dilema Dalam pembaharuan Sistim Pidana*, Pidato  
pengukuhan Sebagai Guru Besar Hukum Pidana  
Universitas Diponegoro, Cet II, 1976

-----, *Pemiidanaan, pidana dan Tindakan*, Kertas kerja : Lokakarya  
Masalah pembaharuan Kodifikasi Hukum pidana

Nasional Buku I, Badan pembinaan Hukum Nasional,  
1984

-----, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1986

Suparmi, Ninik, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan  
Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996

Supramono, Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta : Djambatan,  
2000

Sudarsono, Etika Islam Tentang kenakalan Remaja, Jakarta : Rieneka  
Cipta, 1989

-----, *Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rieneka Cipta, 1995

Soedjono, *Kriminologi*, Bandung : Alumni, 1974

Tappan, Paul W, *Juvenile Delinquency*, New York, Toronto-London : Mc  
Graw Hill Book Coy Inc, 1949

Taft, Donald , R.W England, Jr, *The Criminology*, New York : Macmillan  
Co, 1964

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa  
Departemen P dan K, Cetakan ke-3, *Kamus Besar  
Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1990

Togot, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana  
Indonesia*, Jakarta; Djambatan , 2002

Wahid , Abdul, *Laporan ahir Tim Naskah Akademik Rancangan. Pengaturan pemerintah Republik Indonesia Tentang Bentuk dan tata Cara Pelaksanaan Pidana Pengawasan*, Jakarta : BPHN

Walgito, Bimo, *Kenakalan Anak ( Juvenile Deliquency)*, Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajahmada, 1982

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Garfika, 2000

#### **Dokumen dan Peraturan Perundang-undangan**

United Nation Standart Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice, New York: Departement of Publik Information, 1986

Resolusi PBB 1386 (XIV), *Deklarasi Hak-Hak Anak*, tanggal 20 November 1958

Konsideran Resolusi PBB Nomor 44/25, 20 November 1989, *Convention Of Right Of The Child, UNICEF*

Dokumen, *Fifth United Nations Conggres on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, 1975, UN, New York, 1976,

Dokumen *Sixth United Nations Conggres on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, A/Conf.87/14/RevI,

Caracas Declaration, Caracas Venezuela, 25 Agustus --

5 September 1980

Dokumen, *Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and*

*the Treatment of Offenders* A/CONF, 121/22/Rev.1,

Milan-Italia, 26 Agustus --6 September 1985

Direktorat Perundang-undangan Direktorat Jendral Hukum dan

Perundang-undangan Departemen Hukum dan

Perundang-undangan, *Rancangan KUHP 1999-2000*

Keterangan Pemerintah Dihadapan Rapat Paripurna DPR mengenai RUU

Pengadilan Anak 1 Maret 1996

UU No. 3 Tahun 1997, *Bahan Pokok Penyuluhan Hukum Departemen*

*Kehakiman RI, 1997/1998*

UU No 4 tahun 1979, *Tentang Kesejahteraan Anak*

UU No. 3 tahun 2002, *Tentang perlindungan Anak*

UU No. 3 tahun 1997, *Tentang Peradilan Anak*